

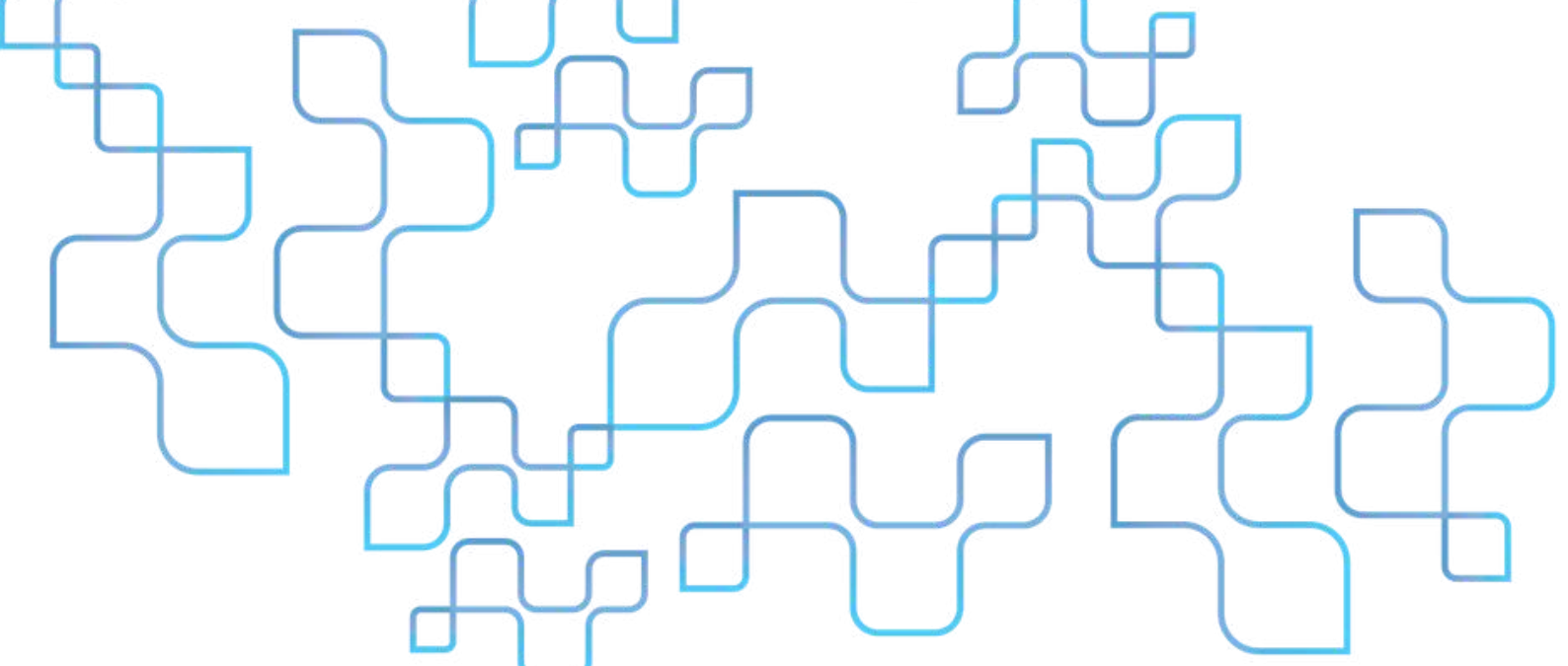


# LAPORAN KINERJA BALMON MATARAM 2025



 (0370) 646411

 [upt\\_mataram@postel.go.id](mailto:upt_mataram@postel.go.id)



# LAPORAN KINERJA 2025



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram

# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram Tahun 2025 ini disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) Kementerian Komunikasi dan Digital, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat kepada masyarakat. Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan lebih transparan dalam menyajikan program kerja.

Laporan ini berisikan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram Tahun 2025 yang telah disepakati antara Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram dengan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pada Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram memiliki 2 sasaran kegiatan yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 1.** Capaian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Tahun 2025

| No | Sasaran                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                       | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1  | Meningkatnya kepatuhan dan kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan layanan telekomunikasi | Persentase (%) monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio                                           | 80%    | 100%      | 125%    |
|    |                                                                                                                                | Persentase (%) pemeriksaan stasiun radio                                                                | 100%   | 100%      | 100%    |
|    |                                                                                                                                | Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio                                             | 95%    | 100%      | 105,26% |
|    |                                                                                                                                | Persentase (%) tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital      | 75%    | 100%      | 133,33% |
|    |                                                                                                                                | Persentase (%) terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT | 85%    | 98,96%    | 116,42% |
|    |                                                                                                                                | Persentase (%) penanganan sanksi denda administratif                                                    | 80%    | 100%      | 125%    |
|    |                                                                                                                                | Persentase (%) tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan                                       | 80%    | 100%      | 125%    |
|    |                                                                                                                                | Persentase (%) penyelenggaraan layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)                    | 100%   | 208,33%   | 208,33% |

| No | Sasaran                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                    | Target | Realisasi | Capaian |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|    |                                                                                         | Persentase (%) pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio                                    | 100%   | 100%      | 100%    |
|    |                                                                                         | Persentase (%) sosialisasi pelayanan publik                                                          | 100%   | 100%      | 100%    |
|    |                                                                                         | Persentase (%) pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik (IKM/IPKP)                               | 100%   | 123,44%   | 123,44% |
|    |                                                                                         | Persentase (%) pelaksanaan survei integritas pelayanan publik (IIPP/IPAK)                            | 100%   | 110,56%   | 110,56% |
|    |                                                                                         | Persentase (%) tindak lanjut verifikasi site ISR <i>microwave link</i> yang tidak sesuai (PrimaAksi) | 100%   | 100%      | 100%    |
| 2  | Meningkatnya kualitas tata kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang efisien dan efektif | Nilai kinerja anggaran Balai/Loka Tahun 2025                                                         | 86,95  | 86,00     | 98,91%  |
|    |                                                                                         | Nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)                     | 97     | 100       | 103,09% |

## SASARAN 1

### Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi

#### 1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Pada Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram menetapkan indikator kinerja Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan target capaian sebesar 80% dari total cakupan monitoring. Untuk memenuhi target tersebut, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram melaksanakan kegiatan monitoring okupansi pada 15 pita frekuensi. Dari kegiatan tersebut, teridentifikasi sebanyak 17.421 hasil monitoring dari 17.596 ISR dengan target 80% atau tercapai 123,76%, serta termonitor 623 dari 676 ISR dengan target 60% atau tercapai 154,21%. Selain itu, pengenaan sanksi denda administrasi atas temuan pelanggaran hasil monitoring telah dilaksanakan terhadap 17 pelanggaran dari 17 temuan (100%) yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga cakupan wilayah sasaran tercapai 100%. Dengan demikian, indikator kinerja ini melampaui target Perjanjian Kinerja dengan capaian ekuivalen sebesar 125%.

#### 2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Indikator kinerja Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target 100%. Untuk memenuhi target tersebut, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram melaksanakan tiga kegiatan utama, yaitu:

- pemeriksaan stasiun radio *microwave link*, telah dilakukan pada 2.273 ISR dari 2.273 dan 60 pelanggaran telah ditindaklanjuti,
- pengukuran parameter teknis pemancar radio FM, telah dilakukan pada 44 ISR dan 6 pelanggaran telah ditindaklanjuti,
- pengukuran parameter teknis pemancar televisi digital, telah dilakukan pada 14 ISR dan 6 ISR telah ditindaklanjuti.

Dengan demikian, indikator ini telah tercapai 100% sesuai target.

### **3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio**

Pada Tahun 2025, indikator penanganan gangguan spektrum frekuensi radio ditetapkan dengan target 95%. Dari total 4 aduan gangguan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) yang diterima, seluruhnya telah ditindaklanjuti, sehingga realisasi kinerja mencapai 100% atau tercapai 105,26% dari target.

### **4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital**

Pada tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram menetapkan target pada indikator ini sebesar 75%. Pelaksanaan monitoring menghasilkan 334 perangkat termonitor, terdiri dari 301 perangkat bersertifikat dan 33 perangkat yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditindaklanjuti melalui surat teguran dan berita acara penghentian penggunaan. Dengan demikian, indikator ini terealisasi sebesar 100% atau tercapai 133% dari target.

### **5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT**

Indikator keterjagaan operasional dan fungsi monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio (SMFR) ditetapkan dengan target 85%. Untuk memenuhi target ini, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram melaksanakan monitoring rutin dengan hasil 7 dari 8 perangkat SMFR tetap/*transportable* dalam kondisi baik (95%) dan seluruh stasiun monitor bergerak berfungsi optimal (100%). Dengan demikian, capaian indikator ini mencapai 98,96% atau setara 116,42% dari target.

### **6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administrasi**

Indikator Persentase Penanganan Sanksi Denda Administrasi ditetapkan dengan target 80% sesuai perjanjian kinerja tahun 2025. Pelaksanaan indikator ini dihitung berdasarkan jumlah sanksi administrasi yang dikenakan atas temuan pelanggaran hasil monitoring dan penertiban SFR serta Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (APT). Selama Tahun 2025, telah diterbitkan 45 *invoice* denda administrasi, dan seluruhnya telah dibayar. Dengan demikian, realisasi indikator ini mencapai 100%, atau setara 125% dari target.

### **7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Jaringan Seluler**

Indikator Persentase Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan menetapkan target 80% wilayah. Selama Tahun 2025, pengukuran kualitas layanan telah dilaksanakan di seluruh 10 kabupaten/kota dalam wilayah kerja, sehingga capaian indikator mencapai 100%, atau 125% dari target.

### **8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTSIKRAN)**

Indikator Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio ditetapkan dengan target 100%. Sepanjang Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram telah melaksanakan 13 kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dengan total 265 peserta, serta 2 kegiatan sertifikasi SRC/LRC dan IKRAN dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Dengan demikian, indikator ini telah tercapai 208,33%, jauh melebihi target.

### **9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio**

Indikator ini menargetkan capaian 100% yang diukur melalui pelaksanaan pencegahan dan pengurangan piutang minimal 80% serta koordinasi penanganan piutang dengan KPKNL. Selama Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram telah menangani piutang dengan menghubungi seluruh 325 WABA sesuai target, melalui komunikasi media *online* maupun kunjungan lapangan. Selain itu, 1 WABA telah dilimpahkan ke KPKNL. Dengan demikian, indikator ini mampu terealisasi 100% sesuai target.

## 10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

Indikator Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik menargetkan capaian 100% sesuai perjanjian kinerja tahun 2025, yang diukur melalui pelaksanaan minimal satu kegiatan sosialisasi dengan peserta sekurang-kurangnya 30 orang. Pada Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram telah melaksanakan dua kegiatan sosialisasi secara tatap muka dengan total 94 peserta. Dengan demikian, indikator sosialisasi pelayanan publik tercapai 100% sesuai target.

## 11. Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Indikator ini menargetkan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) minimal 1 kali per tahun, dengan nilai indeks sekurang-kurangnya 3,2 dari skala 4 dan jumlah responden minimal 30 orang, sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Sepanjang Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram telah melaksanakan 4 survei (setiap triwulan) dengan hasil nilai SKM berkisar antara 3,90-3,95 dan jumlah responden 33-36 orang pada setiap periode. Dengan capaian tersebut, indikator pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik melampaui target sebesar 123,44%.

## 12. Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Indikator ini menargetkan pelaksanaan survei integritas pelayanan publik minimal sekali per tahun, dengan nilai indeks minimal 3,6 dari 4 dan jumlah responden minimal 30 orang, sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Sepanjang Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram telah melaksanakan 4 survei (sekali setiap triwulan) dengan hasil nilai SKM berkisar antara 3,95-3,98 dan jumlah responden 33-36 orang pada setiap periode. Dengan capaian tersebut, indikator pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) terealisasi 110,56% melampaui target.

## 13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)

Indikator ini menetapkan target 100% tindak lanjut atas hasil verifikasi site ISR *microwave link* yang tidak sesuai, dengan sampel 1.000 ISR dan seluruh pelanggaran hasil temuan wajib ditindaklanjuti di wilayah kerja. Sepanjang tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram telah menindaklanjuti verifikasi terhadap 1.061 ISR serta 239 koordinat yang tidak sesuai, sehingga capaian indikator tercapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

## SASARAN 2

### Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

#### 1. Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025

Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Tahun 2025 ditetapkan sebesar 86,95, yang dihitung dari dua komponen utama, yaitu nilai perencanaan anggaran (Smart DJA) dan nilai pelaksanaan anggaran (IKPA OM-SPAN) dengan bobot masing-masing 50%. Pada Tahun 2025, nilai perencanaan anggaran mencapai 75,00 (bobot 37,50) dan nilai pelaksanaan anggaran mencapai 97,51 (bobot 48,50), sehingga total NKA sebesar 86,00 atau 98,91% dari target. Dengan demikian, indikator kinerja anggaran belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

#### 2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA ditetapkan dengan target 97 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penilaian dilakukan menggunakan skala 100, dengan pengurangan nilai berdasarkan ketentuan Biro Keuangan. Pada Tahun 2025, UAKPA Balai Monitor SFR Kelas II Mataram memperoleh nilai 100 dari tim penilai Biro Keuangan. Capaian ini tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui target, serta mencerminkan pengelolaan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel.

# Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi (LAKIN) Tahun 2025 Balai Monitor SFR Kelas II Mataram dapat diselesaikan dengan baik.

LAKIN ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada instansi yang lebih tinggi dan masyarakat. Dokumen ini memuat capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan yang diharapkan dapat menjadi dasar peningkatan perencanaan dan pelaksanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan laporan dilakukan secara cermat dan akuntabel dengan melibatkan Subbagian Umum serta seluruh Tim Kerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram.

Laporan ini menyajikan keterkaitan antara penggunaan anggaran, sasaran, dan keluaran yang dicapai sepanjang Tahun 2025, berdasarkan Rencana Strategis DJID Tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Tahun 2025.

Semoga LAKIN ini memberikan informasi yang jelas mengenai capaian kinerja instansi dan bermanfaat bagi seluruh pihak. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Februari 2026

**Kepala Balai Monitor  
SFR Kelas II Mataram**



Asno, S.T., M.H.

# Daftar Isi

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ringkasan Eksekutif ..... | 1 |
| Kata Pengantar.....       | 5 |
| Daftar Isi.....           | 6 |

## 1. PENDAHULUAN

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Latar Belakang.....                         | 9  |
| Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi..... | 11 |
| Potensi dan Permasalahan Strategis.....     | 14 |
| Sistematika Penulisan.....                  | 14 |

## 2. RENCANA KINERJA

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Rencana Strategis.....   | 17 |
| Sasaran Kegiatan.....    | 19 |
| Perjanjian Kegiatan..... | 20 |

## 3. AKUNTABILITAS KINERJA

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Sasaran Kinerja 1.....        | 23 |
| Sasaran Kinerja 2.....        | 72 |
| Akuntabilitas Keuangan.....   | 80 |
| <i>Benchmark</i> Kinerja..... | 88 |
| Kinerja Lainnya.....          | 90 |

## 4. PENUTUP

|                      |    |
|----------------------|----|
| Kesimpulan.....      | 96 |
| Galeri Kegiatan..... | 97 |



**“Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama,  
kita masih hidup di masa pancaroba. Jadi,  
tetaplah bersemangat! Kerja sama dan persatuan  
adalah kunci kemenangan”**

**- Soekarno -**



# 1

## PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 1.3 Potensi dan Permasalahan Strategis
- 1.4 Sistematika Penulisan

Perkembangan teknologi digital yang ditandai oleh kemajuan *artificial intelligence*, *cloud computing*, dan *data analytics* mendorong perlunya transformasi digital di seluruh sektor, termasuk pemerintahan. Transformasi digital tidak hanya menyangkut penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja, strategi, dan proses bisnis guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas layanan publik.

Dalam pelaksanaannya, transformasi digital di Indonesia masih menghadapi tantangan, khususnya pemerataan akses internet. Spektrum frekuensi radio sebagai infrastruktur utama jaringan telekomunikasi menjadi faktor penting dalam mendukung tersedianya layanan seluler 4G/5G, Wi-Fi, dan layanan internet lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan spektrum harus dilakukan secara tertib, efisien, dan bebas dari interferensi.

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan perubahannya, memiliki mandat untuk mengelola spektrum frekuensi radio secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip *good governance*. Pengawasan yang baik diperlukan agar seluruh penggunaan frekuensi dan perangkat telekomunikasi berizin serta tidak mengganggu stabilitas layanan.

Balai Monitor SFR Kelas II Mataram sebagai UPT Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan SFR dan APT di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tugas ini dilakukan untuk memastikan ketertiban pemanfaatan spektrum, mencegah interferensi, serta mendukung terwujudnya kualitas layanan telekomunikasi yang optimal bagi masyarakat.



Gambar 1.1  
Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Mataram

Laporan Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Monitor SFR Kelas II Mataram atas pencapaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai alat evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

Melalui LAKIN tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram berokmitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan memastikan pengelolaan SFR dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan publik yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat.

### Gambaran Umum Wilayah Nusa Tenggara Barat

Secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta ratusan pulau kecil yang tersebar di sekitarnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, wilayah Povinsi Nusa Tenggara Barat memiliki luas sekitar 19.675,89 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebesar 5.646.000 jiwa yang terdiri dari 2.832.700 jiwa penduduk laki-laki (50,08%) dan 2.813.300 jiwa penduduk perempuan (49,92%). Penduduk tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota dan 117 kecamatan di seluruh wilayah. Secara astronomis, Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak pada koordinat antara 115°46'–119°05' Bujur Timur dan 8°10'–9°05' Lintang Selatan.

Batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
- Sebelah Timur : Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali

**Grafik 1.1**

*Peta Kondisi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat*



Sumber: Data BPS Nusa Tenggara Barat, 2025

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang semakin luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konektivitas masyarakat, khususnya melalui tersedianya layanan seluler, *internet broadband*, serta siaran televisi digital dan radio FM. Kemajuan tersebut tidak hanya ditopang oleh perluasan jaringan dari berbagai operator telekomunikasi, tetapi juga oleh ketersediaan alat dan perangkat telekomunikasi yang semakin andal dan canggih, seperti pemancar, penerima sinyal, antena, dan perangkat pendukung lainnya yang berperan penting dalam menjaga kualitas layanan agar tetap stabil dan minim gangguan. Dengan dukungan infrastruktur dan perangkat yang memadai, masyarakat Nusa Tenggara Barat semakin mudah mengakses informasi dan layanan digital, meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Kondisi ini pada akhirnya mendorong percepatan transformasi digital dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang monitoring spektrum frekuensi radio yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram memiliki tugas, fungsi, dan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio, dengan kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

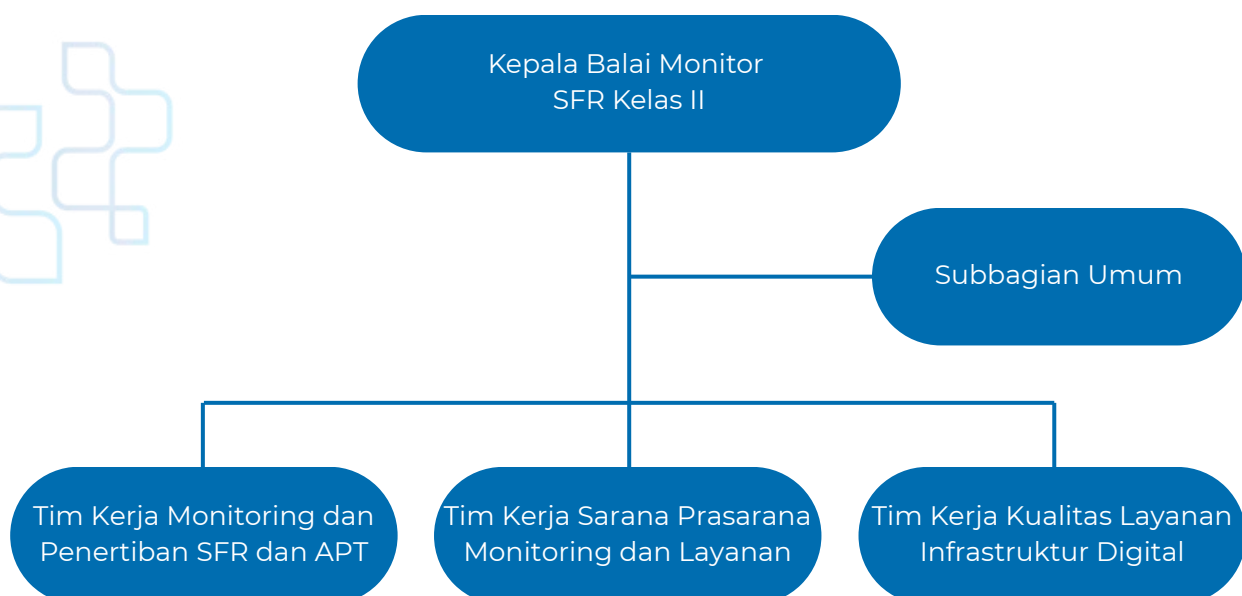
### 1. Tugas Pokok

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram memiliki tugas utama untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

### 2. Fungsi

- Penyusunan rencana dan program;
- Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- Penyampaian izin stasiun radio & surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

**Grafik 1.2** Struktur Organisasi Balai Monitor Kelas II



Struktur organisasi Balai Monitor SFR Kelas II Mataram dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan terkoordinasi. Struktur tersebut terdiri atas subbagian umum dan jabatan fungsional, dengan jabatan fungsional Pengendali Frekuensi Radio yang dikelompokkan ke dalam beberapa tim kerja sesuai dengan fokus dan ruang lingkup kegiatan pengawasan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi.

#### 1. Subbagian umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

#### 2. Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio

Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional di unit pelaksana teknis monitor spektrum frekuensi radio dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tim Kerja di Lingkungan Balai Monitor SFR Kelas II Mataram. Adapun rincian tugas setiap tim kerja adalah sebagai berikut:

##### a. Tim kerja Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, yang memiliki lingkup tugas sebagai berikut:

- pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pengukuran, pemeriksaan stasiun radio, dan pemantauan penggunaan SFR serta pemenuhan standardisasi APT dan infrastruktur digital lainnya;
- pemantauan dan evaluasi penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital lainnya;
- pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
- pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum di bidang pengendalian SFR, pemenuhan standardisasi APT, serta penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
- pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio;
- pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang hasil penertiban SFR/APT;
- pemantauan dan evaluasi kegiatan penertiban SFR/APT dan penanganan gangguan SFR; dan
- pengenaan sanksi denda administratif atas pelanggaran penggunaan SFR dan/atau sertifikat APT.

Dari pelaksanaan lingkup tugas tersebut, Tim kerja Monitoring dan Penertiban SFR dan APT menghasilkan *output* kerja sebagai berikut:

- rekapitulasi hasil pemantauan, observasi, identifikasi, deteksi lokasi dan sumber pancaran;
- data potensi dan pemetaan sumber daya frekuensi setiap wilayah layanan;
- rekapitulasi hasil pengukuran parameter teknis dan wilayah jangkauan;
- rekapitulasi data hasil pemantauan APT yang bersertifikat dan tidak bersertifikat;
- laporan hasil pemantauan penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
- dokumen kegiatan penertiban SFR/APT antara lain:
  - 1) dokumen target operasi penertiban SFR/APT;
  - 2) dokumen hasil operasi penertiban SFR/APT berupa dokumen pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggar SFR/APT sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - 3) dokumen administrasi penyidikan terhadap pelanggar SFR/APT apabila sampai dengan tahap penegakkan hukum.

- laporan koordinasi dengan instansi terkait berupa hasil:
    - 1) penertiban penggunaan SFR/APT;
    - 2) penyidikan pelanggaran SFR/APT; atau
    - 3) pemusnahan barang hasil penertiban SFR/APT.
  - laporan penanganan gangguan SFR;
  - laporan hasil pemusnahan barang hasil penertiban SFR/APT; dan
  - laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan penertiban SFR/APT dan penanganan gangguan SFR.
- b. Tim kerja Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan, memiliki lingkup tugas sebagai berikut:
- pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio dan perangkat ukur kualitas layanan;
  - pelaksanaan ketersediaan perangkat monitor frekuensi radio dan perangkat ukur kualitas layanan;
  - pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
  - pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan SFR;
  - pelaksanaan ujian amatir radio dan sertifikasi izin komunikasi radio perikanan;
  - pelaksanaan konsultasi perizinan bidang SFR, sertifikasi operator radio, dan sertifikasi APT, serta penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
  - pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik mengenai frekuensi radio; dan
  - pelaksanaan survei IKM/IPKP dan survei IIPP/IPAK.
- Dari pelaksanaan lingkup kerja tersebut, maka dapat dihasilkan *output* kerja berupa:
- data kondisi perangkat monitor, alat ukur, SMFR, *transportable*, *mobile* unit bergerak, dan alat ukur kualitas layanan;
  - data *performance*/uji fungsi alat dan perangkat monitor;
  - data jam kerja alat dan perangkat monitor;
  - jadwal dan dokumen kalibrasi alat ukur;
  - data pemeliharaan sarana pendukung elektrik dan mekanik;
  - laporan hasil pendampingan piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
  - rekapitulasi laporan pengaduan masyarakat terhadap gangguan SFR;
  - sertifikasi operator radio (MoTS, ISR, SRC/LRC, IAR);
  - laporan hasil sosialisasi pengawasan dan pengendalian penggunaan SFR/APT; dan
  - laporan hasil penilaian survey IKM/IPKP dan survei IIPP/IPAK.
- c. Tim kerja Kualitas Layanan Infrastruktur Digital, memiliki lingkup tugas sebagai berikut:
- pelaksanaan pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital;
  - pengelolaan data hasil pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital;
  - melakukan pembaharuan data kualitas layanan infrastruktur digital ke dalam aplikasi PMT;
  - pengukuran parameter teknis stasiun siaran;
  - pemeriksaan stasiun radio *microwave link* untuk seluler; dan
  - verifikasi *site microwave link* (Prima Aksi).

Dari pelaksanaan lingkup kerja tersebut, maka dapat dihasilkan *output* kerja berupa:

- laporan hasil pelaksanaan pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital;
- laporan hasil pengelolaan data hasil pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital;
- data PMT yang *ter-update*;
- laporan hasil pelaksanaan pengukuran parameter teknis stasiun siaran televisi digital dan radio siaran FM;
- laporan hasil pemeriksaan stasiun radio *microwave link* seluler; dan
- laporan hasil verifikasi *site microwave link*.

### 1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Pada Tahun 2025, perkembangan transformasi digital dan perluasan layanan *broadband*, meningkat pesat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini memicu lonjakan kebutuhan *bandwidth* yang berdampak pada alokasi spektrum frekuensi, kinerja sektor telekomunikasi, serta tuntutan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekosistem industri. *Mobile broadband* menjadi tulang punggung penyediaan konektivitas, terutama pada wilayah kepulauan yang belum terlayani jaringan kabel.

Penyelenggaraan berbagai event nasional maupun internasional seperti Fornas, GT World Challenge Asia, IATC, AARC, PCCA, dan MotoGP turut memperbesar kebutuhan akan layanan telekomunikasi yang andal. Optimalisasi pengelolaan SFR menjadi krusial untuk menjamin kelancaran komunikasi, penyiaran, dan konektivitas selama kegiatan berlangsung. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan yang tepat terhadap pemanfaatan spektrum sebagai sumber daya terbatas menjadi kebutuhan strategis.

Namun demikian, pengelolaan SFR dan kualitas layanan telekomunikasi di Nusa Tenggara Barat masih menghadapi sejumlah permasalahan utama, yaitu:

1. penyalahgunaan SFR dan alat/perangkat telekomunikasi;
2. gangguan komunikasi yang berdampak pada keselamatan penerbangan dan maritim;
3. terjadinya interferensi frekuensi radio;
4. penggunaan SFR yang tidak sesuai parameter teknis atau ketentuan teknis;
5. kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem perizinan berbasis *online*; dan
6. belum meratanya penyebaran jaringan seluler di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan koordinasi pemerintah, penyelenggara telekomunikasi, dan masyarakat guna memastikan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien, dan mendukung keberlanjutan transformasi digital di Nusa Tenggara Barat.

### 1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja organisasi, pencapaian yang telah diraih, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan. Ruang Lingkup Laporan Kinerja ini meliputi empat bagian utama sebagai berikut:

1. Pendahuluan - Berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
2. Perencanaan Kinerja - Berisikan ikhtisar tentang perjanjian kinerja serta target yang telah ditetapkan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Mataram untuk tahun 2025.
3. Akuntabilitas Kinerja - Menyajikan hasil capaian kinerja organisasi selama tahun 2025 untuk setiap pernyataan sasaran strategis dan pernyataan indikator kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta penyajian tentang pengelolaan dan realisasi anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan organisasi.
4. Penutup - Berisikan kesimpulan umum tentang pencapaian kinerja yang telah diraih organisasi serta langkah langkah yang akan ditempuh oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.



**"Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita.  
Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa  
mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat,  
yang hanya bisa diwujudkan dengan kerja sama  
dan usaha bersama"**

**- Mohammad Hatta -**





# 2

## **RENCANA KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Sasaran kegiatan
- 2.3 Perjanjian Kinerja

Sumber daya spektrum frekuensi radio merupakan aset publik yang bersifat terbatas dan strategis, sehingga pengelolaannya memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta peningkatan kualitas dan kecepatan layanan digital. Pengelolaan spektrum frekuensi radio tersebut selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital yang berkomitmen mendorong Transformasi Digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita. Transformasi digital ini diarahkan untuk mewujudkan konektivitas bermakna yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, membangun ekosistem digital yang memberdayakan, serta menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat. Upaya tersebut mencakup pengembangan pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital, yang didukung oleh tata kelola digital yang kuat, pengembangan ekosistem *start-up*, industri *game*, serta pemanfaatan teknologi digital baru (*emerging technologies*).

Infrastruktur digital yang meliputi *broadband*, spektrum dan orbit satelit, perangkat TIK, telekomunikasi khusus, serta *data center* merupakan fondasi utama dalam mendukung transformasi digital nasional. Selain itu, komunikasi publik, pengendalian dan pengawasan ruang digital, serta penguatan internal manajemen menjadi faktor pendukung agar pelaksanaan kebijakan dan program berjalan efektif dan efisien. Melalui kerangka tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong terwujudnya transformasi digital yang inklusif, aman, dan berdaulat dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut, Kementerian Komdigi memiliki sembilan sasaran strategis, antara lain:

1. Mempercepat penyediaan konektivitas *broadband* inklusif, berkualitas, dan terjangkau.
2. Mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus secara nasional.
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem digital nasional.
4. Mengakselerasi kualitas dan produktivitas masyarakat digital.
5. Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan *citizen centric*.
6. Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat.
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi.
8. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik.
9. Mewujudkan transformasi internal manajemen adaptif dan resilien.

Berdasarkan sembilan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) memperoleh mandat utama untuk mendukung pencapaian empat Sasaran Strategis. **Sasaran strategis 1**, yaitu mempercepat penyediaan konektivitas *broadband* yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau. Peran ini dilaksanakan melalui perencanaan dan pengembangan infrastruktur digital yang terintegrasi dan berkelanjutan, penguatan tata kelola data pembangunan infrastruktur digital, sinkronisasi kebijakan lintas sektor, serta peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. DJID juga mendorong pemerataan akses internet, termasuk di wilayah prioritas dan wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, serta melakukan pengendalian pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kebijakan tarif guna menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi dan peningkatan kualitas layanan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan **Sasaran Strategis 2** yaitu mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus secara nasional, DJID berperan memastikan ketersediaan dan keandalan infrastruktur komunikasi yang mendukung layanan strategis pemerintah, khususnya dalam perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini dilaksanakan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, harmonisasi regulasi, serta fasilitasi pengembangan infrastruktur TIK di daerah. DJID juga mendorong peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan sistem komunikasi nasional melalui penguatan standar operasional, redundansi sistem, serta peningkatan kualitas layanan komunikasi khusus agar tetap andal dalam kondisi darurat maupun bencana, sehingga kesinambungan layanan publik yang bersifat vital tetap terjaga dan mampu mendukung respons cepat pemerintah dalam situasi krisis secara terintegrasi dan berkelanjutan

Kemudian dalam rangka mendukung **Sasaran Strategis 7**, yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kementerian Komunikasi dan Digital, DJID berperan dalam memastikan terselenggaranya layanan publik bidang infrastruktur dan perangkat digital yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Peran ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas proses pelayanan, penguatan standar layanan, serta pemanfaatan sistem digital guna mendukung kemudahan akses dan kepastian layanan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu, DJID bertanggung jawab dalam pengelolaan PNPB bidang infrastruktur digital secara akuntabel dan optimal, serta menjaga integritas pelayanan publik.

Adapun dalam mendukung **Sasaran Strategis 9**, yaitu mewujudkan transformasi internal manajemen yang adaptif dan resilien. Peran ini dilaksanakan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi, penguatan manajemen kinerja, pengelolaan risiko, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi manajemen untuk mendukung proses kerja yang lebih *agile* dan responsif. DJID juga mendorong implementasi reformasi birokrasi tematik secara konsisten sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang profesional, akuntabel, dan mampu beradaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui persentase implementasi reformasi birokrasi di lingkungan DJID.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, DJID menetapkan dua program utama, yaitu Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital serta Program Dukungan Manajemen. Kedua program ini dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan yang mencakup penataan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, standarisasi perangkat digital, monitoring dan pengendalian kualitas layanan telekomunikasi, penyelenggaraan layanan publik bidang sumber daya dan perangkat digital, serta penguatan tata kelola, pengawasan internal, dan pengelolaan keuangan serta barang milik negara. Program dan kegiatan tersebut dirancang untuk memastikan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang andal sekaligus mendukung efektivitas pelaksanaan tugas organisasi.

Selanjutnya, sebagai bentuk penjabaran operasional dari program dan kegiatan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) di tingkat pelaksana teknis, ditetapkan Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Balai Monitor SFR Kelas II Mataram. Perjanjian kinerja ini memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, serta target yang telah diselaraskan dengan kebijakan dan arah strategis DJID, sehingga menjadi pedoman utama bagi UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui perjanjian kinerja tersebut, UPT diarahkan untuk melaksanakan pengendalian spektrum frekuensi radio, pengawasan perangkat dan menjaga kualitas layanan telekomunikasi, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan publik secara terukur dan akuntabel. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian kinerja UPT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian sasaran strategis DJID dan Kementerian Komunikasi dan Digital secara keseluruhan.

## 2.2 SASARAN KEGIATAN

Sebagai tindak lanjut atas tujuan dan sasaran strategis serta program yang telah ditetapkan, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram menetapkan sasaran kegiatan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan kegiatan dalam satu tahun perencanaan. Setiap sasaran kegiatan tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, yang digunakan sebagai dasar evaluasi atas capaian kinerja unit kerja selama periode perencanaan.

1. Meningkatnya kepatuhan dan kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan layanan telekomunikasi. Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung sasaran kegiatan ini, terdapat 13 (tiga belas) indikator kinerja yang akan digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan sasaran kegiatan ini, yaitu:
  - a. persentase (%) monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio dengan target 80%;
  - b. persentase (%) pemeriksaan stasiun radio dengan target 100%;
  - c. persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dengan target 95%;
  - d. persentase (%) tingkat kepatuhan standar teknis Alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital dengan target 75%;
  - e. persentase (%) terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT dengan target 85%;
  - f. persentase (%) penanganan sanksi denda administrasi dengan target 80%;
  - g. persentase (%) tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan dengan target 80%;
  - h. persentase (%) penyelenggaraan layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) dengan target 100%;
  - i. persentase (%) pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio dengan target 100%;
  - j. persentase (%) sosialisasi pelayanan publik dengan target 100%;
  - k. persentase (%) pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik (IKM/IPKP) dengan target 100%;
  - l. persentase (%) pelaksanaan survei integritas pelayanan publik (IIPP/IPAK) dengan target 100%;
  - m. persentase (%) tindak lanjut verifikasi site *ISR microwave link* yang tidak sesuai (PrimaAksi) dengan target 100%.
2. Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien. Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung sasaran kegiatan kedua, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang akan digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan sasaran kegiatan ini.
  - a. Nilai kinerja anggaran balai/loka Tahun 2025 dengan target 86,95. Yang menjadi indikator penilaian nilai kinerja anggaran adalah pengelolaan UP/TUP, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, deviasi halaman III DIPA, revisi DIPA, capaian output, dan penyerapan anggaran.
  - b. Nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan target 97. Yang menjadi indikator penilaian nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA adalah jumlah transaksi koreksi audit, kesalahan penggunaan akun belanja, saldo kas di bendahara pengeluaran/penerimaan akhir tahun, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke entitas pelaporan, hasil penilaian PIPK, dan ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penilaian PIPK.

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur sebagai bentuk komitmen dan akuntabilitas.

Untuk tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram menetapkan pagu awal sebesar Rp13.393.787.000. Dengan berlakunya SOTK baru, DIPA terbagi menjadi dua, yaitu Rp3.784.272.000 untuk DIPA lama (kode satker 654162) dan Rp9.609.515.000 untuk DIPA baru (kode satker 694716). Selanjutnya, adanya blokir efisiensi dan realokasi anggaran menjadikan total pagu DIPA tahun 2025 sebesar Rp8.783.430.000, termasuk blokir efisiensi sebesar Rp2.177.912.000.

**Tabel 2.1** Perjanjian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Tahun 2025

| No | Sasaran                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                       | Target |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya kepatuhan dan kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan layanan telekomunikasi | Persentase (%) monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio                                           | 80%    |
|    |                                                                                                                                | Persentase (%) pemeriksaan stasiun radio                                                                | 100%   |
|    |                                                                                                                                | Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio                                             | 95%    |
|    |                                                                                                                                | Persentase (%) tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital      | 75%    |
|    |                                                                                                                                | Persentase (%) terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT | 85%    |
|    |                                                                                                                                | Persentase (%) penanganan sanksi denda administratif                                                    | 80%    |
|    |                                                                                                                                | Persentase (%) tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan                                       | 100%   |
|    |                                                                                                                                | Persentase (%) penyelenggaraan layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)                    | 100%   |
|    |                                                                                                                                | Persentase (%) pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio                                       | 100%   |
|    |                                                                                                                                | Persentase (%) sosialisasi pelayanan publik                                                             | 100%   |
|    |                                                                                                                                | Persentase (%) pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik (IKM/IPKP)                                  | 100%   |
|    |                                                                                                                                | Persentase (%) pelaksanaan survei integritas pelayanan publik (IIP/IPAK)                                | 100%   |
| 2  | Meningkatnya kualitas tata kelola ditjen Infrastruktur Digital yang efektif dan efisien                                        | Nilai kinerja anggaran Balai/Loka Tahun 2025                                                            | 86,95  |
|    |                                                                                                                                | Nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)                        | 97     |



**“Tidak ada yang mustahil jika kita memiliki tekad  
dan kerja keras yang sungguh-sungguh”**

**- B. J. Habibie -**



# 3

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Sasaran Kinerja 1

3.2 Sasaran Kinerja 2

3.3 Akuntabilitas Keuangan

3.4 Kinerja Lainnya

## IK-1.1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

## Latar Belakang

Pengawasan terhadap penggunaan SFR perlu terus diperkuat seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era Revolusi Industri 4.0. Balai Monitor SFR Kelas II Mataram melaksanakan fungsi ini melalui kegiatan monitoring penggunaan SFR sebagai indikator kinerja yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan spektrum serta memastikan pemanfaatannya berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan monitoring, pemerintah dapat mendeteksi dini penggunaan ilegal, memastikan kepatuhan pengguna frekuensi, serta menjaga kualitas layanan yang bergantung pada stabilitas spektrum.

Pencapaian indikator ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, pelaku pariwisata dan UMKM, serta instansi pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan kualitas layanan telekomunikasi. Monitoring penggunaan SFR turut mendukung ketersediaan konektivitas yang andal, sehingga berkontribusi pada peningkatan inklusi digital dan kualitas pelayanan publik di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram.

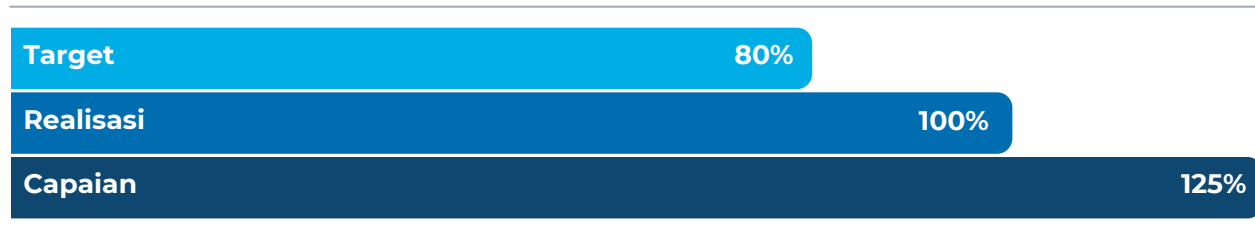
## Capaian Kinerja

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 10 kabupaten/kota dengan karakteristik kepulauan memerlukan pengawasan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) secara intensif dan berkelanjutan. Pada Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram menargetkan 80% kabupaten/kota termonitor. Monitoring dinyatakan memenuhi kinerja apabila telah memenuhi okupansi 15 pita frekuensi radio sesuai penugasan, mencapai minimal 60% realisasi monitoring terhadap Izin Stasiun Radio (ISR) yang tercatat pada Aplikasi ROL, mengidentifikasi sekurang-kurangnya 80% hasil monitoring, serta menerapkan sanksi atas setiap temuan pelanggaran sesuai ketentuan dalam Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025.

Berdasarkan target tersebut, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram berhasil merealisasikan 100% pelaksanaan monitoring, atau mencapai 125% dari target kinerja. Indikator ini mampu menyerap anggaran sebesar **Rp168.418.400 (99,91%)** dari pagu anggaran non-blokir sebesar **Rp168.577.683**. Tingkat serapan yang sangat optimal dengan capaian kinerja melampaui target menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien, dengan pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

## Grafik 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2025





**Gambar 3.1**  
*Kegiatan Monitoring SFR*

### Okupansi Sesuai Pita Penugasan

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital nomor: 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) UPT Bidang Pengendalian Infrastruktur Digital dan Penjelasan terkait Pencapaian PK UPT Tahun 2025, terdapat 15 *subservice*/pita frekuensi radio yang harus dimonitor. Pada Tahun 2025, telah dilakukan kegiatan okupansi 15 pita sesuai dengan pita penugasan di seluruh kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara Barat.

**Tabel 3.1**  
*15 Pita Frekuensi Target Monitoring*

| No | <i>Subservice</i>                                                                                   | Pita Frekuensi (MHz) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Radio FM, DRM +INS04                                                                                | 87-108               |
| 2  | Penerbangan VHF "INS36                                                                              | 108-137              |
| 3  | Komrad VHF, Instansi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik<br>"INS04A "INS048, Maritim VHF *INS36 | 137-174              |
| 4  | DRM, DAB IN505                                                                                      | 174-230              |
| 5  | Tetap INS088, Bergerak *INS08 "INS08A "INS08C *INSOD,<br>Marabahaya *INS35                          | 300-430              |
| 6  | Komrad UHF "INS11 "INS08C *INSOSD                                                                   | 430-460              |
| 7  | Tetap, Bergerak "INS11 "INS12                                                                       | 460-470              |
| 8  | Televisi UHF INS13B "INS13C, IMT "INS13                                                             | 478-806              |
| 9  | <i>Trunking</i> "INS14, <i>Downlink</i> Seluler 800 *INS15                                          | 806-880              |

\*lanjutan tabel 3.1

| No | Subservice                                            | Pita Frekuensi (MHz) |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 10 | Downlink Seluler 900 INS16                            | 925-960              |
| 11 | International Mobile Telecommunications (IMT) *INS17A | 1427-1518            |
| 12 | Downlink Seluler 1800 "INS19                          | 1805-1880            |
| 13 | Downlink Seluler 2100 *INS21A                         | 2110-2170            |
| 14 | International Mobile Telecommunications (IMT) *INS22  | 2170-2200            |
| 15 | Seluler, Broadband 2.3 GHz "INS24                     | 2300-2400            |

## Identifikasi Hasil Monitoring

**Tabel 3.2**  
Identifikasi Hasil Monitoring SFR di Kabupaten/Kota Tahun 2025

| Wilayah       | Jumlah IDEN Termonitor | IDEN Target dalam PK 80% | IDEN Teridentifikasi | Capaian IDEN (%) |
|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Total         | 4729                   | 3783                     | 4641                 | 122,68           |
| Mataram       | 6037                   | 4830                     | 6004                 | 124,31           |
| Lombok Barat  | 4003                   | 3202                     | 3957                 | 123,58           |
| Lombok Utara  | 86                     | 69                       | 86                   | 124,64           |
| Lombok Tengah | 157                    | 126                      | 156                  | 123,81           |
| Lombok Timur  | 1324                   | 1059                     | 1319                 | 124,55           |
| Sumbawa Barat | 205                    | 164                      | 205                  | 125              |
| Sumbawa       | 64                     | 51                       | 63                   | 123,53           |
| Dompu         | 906                    | 725                      | 905                  | 124,83           |
| Bima          | 85                     | 68                       | 85                   | 125              |
| Kota Bima     | 85                     | 68                       | 85                   | 125              |

Dari hasil kegiatan okupansi terhadap 15 pita frekuensi radio yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terpantau sebanyak 12.614 penggunaan frekuensi radio. Berdasarkan ketentuan, ditetapkan target identifikasi minimal sebesar 80% atau setara dengan 8.830 penggunaan frekuensi. Sepanjang Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram berhasil mengidentifikasi sebanyak 12.155 penggunaan frekuensi radio, atau sebesar 96,361% dari total hasil okupansi yang tercatat. Capaian tersebut menunjukkan realisasi kinerja sebesar 137,66% dari target yang ditetapkan. Tingginya tingkat identifikasi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan monitoring serta konsistensi Balai Monitor SFR Kelas II Mataram dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio secara tertib, terukur, dan berkelanjutan.

## Monitoring ISR

**Tabel 3.3**  
Monitoring ISR Per Kabupaten/Kota Tahun 2025

| Wilayah       | Jumlah ISR | Target Monitor ISR dalam PK 60% | ISR Termonitor | Capaian Target (%) |
|---------------|------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| Total         | 676        | 404                             | 623            | 154,21             |
| Mataram       | 142        | 85                              | 141            | 165,88             |
| Lombok Barat  | 71         | 43                              | 69             | 160,47             |
| Lombok Utara  | 95         | 57                              | 93             | 163,16             |
| Lombok Tengah | 59         | 35                              | 43             | 122,86             |
| Lombok Timur  | 49         | 29                              | 49             | 168,97             |
| Sumbawa Barat | 79         | 47                              | 75             | 159,57             |
| Sumbawa       | 69         | 41                              | 62             | 151,22             |
| Dompu         | 38         | 23                              | 29             | 126,09             |
| Bima          | 44         | 26                              | 39             | 150                |
| Kota Bima     | 30         | 18                              | 23             | 127,78             |

Selain pelaksanaan kegiatan okupansi terhadap 15 pita frekuensi radio dan identifikasi hasil monitoring, indikator kinerja ini juga menetapkan target monitoring terhadap Izin Stasiun Radio (ISR) sebesar 60% dari total 645 ISR yang terdaftar dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau setara dengan 325 ISR. Pada tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram berhasil melaksanakan monitoring terhadap 584 ISR, sehingga realisasi kinerja mencapai 179,69% dari target yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring ISR ini diprioritaskan pada pengguna dengan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus guna memastikan kepatuhan terhadap parameter teknis dan ketentuan perizinan yang berlaku.



**Gambar 3.2**  
Kegiatan Monitoring ISR di Lombok Tengah

## Pengenaan Sanksi terhadap Temuan Pelanggaran Hasil Monitor Teridentifikasi

Hasil monitoring SFR di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan adanya temuan pelanggaran. Seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Balai Monitor SFR Kelas II Mataram melalui penerbitan surat teguran/peringatan, berita acara penghentian penggunaan frekuensi, serta pemberlakuan sanksi denda administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

**Tabel 3.4**

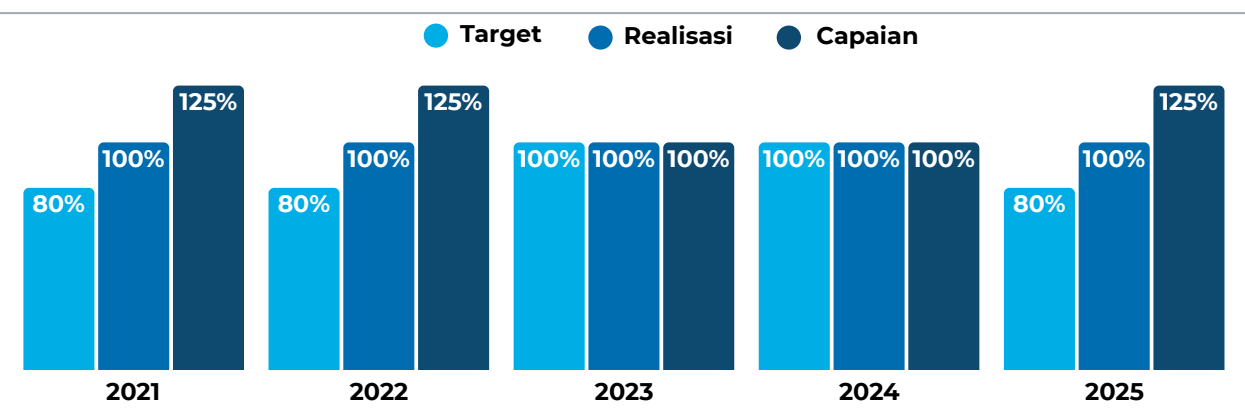
*Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Hasil Monitoring Tahun 2025*

| No | Lokasi        | Jumlah Temuan | Jumlah Pelanggaran |                | Keterangan                     |
|----|---------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------------------|
|    |               |               | Ditindaklanjuti    | Belum Ditindak |                                |
|    | Total         | 17            | 17                 |                |                                |
| 1  | Kota Mataram  | -             | -                  | -              |                                |
| 2  | Lombok Barat  | 3             | 3                  | -              | Teguran, penghentian dan denda |
| 3  | Lombok Tengah | 6             | 6                  | -              | Teguran, penghentian dan denda |
| 4  | Lombok Timur  | -             | -                  | -              |                                |
| 5  | Lombok Utara  | 5             | 5                  | -              | Teguran, penghentian dan denda |
| 6  | Kab. Sumbawa  | -             | -                  | -              |                                |
| 7  | Sumbawa Barat | 2             | 2                  | -              | Teguran, penghentian dan denda |
| 8  | Dompu         | 1             | 1                  | -              | Teguran, penghentian dan denda |
| 9  | Kab. Bima     | -             | -                  | -              |                                |
| 10 | Kota Bima     | -             | -                  | -              |                                |

## Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

**Grafik 3.2**

*Perbandingan Capaian IK-1.1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2021-2025*



Capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram pada periode 2021–2025 yang secara konsisten mencapai bahkan melampaui target monitoring penggunaan SFR menunjukkan kesinambungan peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. Tindak lanjut atas capaian tahun-tahun sebelumnya dilakukan melalui penguatan pola monitoring, optimalisasi perangkat SMFR, dan peningkatan kapasitas SDM sehingga kinerja dapat terus stabil pada tingkat maksimal. Keberhasilan ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat berupa meningkatnya stabilitas dan keandalan layanan komunikasi, berkurangnya interferensi yang mengganggu layanan publik, serta terciptanya penggunaan spektrum yang lebih tertib dan aman. Kondisi tersebut turut mendorong kelancaran aktivitas ekonomi, pariwisata, UMKM, serta layanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan berbasis digital, sehingga mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

### Faktor Penunjang Keberhasilan

Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota Tahun 2025 telah mencapai angka maksimal yaitu tercapai 125% dari yang ditargetkan, sehingga dapat dikategorikan sangat berhasil. Keberhasilan kinerja didorong oleh kompetensi SDM, sehingga monitoring dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini tidak terlepas dari dukungan sarana Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) yang memadai. Sarana SMFR yang memadai memegang peranan penting dalam memberikan hasil yang efektif. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian, diperlukan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis berkelanjutan.

### Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi pencapaian target indikator monitoring berhasil dicapai melalui pemanfaatan SDM yang kompeten, dukungan sarana SMFR yang memadai, serta pelaksanaan monitoring yang terencana. Proses pengenaan denda yang tertib dan penyampaian laporan kegiatan melalui aplikasi turut mempercepat alur kerja, mengurangi beban manual, serta meningkatkan ketepatan data, sehingga seluruh kegiatan monitoring dapat dilaksanakan secara lebih cepat, tepat, dan efisien.

### Rekomendasi Peningkatan Kinerja Tahun Berikutnya

Hasil monitoring SFR di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan adanya pelanggaran yang telah ditindaklanjuti melalui surat teguran, berita acara penghentian, dan sanksi denda administratif sesuai ketentuan. Untuk meningkatkan kinerja tahun berikutnya, diperlukan penguatan intensitas dan cakupan monitoring, optimalisasi teknologi pemantauan, peningkatan koordinasi penindakan, serta perluasan sosialisasi regulasi agar pengawasan dan penegakan sanksi lebih efektif.

### Implementasi Budaya BerAKHLAK

Penerapan nilai dasar BerAKHLAK mendukung pencapaian indikator melalui sikap **Berorientasi Pelayanan** yang diwujudkan melalui pelaksanaan monitoring SFR yang bertujuan menjamin keandalan layanan komunikasi bagi masyarakat, dunia usaha, serta sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, **Akuntabel** dalam pelaksanaan monitoring dan pelaporan berbasis aplikasi, **Kompeten** dalam pengoperasian sarana SMFR serta penegakan sanksi, serta **Kolaboratif** melalui koordinasi antar petugas dan instansi terkait. Konsistensi penerapan nilai-nilai tersebut mempercepat proses kerja dan meningkatkan efektivitas pengawasan spektrum frekuensi.

## IK-1.2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

### Latar Belakang

Indikator Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio ditetapkan untuk memastikan seluruh perangkat pemancar, termasuk *microwave link*, stasiun radio FM, dan stasiun televisi digital, beroperasi sesuai dengan ketentuan teknis dan regulasi yang berlaku. Melalui kegiatan pemeriksaan dan pengukuran parameter teknis, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram dapat memastikan kepatuhan pengguna spektrum terhadap izin dan standar operasional yang ditetapkan. Pengawasan ini menjadi penting mengingat spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas yang harus dikelola secara tertib, efisien, dan berkelanjutan guna mencegah terjadinya gangguan, penyalahgunaan, serta penurunan kualitas layanan komunikasi dan penyiaran yang berdampak langsung pada masyarakat.

Indikator ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi dan penyiaran yang membutuhkan konektivitas yang stabil dan berkualitas. Selain itu, indikator ini mendukung operator atau penyelenggara telekomunikasi serta lembaga penyiaran dalam menjaga keandalan dan kualitas layanan sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Bagi instansi pemerintah, hasil pemeriksaan stasiun radio menjadi sumber data teknis yang akurat sebagai dasar perumusan dan evaluasi kebijakan pengelolaan spektrum frekuensi radio. Sementara itu, bagi Balai Monitor SFR Kelas II Mataram, pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio memastikan pengawasan spektrum di wilayah kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan secara tertib, aman, dan efektif, serta mendukung percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan publik di daerah.

### Capaian Kinerja

Kondisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas wilayah kepulauan dan pegunungan menuntut tersedianya layanan komunikasi dan penyiaran yang andal untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor ekonomi, pendidikan, serta pelayanan publik. Maka dari itu, pemeriksaan stasiun radio menjadi kegiatan strategis guna memastikan seluruh pemancar berfungsi sesuai parameter teknis. Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target 100% sesuai Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 3 Maret 2025.

Dalam memenuhi target tersebut, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram melaksanakan pemeriksaan remote site, open shelter, serta pengukuran parameter teknis pemancar televisi digital dan radio FM. Seluruh kegiatan terealisasi 100%, mencerminkan optimalnya pengawasan kualitas layanan spektrum dan dukungan terhadap konektivitas di Nusa Tenggara Barat. Indikator ini merealisasikan anggaran sebesar **Rp254.386.600 (99,51%)** dari pagu anggaran non-blokir **Rp255.628.817**, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien dengan pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran.

**Grafik 3.3**

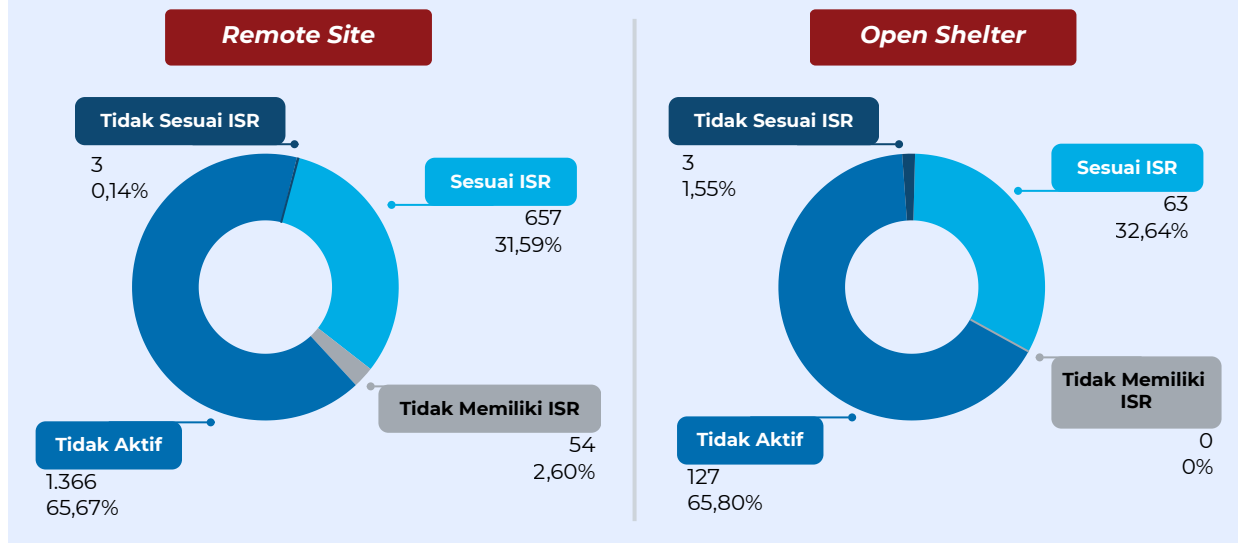
*Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio Tahun 2025*

|           |      |
|-----------|------|
| Target    | 100% |
| Realisasi | 100% |
| Capaian   | 100% |

### Pemeriksaan Stasiun Radio *Microwave Link*

Pada Tahun 2025, pemeriksaan Stasiun Radio *Microwave Link* dilaksanakan terhadap 2.273 ISR yang terdiri atas 2.080 ISR melalui metode *remote site* dan 193 ISR melalui metode *open shelter*. Pemeriksaan mencakup 4 operator seluler (Telkom, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XLSMART Telecom Sejahtera) di 10 kabupaten/kota wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seluruh target pemeriksaan telah terealisasi dengan tingkat capaian 100%. Hasil pemeriksaan menemukan 60 pelanggaran, terdiri dari 57 pada *remote site* dan 3 pada *open shelter*. Seluruh pelanggaran telah ditindaklanjuti 100% sesuai ketentuan.

**Grafik 3.4**  
Hasil Pemeriksaan *Microwave Link*



**Gambar 3.3**  
Kegiatan Pemeriksaan *Microwave Link* di Gili Indah

**Tabel 3.5**  
*Hasil Tindak Lanjut Pelanggaran Remote Site dan Open Shelter*

| No                      | Kab./Kota     | Operator Seluler                  | Total Pelanggaran | Tindak Lanjut |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>I. Remote Site</b>   |               |                                   |                   |               |
| 1                       | Sumbawa       | PT. Telekomunikasi Indonesia      | 24                | 24            |
| 2                       | Sumbawa Barat | PT. Telekomunikasi Indonesia      | 8                 | 8             |
| 3                       | Dompu         | PT. Telekomunikasi Indonesia      | 14                | 14            |
| 4                       | Kab. Bima     | PT. Telekomunikasi Indonesia      | 7                 | 7             |
| 5                       | Dompu         | PT. Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | 2                 | 2             |
| 6                       | Kota Mataram  | PT. Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | 2                 | 2             |
| Jumlah                  |               |                                   | 57                | 57            |
| <b>II. Open Shelter</b> |               |                                   |                   |               |
| 1                       | Sumbawa       | PT. Telekomunikasi Indonesia      | 1                 | 1             |
| 2                       | Kota Mataram  | PT. Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | 2                 | 2             |
| Jumlah                  |               |                                   | 3                 | 3             |

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Stasiun Radio *Microwave Link* dilakukan sesuai jenis temuan di lapangan, meliputi stasiun radio tanpa ISR, ISR tidak sesuai, dan stasiun radio tidak aktif. Stasiun radio yang tidak memiliki ISR atau tidak memenuhi parameter teknis ditertibkan dan dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran serta penghentian pancaran, sementara pengenaan denda administratif ditetapkan oleh Direktorat Pengendalian.



*Gambar 3.4*  
*Kegiatan Pemeriksaan Microwave Link di Kab. Dompu*

### Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Radio FM

Pada Tahun 2025, pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Radio FM dilaksanakan terhadap 44 stasiun Radio FM di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seluruh target pengukuran telah terealisasi dengan capaian 100%. Hasil pengukuran menemukan 6 pelanggaran teknis *off air* pada stasiun radio FM. Seluruh pelanggaran telah ditindaklanjuti 100% sesuai ketentuan yang berlaku.

**Tabel 3.7**

*Tindak Lanjut Hasil Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Radio FM Tahun 2025*

| No     | Kab./Kota         | Stasiun RAdio FM                    | Total Pelang-garan | Tindak Lanjut | Belum Tindak Lanjut | Ket. Tindak Lanjut          |
|--------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| 1      | Kab. Bima         | RRI Bima                            | 1                  | 1             | 0                   | Berita Acara <i>Off Air</i> |
|        |                   | PT. Radio Planet Dharma Media Citra | 1                  | 1             | 0                   |                             |
| 2      | Kab. Lombok Utara | RRI Tanjung KLU                     | 1                  | 1             | 0                   |                             |
| 3      | Kab. Dompu        | RRI Dompu                           | 1                  | 1             | 0                   |                             |
| 4      | Kab. Sumbawa      | PT. Radio Chaya Timur               | 1                  | 1             | 0                   |                             |
| 5      | Kota Mataram      | PT. Radio Vini Vidi Vici Lombok     | 1                  | 1             | 0                   |                             |
| Jumlah |                   |                                     | 6                  | 6             | 0                   |                             |



*Gambar 3.5  
Kegiatan Pengukuran LPPL Radio Suara Giri Menang Lombok Barat*

**Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Televisi Digital**

Pada Tahun 2025, pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Televisi Digital dilaksanakan terhadap 14 stasiun Televisi Digital di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seluruh target pengukuran telah terealisasi dengan tingkat capaian 100 persen.

**Tabel 3.8**

*Tindak Lanjut Hasil Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Televisi Digital Tahun 2025*

| No     | Kab./Kota          | Stasiun RAdio FM      | Total Pelang-garan | Tindak Lanjut | Belum Tindak Lanjut | Ket. Tindak Lanjut                                                    |
|--------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1      | Kab. Bima          | TVRI BTS 4G Mawu      | 1                  | 1             | 0                   | Klarifikasi ke Balmon (penyesuaian parameter teknis sesuai ketentuan) |
|        |                    | TVRI BTS 4G Pusu      | 1                  | 1             | 0                   |                                                                       |
| 2      | Kab. Sumbawa       | TVRI BTS 4G Telaga    | 1                  | 1             | 0                   | Klarifikasi ke Balmon (pengajuan modifikasi ISR)                      |
|        |                    | TVRI BTS 4G Sebotok   | 1                  | 1             | 0                   |                                                                       |
| 3      | Kab. Lombok Timur  | TVRI BTS 4G Obel-Obel | 1                  | 1             | 0                   |                                                                       |
| 4      | Kab. Lombok Tengah | TVRI Pujut            | 1                  | 1             | 0                   |                                                                       |
| Jumlah |                    |                       | 6                  | 6             | 0                   |                                                                       |

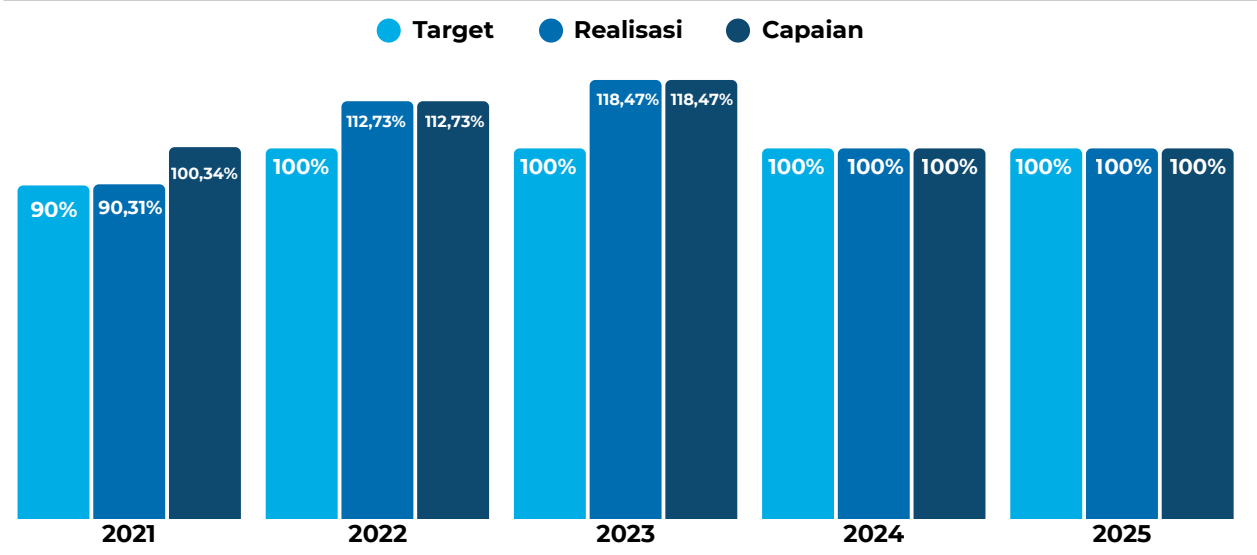


*Gambar 3.6  
Kegiatan Pengukuran TV Digital PT Surya Citra Televisi Lombok Tengah*

## Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

**Grafik 3.5**

Perbandingan Capaian IK-1.2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio Tahun 2021-2025



Seluruh temuan hasil pemeriksaan dan pengukuran parameter teknis pada stasiun radio *microwave link*, radio FM, dan televisi digital telah ditindaklanjuti 100 persen melalui penerbitan surat administrasi, pengenaan sanksi, klarifikasi teknis, penyesuaian parameter pemancar, pengajuan modifikasi ISR, serta penghentian pemancaran (*off air*) sesuai ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan selama periode 2021–2025.

Dampak dari pelaksanaan tindak lanjut ini terlihat pada meningkatnya kepatuhan operator dan penyelenggara siaran terhadap perizinan dan standar teknis, berkurangnya potensi gangguan atau interferensi frekuensi radio, serta terjaganya kualitas layanan telekomunikasi dan penyiaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio Tahun 2025 yang mencapai 100% didukung oleh kompetensi sumber daya manusia Balai Monitor SFR Kelas II Mataram dalam melaksanakan pemeriksaan teknis stasiun radio. Ketersediaan dan optimalisasi sarana monitoring yang memadai memungkinkan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara akurat dan tepat waktu di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penerapan prosedur pemeriksaan yang terstandar, perencanaan kegiatan yang matang, serta koordinasi yang efektif dengan operator dan dukungan manajerial turut memastikan konsistensi dan kualitas pelaksanaan pengawasan.

### Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi pemanfaatan sumber daya tercapai melalui optimalisasi penggunaan sarana monitoring serta penugasan SDM secara terukur sesuai kebutuhan operasional. Pemanfaatan perangkat kerja yang tepat guna, dukungan perencanaan kegiatan yang matang, dan pengaturan beban tugas yang proporsional mampu meminimalkan pemborosan waktu, biaya, dan tenaga, sehingga seluruh target kinerja dapat dicapai secara efektif dan efisien.

## Rekomendasi Peningkatan Kinerja Tahun Berikutnya

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, disarankan dilakukan penguatan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis yang lebih terarah, peningkatan kualitas dan pemeliharaan sarana monitoring, serta penyempurnaan perencanaan dan pengawasan kegiatan. Selain itu, penguatan koordinasi dengan pemegang ISR dan pemangku kepentingan terkait perlu ditingkatkan guna mempercepat penanganan temuan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

## Implementasi Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan kinerja pemeriksaan stasiun radio mencerminkan implementasi nyata Budaya BerAKHLAK melalui sikap **Akuntabel** yang terlihat dari ketepatan pelaporan, tindak lanjut temuan, serta pencapaian target 100%. **Kompeten** diwujudkan melalui pemanfaatan kemampuan teknis SDM dan penggunaan perangkat monitoring secara optimal. **Harmonis** dan **Kolaboratif** tercermin dari koordinasi yang baik dengan operator telekomunikasi dalam penyelesaian temuan. Selain itu, nilai **Loyal** dan **Adaptif** tampak melalui komitmen menjalankan tugas pengawasan di berbagai kondisi geografis Nusa Tenggara Barat serta kemampuan menyesuaikan metode kerja sesuai kebutuhan lapangan.

## IK-1.3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

### Latar Belakang

Gangguan spektrum frekuensi radio dapat menghambat berbagai layanan penting seperti telekomunikasi seluler, penyiaran, navigasi penerbangan dan maritim, komunikasi kebencanaan, hingga layanan publik lainnya yang bergantung pada konektivitas nirkabel. Karena itu, indikator Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio diperlukan untuk mengukur kecepatan, ketepatan, dan efektivitas Balai Monitor SFR Kelas II Mataram dalam merespons setiap laporan gangguan yang muncul di wilayah Nusa Tenggara Barat. Indikator ini memastikan bahwa proses deteksi, investigasi, dan penindakan gangguan dapat dilakukan secara terstruktur sehingga dampaknya terhadap layanan masyarakat dapat diminimalkan.

Penerima manfaat dari indikator ini sangat luas, mulai dari operator telekomunikasi, lembaga penyiaran, instansi pemerintah, layanan keselamatan dan pertolongan, pelaku usaha, hingga masyarakat umum yang membutuhkan konektivitas stabil dalam aktivitas sehari-hari. Melalui penanganan gangguan yang cepat dan tepat, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram berkontribusi langsung menjaga keandalan layanan telekomunikasi dan penyiaran, serta memastikan spektrum frekuensi radio dimanfaatkan secara tertib, aman, dan sesuai peraturan.

### Capaian Kinerja

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dilaksanakan berdasarkan aduan pemegang izin dan ditangani sesuai SOP, dengan target 95% penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025. Target tersebut relevan dengan meningkatnya kebutuhan layanan komunikasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pada sektor pariwisata dan layanan publik yang memerlukan stabilitas spektrum. Sepanjang Tahun 2025, seluruh 4 aduan yang diterima berhasil diselesaikan (100%) melalui analisis gangguan, identifikasi sumber masalah, dan tindakan korektif secara sistematis, mencerminkan responsivitas organisasi dalam menjaga kualitas layanan frekuensi. Indikator ini merealisasikan anggaran sebesar **Rp40.304.000 (99,02%)** dari pagu anggaran non-blokir **Rp40.703.500**, menunjukkan serapan anggaran yang optimal dan pelaksanaan kegiatan yang efektif.

**Tabel 3.9**  
Rekapitulasi Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2025

| Bulan    | Aduan Diterima | Aduan Tertangani | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maret    | 1              | 1                | Aduan dari BMKG atas gangguan radar cuaca frekuensi 5640MHz, tertangani dengan <i>clear</i>                                                                                                                                                                                                  |
| Juli     | 2              | 2                | 1.Aduan dari Koperasi Janur Indah atas gangguan frekuensi 150,8 MHz, Sinyal pengganggu terdeteksi berasal dari arah Pulau Bali. Kasus telah ditransfer ke Balmon Denpasar.<br>2.Aduan dari CV. Karya Imajinasi Nusantara atas gangguan frekuensi 434,6 MHz, tertangani dengan <i>clear</i> . |
| November | 1              | 1                | Aduan dari BMKG atas gangguan radar cuaca pada frekuensi 5710 MHz, tertangani dengan <i>clear</i> .                                                                                                                                                                                          |

**Grafik 3.6**  
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2025

|           |         |
|-----------|---------|
| Target    | 95%     |
| Realisasi | 100%    |
| Capaian   | 105,26% |

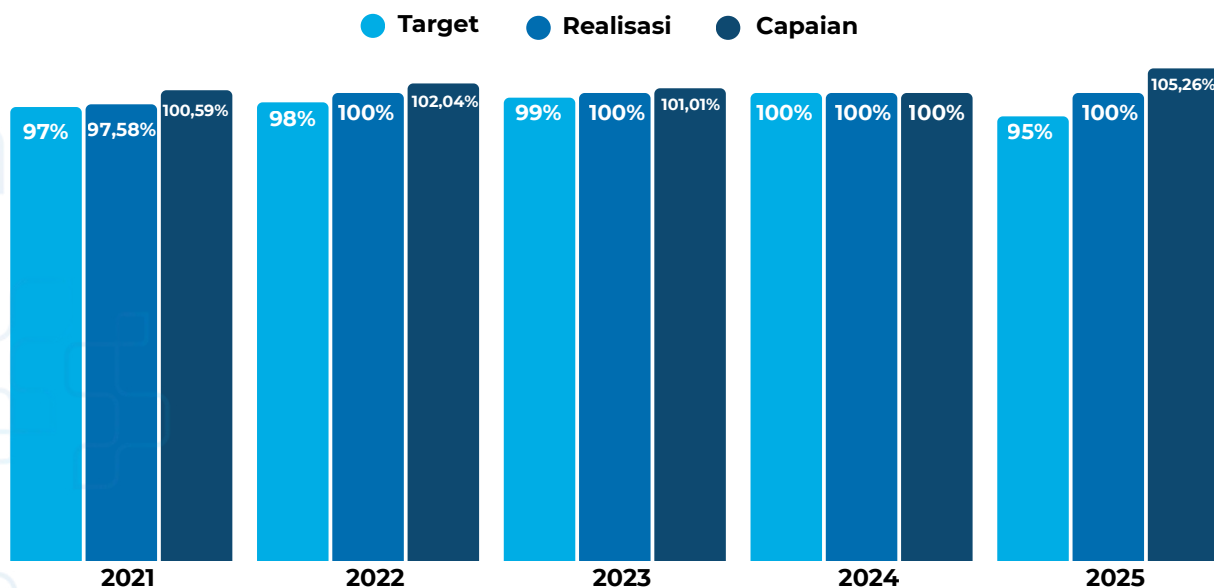


Gambar 3.7  
Kegiatan Penanganan Gangguan SFR di BMKG NTB

## Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

**Grafik 3.7**

Perbandingan Capaian IK-1.3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2021-2025



Capaian penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada periode Tahun 2021 sampai dengan 2025 secara konsisten mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, dengan tingkat penyelesaian aduan gangguan sebesar 100%. Kinerja yang stabil dan berkelanjutan tersebut menjadi landasan bagi Balai Monitor SFR Kelas II Mataram dalam menetapkan tindak lanjut pada Tahun 2025 melalui penguatan dan penyempurnaan SOP penanganan gangguan, peningkatan koordinasi dengan pemegang izin dan pemangku kepentingan terkait, serta optimalisasi pemanfaatan perangkat monitoring frekuensi radio. Melalui langkah-langkah tersebut, capaian kinerja penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada tahun 2025 mampu mencapai 105,26% dari target yang ditetapkan.

Capaian kinerja yang berkelanjutan ini memberikan dampak positif terhadap keandalan dan kontinuitas layanan komunikasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyelesaian seluruh aduan gangguan secara tepat waktu berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan telekomunikasi bagi pemegang izin, mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi dan industri. Terjaganya spektrum frekuensi radio dari gangguan turut memperkuat stabilitas komunikasi pada sektor-sektor strategis, seperti pariwisata, transportasi, dan layanan kedaruratan. Secara keseluruhan, kinerja ini mendorong terciptanya pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang lebih aman dan andal, sehingga mendukung keberlanjutan ekosistem telekomunikasi di Nusa Tenggara Barat.

### Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja penanganan gangguan spektrum frekuensi radio didukung oleh konsistensi penerapan SOP, kompetensi SDM dalam analisis dan penanganan gangguan, serta ketersediaan sarana monitoring yang memadai. Respons yang cepat, koordinasi efektif dengan pemegang izin dan instansi terkait, serta dukungan manajemen dalam pengawasan dan pemenuhan kebutuhan operasional turut memperkuat ketepatan dan kecepatan penyelesaian setiap aduan. Ke depan, peningkatan kinerja dapat terus didorong melalui penyempurnaan sistem pencatatan aduan, optimalisasi pemanfaatan teknologi monitoring, serta pelatihan lanjutan bagi SDM guna mempercepat proses validasi dan penanganan gangguan secara lebih efektif.

## Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi pemanfaatan sumber daya tercapai melalui optimalisasi penggunaan perangkat monitoring yang tersedia, pemanfaatan sumber daya manusia sesuai kompetensi dan pembagian tugas yang proporsional, serta pengaturan waktu respons yang efektif terhadap setiap aduan gangguan spektrum frekuensi radio. Penerapan SOP yang terstandar dan konsisten memastikan proses penanganan gangguan berjalan tepat sasaran, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Dengan pendekatan tersebut, pemborosan tenaga, waktu, dan peralatan dapat diminimalkan, sehingga seluruh aduan gangguan dapat diselesaikan secara lebih cepat, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

## Rekomendasi Peningkatan Kinerja Tahun Berikutnya

Peningkatan kinerja pada tahun berikutnya dapat dilakukan melalui penguatan sistem pelaporan dan pengelolaan aduan gangguan, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, serta pemutakhiran dan pemeliharaan perangkat monitoring agar tetap andal. Selain itu, koordinasi dengan pemegang izin dan instansi terkait perlu terus ditingkatkan untuk mempercepat proses penanganan di lapangan, disertai evaluasi rutin terhadap SOP dan mekanisme kerja guna memastikan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio semakin cepat, tepat, dan efisien.

## Implementasi Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan indikator penanganan gangguan spektrum frekuensi radio mencerminkan penerapan Budaya BerAKHLAK yaitu, nilai **Berorientasi Pelayanan** diwujudkan melalui respons cepat dan penyelesaian seluruh aduan gangguan spektrum frekuensi radio guna menjamin kelancaran layanan komunikasi bagi masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi. Nilai **Akuntabel** tercermin dari pelaksanaan penanganan gangguan yang berpedoman pada standar operasional prosedur, pencatatan dan pelaporan yang tertib, serta capaian kinerja yang terukur dengan realisasi 100% dari target 95%. Sementara itu, nilai **Kompeten** diwujudkan melalui kemampuan teknis sumber daya manusia dalam mengidentifikasi sumber gangguan, mengoperasikan perangkat monitoring, serta melakukan analisis dan penanganan gangguan secara tepat dan efektif, sehingga capaian kinerja dapat melampaui target yang ditetapkan.



Gambar 3.8  
Kegiatan Penanganan Gangguan SFR di Kota Mataram

## IK-1.4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Digital

### Latar Belakang

Indikator kinerja monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi dilaksanakan untuk memastikan alat/perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan atau dipergunakan telah memenuhi ketentuan teknis dan sertifikasi yang berlaku. Pada kondisi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas wilayah perkotaan, perdesaan, dan kepulauan dengan tingkat pemanfaatan layanan telekomunikasi yang terus meningkat, serta tingginya peredaran perangkat impor dan rakitan, risiko penggunaan perangkat tidak sesuai ketentuan semakin besar. Oleh karena itu, monitoring perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan guna mencegah gangguan spektrum frekuensi radio dan menjaga kualitas layanan.

Penerima manfaat dari indikator ini meliputi masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi yang memperoleh jaminan kualitas dan keamanan perangkat serta layanan komunikasi yang digunakan. Selain itu, penyelenggara telekomunikasi mendapatkan perlindungan dari potensi gangguan spektrum frekuensi radio dan penggunaan perangkat yang tidak sesuai ketentuan, sehingga operasional layanan dapat berjalan lebih stabil dan berkelanjutan. Pemerintah juga memperoleh manfaat melalui terjaganya ketertiban pengelolaan dan pengawasan perangkat telekomunikasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pada akhirnya mendukung efektivitas penyelenggaraan layanan publik.

### Capaian Kinerja

Monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi dilaksanakan sesuai ketentuan dengan memperhatikan meningkatnya penggunaan perangkat telekomunikasi serta maraknya peredaran produk impor, khususnya perangkat nirkabel dan *low power* yang mudah diperoleh melalui perdagangan daring maupun jalur distribusi informal. Kondisi tersebut menuntut pelaksanaan monitoring yang lebih aktif untuk memastikan seluruh perangkat yang digunakan telah memenuhi ketentuan teknis dan sertifikasi yang berlaku. Kegiatan monitoring difokuskan pada 17 jenis perangkat prioritas dan dilaksanakan di 10 kabupaten/kota wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram, sehingga memenuhi target cakupan minimal 80% kabupaten/kota.



Gambar 3.9  
Perangkat Termonitor pada Kegiatan Monitoring di Lombok Tengah

**Tabel 3.10**  
Jenis Perangkat Prioritas Pelaksanaan Monitoring APT

| No. | Jenis Perangkat                                                | No. | Jenis Perangkat                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | HF All Band Transceiver                                        | 9   | Radio POC                                                                 |
| 2   | Mobile Transceiver/Radio Rig                                   | 10  | Set Top Box                                                               |
| 3   | Pemancar FM                                                    | 11  | Simbox/Modempool                                                          |
| 4   | Fake BTS/IMSI Catcher                                          | 12  | Repeater/Penguat Sinyal Seluler                                           |
| 5   | Jammer                                                         | 13  | GPS Tracker                                                               |
| 6   | Microwave link (IDU/ODU)                                       | 14  | Handy Talkie (HT)                                                         |
| 7   | Perangkat Low Power (Wireless Keyboard, TWS)                   | 15  | Wireless Sound (TWS), Wireless Microphone, Bluetooth Speaker, Smart Watch |
| 8   | Optical Line Terminal (OLT) dan Optical Network Terminal (ONT) | 16  | Alat Perangkat Telekomunikasi Rakitan                                     |



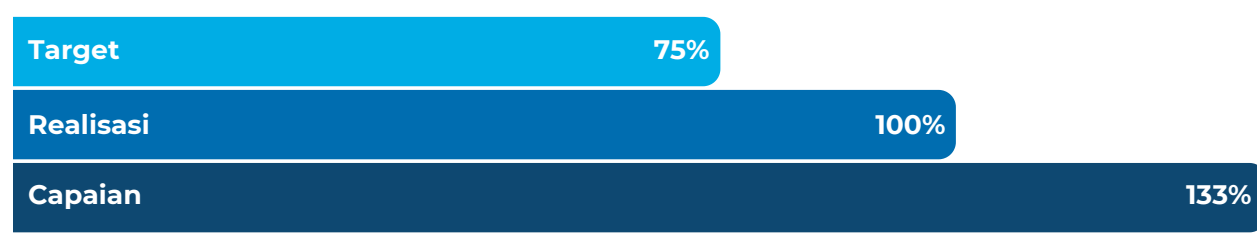
Gambar 3.10  
Kegiatan Penertiban Alat Perangkat Telekomunikasi di Kota Mataram

**Tabel 3.11**  
Capaian Monitoring Perangkat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2025

| Kab./Kota                 | $\Sigma$ APT<br>Termonitor | Hasil Monitoring |             | Tindak Lanjut<br>Monitoring | Capaian |
|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|                           |                            | Bersertifikat    | Pelanggaran |                             |         |
| Kota Mataram              | 81                         | 81               | 0           | 0                           | 100     |
| Lombok Barat              | 35                         | 35               | 0           | 0                           | 100     |
| Lombok Utara              | 3                          | 2                | 1           | 1                           | 100     |
| Lombok Tengah             | 38                         | 36               | 2           | 2                           | 100     |
| Lombok Timur              | 27                         | 21               | 6           | 6                           | 100     |
| Sumbawa Barat             | 26                         | 13               | 13          | 13                          | 100     |
| Sumbawa                   | 2                          | 1                | 1           | 1                           | 100     |
| Dompu                     | 23                         | 23               | 0           | 0                           | 100     |
| Bima                      | 56                         | 55               | 1           | 1                           | 100     |
| Kota Bima                 | 43                         | 34               | 9           | 9                           | 100     |
| Jumlah                    | 334                        | 301              | 33          | 33                          | 100     |
| Target Perjanjian Kinerja |                            |                  |             |                             | 75%     |
| Capaian Kinerja           |                            |                  |             |                             | 133%    |

Hasil monitoring menunjukkan sebanyak 334 perangkat berhasil dimonitor, melampaui target 300 perangkat. Dari jumlah tersebut, 301 perangkat dinyatakan bersertifikat, sedangkan 33 perangkat melanggar ketentuan dan telah ditindaklanjuti melalui surat teguran serta berita acara penghentian penggunaan. Dengan capaian sebesar 133% dari target Perjanjian Kinerja 75%, kegiatan ini mencerminkan efektivitas pengawasan perangkat telekomunikasi dalam mengendalikan peredaran produk impor, menjaga tertib penggunaan SFR, serta mendukung kualitas layanan telekomunikasi. Pelaksanaannya terintegrasi dengan Indikator 1.1 Monitoring Penggunaan SFR, sehingga realisasi anggarannya menjadi satu kesatuan dalam mendukung pencapaian kedua indikator tersebut secara efisien dan terkoordinasi.

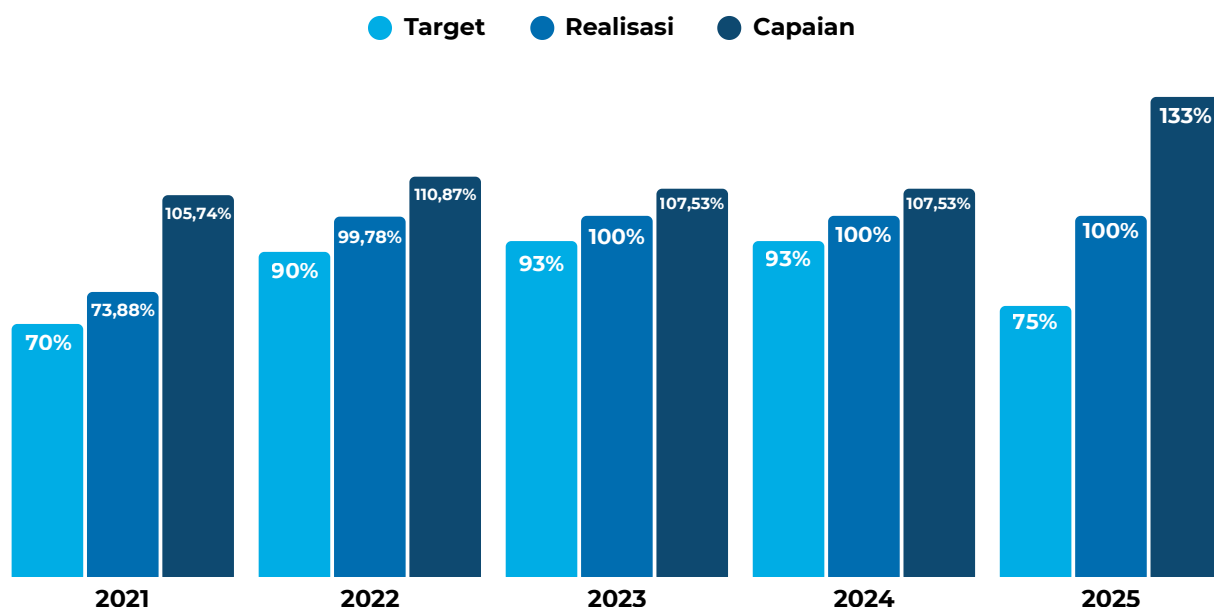
**Grafik 3.8**  
Capaian IK-1.4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital



## Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

**Grafik 3.9**

*Perbandingan Capaian IK-4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital Tahun 2021-2025*



Pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi adalah indikator Penertiban SFR dan APT. Kedua indikator tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan di masyarakat memenuhi standar teknis, legalitas, dan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari fungsi pengawasan perangkat telekomunikasi. Menindaklanjuti kebutuhan pengawasan yang semakin spesifik terhadap perangkat telekomunikasi, pada Tahun 2025 indikator ini ditetapkan dan lebih ditekankan pada tingkat kepatuhan standar. Penetapan indikator tersebut diikuti dengan penyusunan mekanisme monitoring yang lebih terfokus, penetapan perangkat prioritas, serta penguatan tindak lanjut atas temuan pelanggaran, sehingga pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan akuntabel.

Dampak dari penetapan indikator ini terlihat pada tercapainya realisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 133% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya efektivitas pelaksanaan monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dilakukan secara terukur dan konsisten sesuai pedoman teknis. Hal ini mendorong peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan sertifikasi, meminimalkan potensi penggunaan perangkat yang tidak memenuhi standar, serta memperkuat peran Balai Monitor SFR Kelas II Mataram dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keandalan penggunaan perangkat telekomunikasi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

### Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan peningkatan kinerja monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi didukung oleh penetapan indikator sebagai indikator mandiri sehingga proses monitoring menjadi lebih terfokus dan terukur. Capaian tersebut ditunjang oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan pedoman teknis sebagai acuan pelaksanaan, serta perencanaan monitoring yang terstruktur dan berbasis penetapan perangkat prioritas yang tepat. Selain itu, koordinasi internal yang efektif dan konsistensi dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran berkontribusi signifikan dalam memastikan pelaksanaan monitoring berjalan optimal dan capaian kinerja mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

## Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan indikator kinerja monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui perencanaan kegiatan berbasis prioritas, penjadwalan monitoring yang efektif, serta pemanfaatan data dan sarana pendukung secara terintegrasi. Pendekatan tersebut memungkinkan capaian kinerja yang optimal dengan penggunaan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran secara efisien tanpa mengurangi kualitas hasil pengawasan.

## Rekomendasi Peningkatan Kinerja Tahun Berikutnya

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemutakhiran perangkat prioritas sesuai perkembangan teknologi, serta peningkatan koordinasi dan pemanfaatan data hasil monitoring guna mendukung pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## Implementasi Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan indikator kinerja tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi digital mencerminkan penerapan nilai **Akuntabel** melalui pelaksanaan pengawasan yang berpedoman pada regulasi, standar teknis, serta pencatatan dan pelaporan hasil pengujian secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai **Berorientasi Pelayanan** diwujudkan dengan memastikan bahwa alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang beredar dan digunakan masyarakat telah memenuhi standar teknis, sehingga menjamin keamanan, kualitas, dan keandalan layanan telekomunikasi. Nilai **Kompeten** dan **Adaptif** tercermin dari kemampuan petugas dalam memahami ketentuan teknis serta menyesuaikan pengawasan dengan perkembangan teknologi perangkat telekomunikasi digital. Sementara itu, nilai **Kolaboratif** terlihat melalui koordinasi dan kerja sama yang efektif antarpetugas, unit kerja, serta pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan monitoring dan penegakan kepatuhan standar teknis.



Gambar 3.11  
Kegiatan Penertiban Alat Perangkat Telekomunikasi di Kab. Bima

## IK-1.5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

### Latar Belakang

Indikator kinerja Persentase Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT digunakan untuk mengukur kesiapan dan keandalan stasiun monitor dalam mendukung pengawasan SFR. Kondisi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis yang beragam, serta meningkatnya pemanfaatan layanan telekomunikasi, penyiaran, dan komunikasi radio untuk mendukung aktivitas pemerintahan, pariwisata, dan kebencanaan, menuntut tersedianya sistem monitoring frekuensi radio yang andal dan berkelanjutan.

Pengukuran indikator ini didasarkan pada pemenuhan standar layanan (*Service Level Agreement/SLA*) yang mencerminkan kemampuan stasiun monitor dalam menyampaikan data monitoring serta kondisi teknis perangkat pendukung operasional. Capaian indikator memberikan manfaat bagi masyarakat, penyelenggara telekomunikasi, dan pemerintah daerah melalui terjaminnya kualitas layanan komunikasi yang tertib dan bebas gangguan, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja UPT dalam menjaga efektivitas pengelolaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, indikator Persentase Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT menunjukkan kinerja yang baik. Dari 8 Stasiun Monitor Tetap/Transportable, sebanyak 7 stasiun beroperasi optimal, sementara 1 stasiun di Kota Mataram mengalami gangguan perangkat, sehingga capaian SLA mencapai 97,91%, sedangkan SLA Stasiun Monitor Bergerak mencapai 100%. Secara keseluruhan, indikator ini terealisasi sebesar 98,96% atau setara dengan capaian 116,42%, melampaui target 85%. Indikator ini merealisasikan anggaran sebesar **Rp5.443.867.500 (99,41%)** dari pagu anggaran non-blokir **Rp5.471.190.000**, menunjukkan serapan yang sangat optimal dan dukungan anggaran yang efektif dalam menjaga keberlangsungan operasional stasiun monitor.



Gambar 3.12  
Kegiatan Monitoring Transportable Site Praya

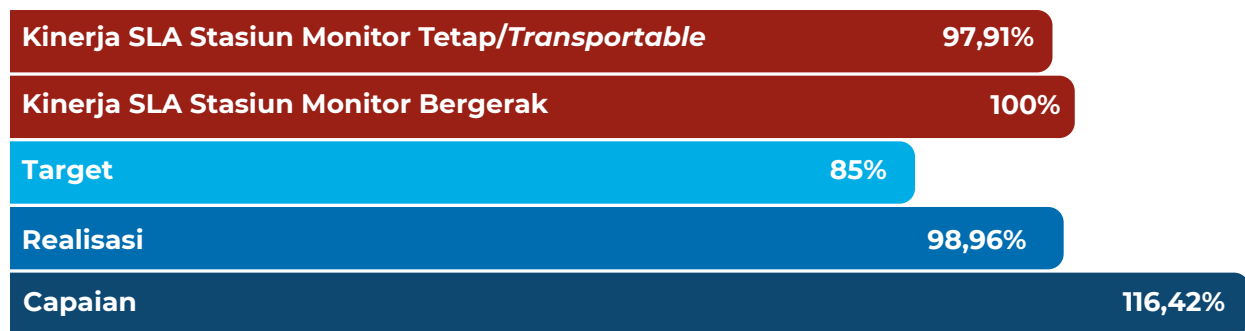
Metode pengukuran indikator dilakukan dengan menghitung rata-rata capaian SLA pada Stasiun Monitor Tetap/*Transportable* dan Stasiun Monitor Bergerak yang beroperasi. Nilai SLA ditetapkan sebesar 100% apabila stasiun monitor berada dalam kondisi baik dan memenuhi ketentuan penyampaian data monitoring, yaitu minimal satu kali per bulan melalui sistem *Remote Online Logging* (ROL), serta khusus untuk stasiun monitor tetap/*transportable* dilengkapi dengan penyampaian data okupansi melalui SMSN minimal satu kali per minggu. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka nilai SLA ditetapkan sebesar 0%. Untuk stasiun monitor yang mengalami gangguan, nilai SLA dihitung secara proporsional berdasarkan persentase perangkat utama dan pendukung yang berfungsi dengan baik terhadap total perangkat yang mempengaruhi operasional stasiun monitor.

**Tabel 3.12***Capaian Kinerja SLA Stasiun Monitor Tetap/Transportable Tahun 2025*

| No                                                      | Site                       | Laporan ROL/ Bulanan | Laporan SMSN/ Bulan | Total Perangkat | Perangkat |           | %     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|-------|
|                                                         |                            |                      |                     |                 | Utama     | Pendukung |       |
| 1                                                       | Praya (Lombok Tengah)      | 1                    | 4                   | 6               | 4         | 2         | 100   |
| 2                                                       | Sumbawa (Kab. Sumbawa)     | 1                    | 4                   | 6               | 4         | 2         | 100   |
| 3                                                       | Sila (Kab. Bima)           | 1                    | 4                   | 6               | 4         | 2         | 100   |
| 4                                                       | Batu Layar (Lombok Barat)  | 1                    | 4                   | 6               | 4         | 2         | 100   |
| 5                                                       | Narmada (Lombok Barat)     | 1                    | 4                   | 6               | 4         | 2         | 100   |
| 6                                                       | Mataram (Kota Mataram)     | 0                    | 0                   | 6               | 3         | 2         | 83,33 |
| 7                                                       | Lembar (Lombok Barat)      | 1                    | 4                   | 6               | 4         | 2         | 100   |
| 8                                                       | Bukit Bakan (Lombok Barat) | 1                    | 4                   | 6               | 4         | 2         | 100   |
| Capaian Kinerja SLA Stasiun Monitor Tetap/Transportable |                            |                      |                     |                 |           |           | 97,91 |

**Tabel 3.13***Capaian Kinerja SLA Stasiun Monitor Bergerak Tahun 2025*

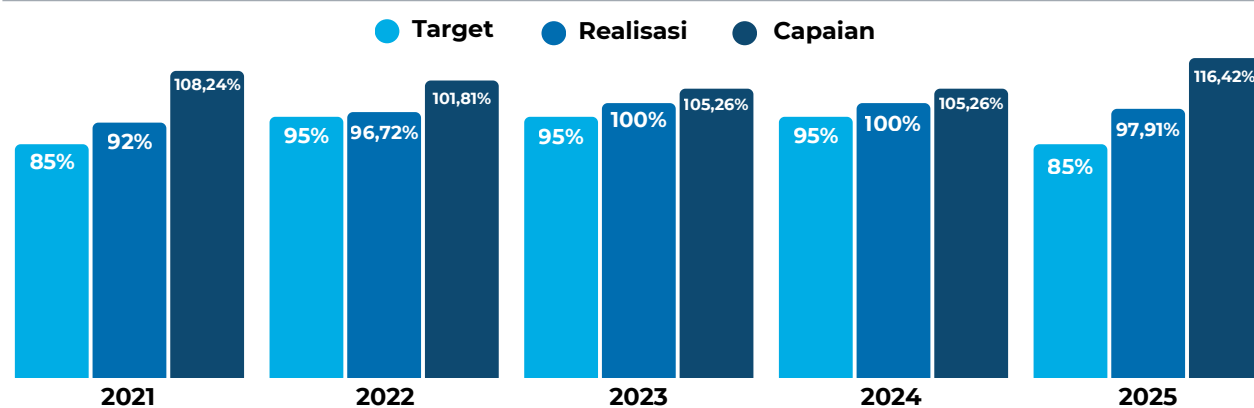
| No                                           | SLA Stasiun Monitor Bergerak | Laporan Occupancy/ Bulanan | Ketentuan dalam PK | Capaian |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------|
| 1                                            | SMFR Mobile DDF 205          | 1                          | 1                  | 100     |
| 2                                            | SMFR Mobile ESMD             | 1                          | 1                  | 100     |
| Capaian Kinerja SLA Stasiun Monitor Bergerak |                              |                            |                    | 100     |

**Grafik 3.10***Perbandingan Target dan Realisasi IK-1.5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT Tahun 2025*

## Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

**Grafik 3.11**

*Perbandingan Capaian IK-1.5 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital Tahun 2021-2025*



Berdasarkan capaian kinerja tahun 2021–2025 yang secara konsisten melampaui target, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram menindaklanjuti dengan menjaga keberlanjutan kinerja melalui penguatan pemeliharaan perangkat monitoring, peningkatan kepatuhan penyampaian data monitoring, serta penetapan prioritas perbaikan dan penggantian perangkat yang mengalami gangguan agar operasional stasiun monitor tetap andal.

Tindak lanjut tersebut berdampak pada terjaganya tren capaian kinerja yang secara konsisten melebihi target setiap tahun, termasuk capaian sebesar 116,42% pada Tahun 2025. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan monitoring SFR berjalan efektif dan berkelanjutan. Dampak yang dihasilkan antara lain meningkatnya keandalan fungsi monitoring SFR, tersedianya data monitoring yang lebih lengkap dan berkesinambungan sebagai bahan evaluasi, serta meningkatnya efektivitas pengawasan dan percepatan penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh kondisi operasional sebagian besar stasiun monitor yang andal, pelaksanaan pemeliharaan perangkat secara rutin, kepatuhan dalam penyampaian data monitoring sesuai standar layanan, serta koordinasi internal yang baik dan pemanfaatan sistem ROL dan SMSN secara efektif. Kendala yang dihadapi berupa gangguan pada satu stasiun monitor tetap/*transportable* di Kota Mataram, di mana kerusakan terjadi pada perangkat utama yang penanganannya menjadi kewenangan kantor pusat sehingga berdampak pada capaian nilai SLA. Sebagai tindak lanjut, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram telah melaporkan kondisi tersebut kepada kantor pusat serta tetap melakukan pemantauan dan pemeliharaan pada perangkat pendukung yang masih berfungsi, disertai penguatan pemeliharaan preventif untuk menjaga keberlanjutan kinerja monitoring SFR.

### Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan stasiun monitor yang tersedia, pelaksanaan pemeliharaan preventif untuk meminimalkan gangguan operasional, serta pemanfaatan sistem monitoring terintegrasi tanpa penambahan sarana prasarana baru. Langkah tersebut memungkinkan pencapaian kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran dan sumber daya manusia yang efektif.

## Rekomendasi Peningkatan Kinerja Tahun Berikutnya

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, direkomendasikan percepatan perbaikan atau penggantian perangkat utama stasiun monitor yang mengalami gangguan melalui koordinasi dengan kantor pusat, penguatan pemeliharaan preventif secara berkala, serta peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian data monitoring guna menjaga keandalan dan keberlanjutan fungsi monitoring SFR.

## Implementasi Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan indikator Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio mencerminkan nilai **Berorientasi Pelayanan** melalui upaya menjaga keandalan stasiun monitor guna menjamin ketersediaan data monitoring. Nilai **Akuntabel** tercermin dari kedisiplinan dalam pemeliharaan perangkat dan penyampaian data sesuai standar. Selain itu, nilai **Kompeten** dan **Adaptif** terlihat dari kemampuan petugas menjaga kinerja perangkat serta menyesuaikan pengelolaan monitoring terhadap dinamika kondisi teknis di lapangan.

### IK-1.6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

#### Latar Belakang

Kondisi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan aktivitas pemanfaatan SFR dan APT yang terus meningkat memerlukan pengawasan serta penegakan sanksi yang efektif dan terukur. Oleh karena itu, indikator kinerja penanganan sanksi denda administratif perlu dibentuk secara tersendiri untuk meningkatkan fokus, kejelasan pengukuran, dan akuntabilitas penegakan kepatuhan, sekaligus mendukung optimalisasi PNBP. Keberadaan indikator ini juga menjadi instrumen pengendalian untuk memastikan setiap pelanggaran ditindaklanjuti secara konsisten dan sesuai ketentuan, sehingga tercipta kepastian hukum serta mendorong peningkatan kepatuhan pemegang izin.

Pelaksanaan indikator ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Capaian kinerja ini memberikan manfaat bagi pemerintah melalui tertib administrasi dan peningkatan PNBP, masyarakat melalui kualitas layanan telekomunikasi yang lebih andal, serta pelaku usaha melalui kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat.

#### Capaian Kinerja

Capaian kinerja penanganan sanksi denda administratif dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan kegiatan penertiban SFR dan APT yang dilakukan secara berkelanjutan. Penanganan sanksi diberikan terhadap pelanggaran Izin Stasiun Radio (ISR), Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR), serta penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai ketentuan, dengan berpedoman pada SOP serta ketentuan Permen Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 dan Perdirjen SDPPI Nomor 3 Tahun 2024 sebagai dasar pelaksanaan.

Pada Tahun 2025, tercatat sebanyak 45 *invoice* sanksi denda administratif dan seluruhnya telah terbayar sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dengan capaian penyelesaian 100%, indikator ini melampaui target Perjanjian Kinerja sebesar 80% dengan persentase capaian kinerja 125%. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas penegakan kepatuhan dalam pemanfaatan SFR serta penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram. Indikator ini merealisasikan anggaran **Rp214.839.460 (99,23%)** dari pagu anggaran non-blokir **Rp216.502.000**, menunjukkan serapan yang optimal dan dukungan anggaran yang efektif terhadap pelaksanaan penegakan sanksi administratif.

Formula persentase pengenaan denda administratif:

$$\frac{\sum \text{Inv.Denda yang terbayar} + (\text{Bobot} \times \text{Tindak Lanjut Inv.Denda Belum terbayar}) + \text{Inv.Baru Belum Jatuh Tempo}}{\sum \text{Inv.Denda Administratif}} \times 100\%$$

Keterangan bobot tindak lanjut *invoice* berdasarkan surat *reminder*:

- Reminder* 1 : 0,9
- Reminder* 2 : 0,8
- Reminder* 3 : 0,7
- Pelimpahan KPKNL : 0,6

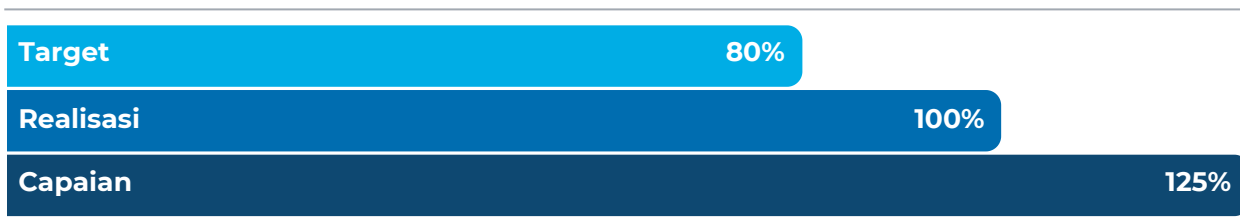
**Tabel 3.13**

*Akumulasi Invoice Denda Administratif Tahun 2025*

|                                                           |   |    |
|-----------------------------------------------------------|---|----|
| Jumlah <i>Invoice</i> Denda Administratif Akumulasi       | : | 45 |
| <i>Invoice</i> Denda Terbayar                             | : | 45 |
| Bobot x Tindak Lanjut <i>Invoice</i> Denda Belum Terbayar | : | 0  |
| <i>Invoice</i> Baru Belum Jatuh Tempo                     | : | 0  |

**Grafik 3.12**

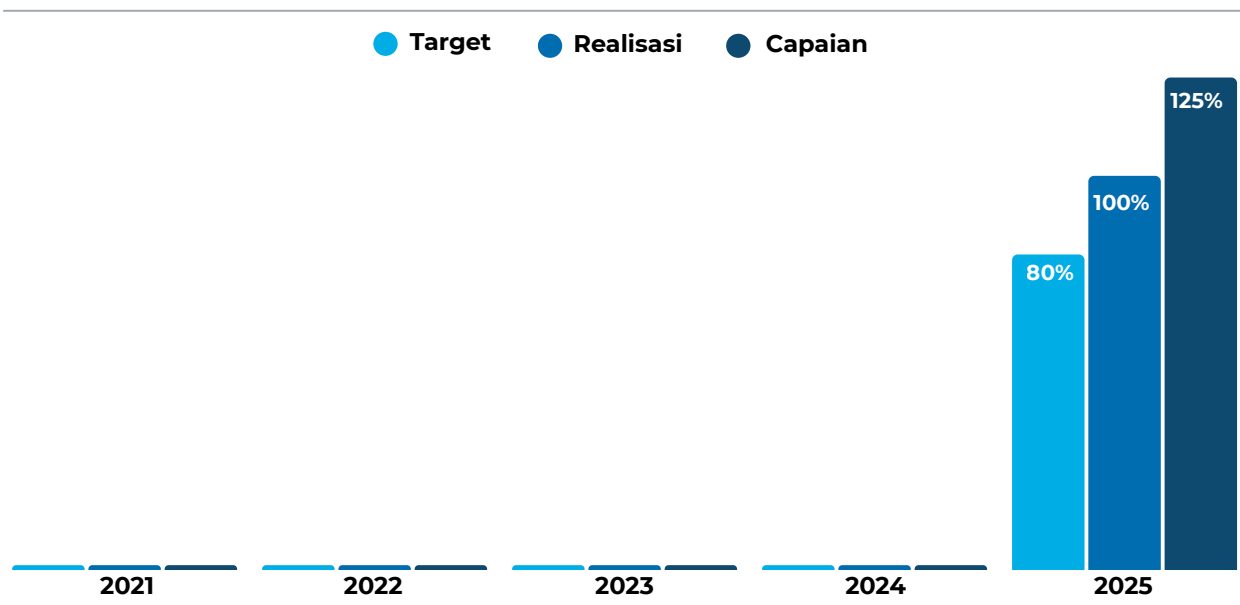
*Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif Tahun 2025*



## Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

**Grafik 3.13**

*Perbandingan Capaian IK-1.6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif Tahun 2021-2025*



Tindak lanjut capaian tahun sebelumnya dilakukan dengan memperkuat pengelolaan penanganan sanksi denda administratif melalui pemisahan indikator kinerja yang sebelumnya tergabung dalam indikator penertiban SFR dan APT. Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan secara mandiri untuk meningkatkan fokus, kejelasan pengukuran, serta akuntabilitas dalam proses penagihan dan tindak lanjut sanksi, termasuk penyempurnaan mekanisme pemantauan *invoice*, pengendalian administrasi, serta peningkatan koordinasi internal guna memastikan kepatuhan terhadap tenggat waktu pembayaran.

Dampak capaian kinerja tercermin dari meningkatnya efektivitas penanganan sanksi denda administratif yang ditunjukkan oleh seluruh *invoice* yang dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Hal ini tidak hanya mendorong peningkatan kepatuhan pengguna SFR dan perangkat telekomunikasi, tetapi juga berkontribusi pada tertibnya administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meningkatnya disiplin regulasi, serta penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumber daya frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara lebih transparan dan akuntabel.

### Faktor Penunjang Keberhasilan

Capaian indikator kinerja penanganan sanksi denda administratif dapat diraih secara optimal berkat pelaksanaan monitoring dan penertiban SFR serta APT yang konsisten, didukung kejelasan regulasi sebagai dasar pengenaan sanksi dan koordinasi internal yang efektif dalam penerbitan serta tindak lanjut *invoice*. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja tersebut, dilakukan penguatan pemantauan jatuh tempo *invoice*, percepatan penyampaian surat tagihan, serta optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait agar penanganan sanksi denda administratif tetap berjalan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku.

### Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan indikator kinerja ini dicapai melalui optimalisasi pemanfaatan data hasil monitoring dan penertiban yang telah tersedia, sehingga proses identifikasi pelanggaran dan penerbitan sanksi tidak memerlukan pengumpulan data ulang. Selain itu, pemanfaatan sistem administrasi yang sudah berjalan serta penguatan koordinasi internal antar fungsi pengawasan dan keuangan memungkinkan proses penagihan dan pemantauan pembayaran dilakukan secara terintegrasi dan tepat waktu.

### Rekomendasi Peningkatan Kinerja Tahun Berikutnya

Rekomendasi peningkatan kinerja tahun berikutnya diarahkan pada penguatan pemantauan jatuh tempo *invoice* melalui sistem pengingat, percepatan tindak lanjut sanksi denda administratif khususnya terhadap wajib bayar yang belum patuh, serta peningkatan koordinasi lintas fungsi. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan evaluasi berkala terhadap mekanisme penagihan perlu terus dilakukan guna meningkatkan kepatuhan, dan meminimalkan potensi tunggakan di masa mendatang.

### Implementasi Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan indikator Persentase Penanganan Sanksi Denda Administratif mencerminkan implementasi Budaya BerAKHLAK melalui penanganan sanksi yang dilakukan secara profesional, transparan, dan **Akuntabel**, dengan pengelolaan *invoice* denda secara tertib dan sesuai ketentuan. Nilai **Berorientasi Pelayanan** diwujudkan melalui pemberian kepastian proses penegakan sanksi yang adil dan responsif bagi pemegang izin. Selain itu, nilai Integritas dan **Loyal** tercermin dari konsistensi penerapan regulasi tanpa kompromi, serta nilai **Kolaboratif** melalui koordinasi dan kerja sama yang baik antarpegawai, unit terkait, dan pemangku kepentingan guna memastikan penegakan sanksi berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

## IK-1.7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Jaringan Seluler

### Latar Belakang

Indikator Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Jaringan Seluler disusun untuk menjamin ketersediaan data yang akurat dan terukur sebagai dasar pengawasan, evaluasi, serta peningkatan kualitas layanan. Indikator ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai bagian dari penguatan pengawasan berbasis data, dan sebelumnya belum dilaksanakan secara terstruktur.

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang beragam dengan kebutuhan layanan telekomunikasi yang terus meningkat. Oleh karena itu, ketersediaan data kualitas layanan yang andal menjadi penting guna mengidentifikasi kesenjangan layanan antarwilayah. Capaian indikator ini memberikan manfaat bagi pemerintah dalam pengawasan dan perumusan kebijakan, bagi penyelenggara telekomunikasi dalam peningkatan layanan, serta bagi masyarakat dalam memperoleh layanan telekomunikasi yang lebih merata dan berkualitas.

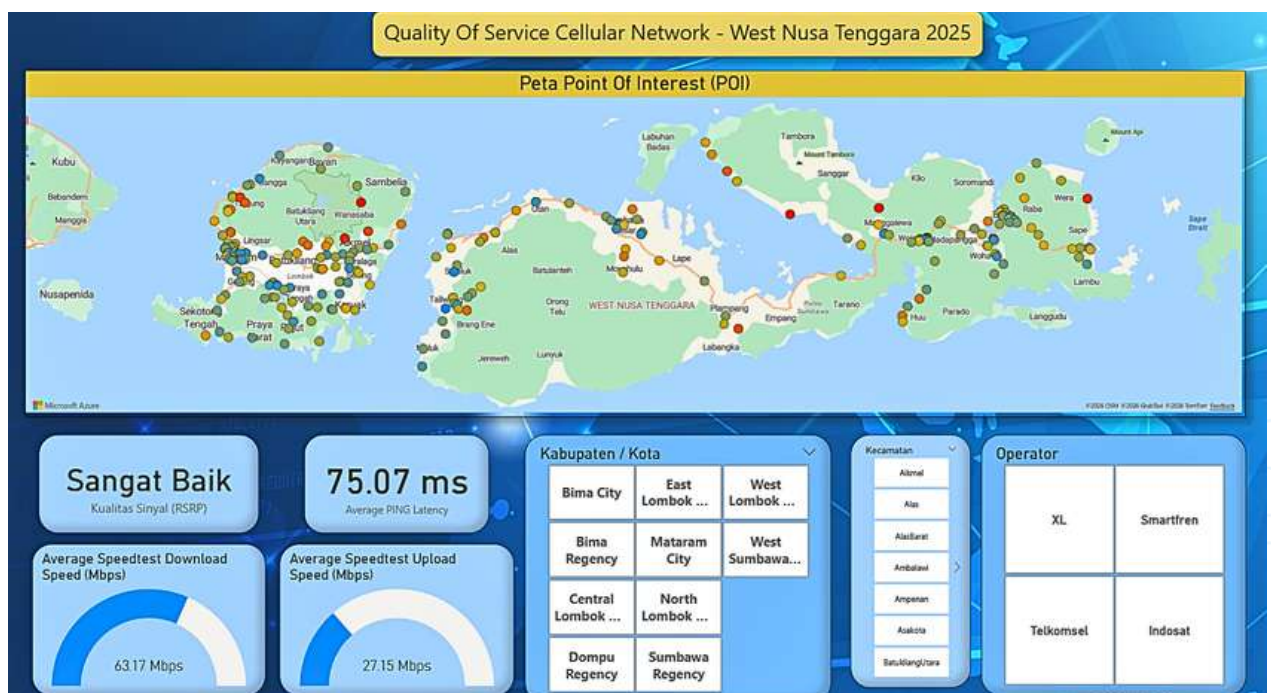
### Capaian Kinerja

Capaian kinerja indikator Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Jaringan Seluler tahun 2025 dihitung berdasarkan perbandingan jumlah kabupaten/kota yang telah dilakukan pengukuran terhadap target sebesar 80% dari total kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dikalikan 100%.

Sepanjang tahun 2025, pengukuran berhasil dilaksanakan di 10 kabupaten/kota dari target 8 kabupaten/kota, sehingga capaian indikator mencapai 125%. Capaian ini menunjukkan kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram mampu melampaui target dan mendukung ketersediaan data kualitas layanan telekomunikasi secara menyeluruh. Indikator ini merealisasikan anggaran sebesar **Rp70.024.000 (100%)** dari pagu anggaran non-blokir dengan nilai yang sama, mencerminkan perencanaan anggaran yang akurat, pemanfaatan sumber daya yang optimal, serta dukungan pembiayaan yang efektif dalam pencapaian kinerja maksimal.

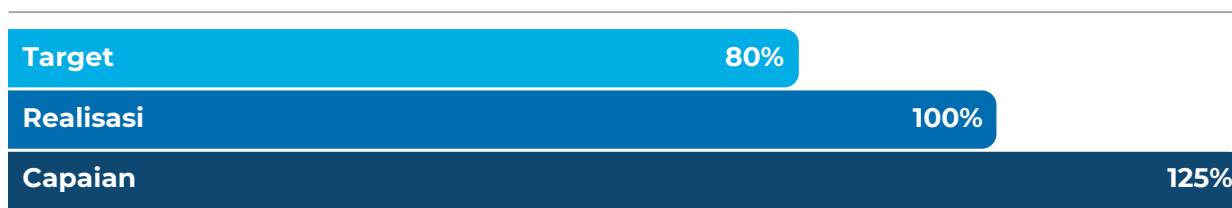
**Gambar 3.13**

*Kualitas Layanan Jaringan Seluler di Nusa Tenggara Barat*



**Grafik 3.14**

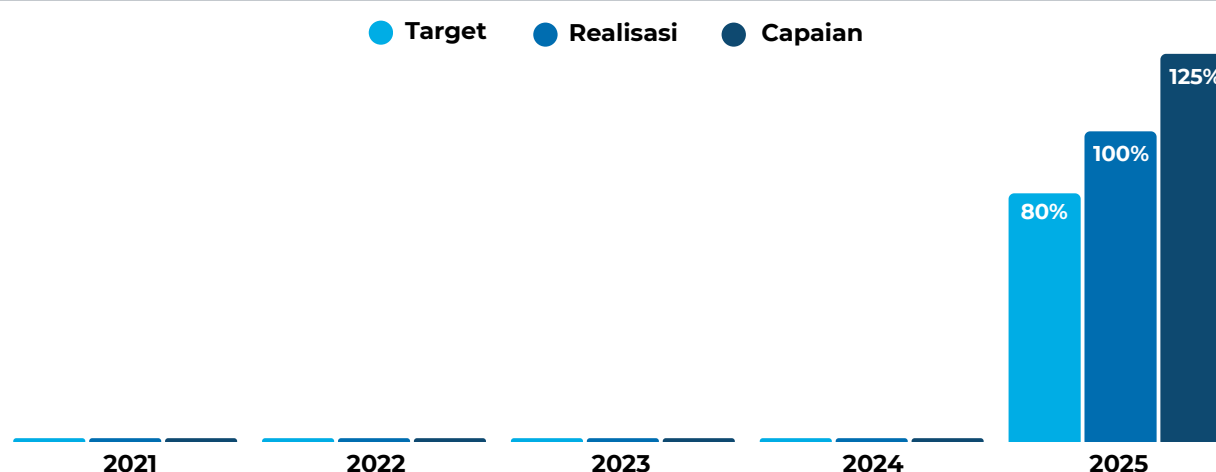
*Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Jaringan Seluler Tahun 2025*



## Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

**Grafik 3.15**

*Perbandingan Capaian IK-1.7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Jaringan Seluler Tahun 2021-2025*



Karena indikator Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan baru mulai dilaksanakan pada tahun 2025, maka pada tahun-tahun sebelumnya belum terdapat capaian kinerja yang dapat ditindaklanjuti secara langsung. Pada tahun 2025, pengukuran kualitas layanan jaringan bergerak seluler di Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil dilaksanakan di 10 kabupaten/kota dari target 8 kabupaten/kota, sehingga capaian indikator mencapai 125%. Capaian ini menjadi fondasi awal dalam membangun basis data kualitas layanan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dampak dari capaian kinerja tahun 2025 tercermin pada tersedianya data kualitas layanan yang komprehensif dan terukur sebagai bahan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggara telekomunikasi. Data tersebut mendukung peningkatan efektivitas pengambilan kebijakan, mendorong perbaikan kualitas layanan oleh penyelenggara, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui layanan telekomunikasi yang lebih andal, merata, dan berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh kompetensi SDM Balai Monitor SFR Kelas II Mataram dalam melaksanakan pengukuran sesuai SOP serta ketersediaan sarana prasarana yang memadai, termasuk perangkat QoS berbasis *Probe* dan pemanfaatan aplikasi Sigmon. Perencanaan kegiatan yang baik dan koordinasi dengan pihak terkait memungkinkan pengukuran berjalan efektif, akurat, dan melampaui target. Ke depan, peningkatan kinerja difokuskan pada penguatan kompetensi SDM, pemeliharaan dan pemutakhiran perangkat, penyusunan jadwal yang lebih efektif, serta peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk menjamin keberlanjutan data kualitas layanan.

## Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya pada pelaksanaan indikator ini diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang tersedia. Penggunaan perangkat pengukuran QoS dengan *Probe* serta aplikasi pendukung memungkinkan pelaksanaan pengukuran secara efektif tanpa penambahan sumber daya yang signifikan. Perencanaan kegiatan yang terarah dan pelaksanaan sesuai SOP turut mendukung pencapaian kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran dan waktu yang efisien.

## Rekomendasi Peningkatan Kinerja Tahun Berikutnya

Efisiensi sumber daya dicapai melalui optimalisasi SDM dan pemanfaatan sarana pengukuran yang tersedia, sehingga kegiatan pengukuran dapat dilaksanakan secara efektif sesuai SOP tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

## Implementasi Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan pengukuran kualitas layanan jaringan seluler mencerminkan implementasi nilai **Akuntabel**, dengan dilaksanakan sesuai SOP serta didukung pencatatan dan pelaporan data yang tertib. Nilai **Berorientasi Pelayanan** tercermin dari komitmen menyediakan data kualitas layanan yang andal sebagai dasar peningkatan layanan kepada masyarakat. Selain itu, nilai **Kompeten** diwujudkan melalui pengukuran objektif dan berbasis standar teknis.

### IK-1.8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)

## Latar Belakang

Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS–IKRAN) dilaksanakan untuk menjamin kompetensi dan kepatuhan operator radio terhadap ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio, serta mendukung tertib administrasi dan keselamatan komunikasi. Sertifikasi menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa operator radio amatir dan radio maritim memiliki kemampuan teknis yang memadai dan legalitas yang sah.

Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai wilayah kepulauan dan rawan bencana membutuhkan ketersediaan operator radio yang kompeten guna mendukung komunikasi darurat dan keselamatan pelayaran. Penerima manfaat dari indikator kinerja ini meliputi pengguna radio amatir, pelaut dan awak kapal, organisasi radio, instansi pemerintah, serta masyarakat luas yang membutuhkan layanan komunikasi radio yang andal dan aman.

## Capaian Kinerja

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS–IKRAN) ditetapkan dengan target 100%, meliputi 6 kali UNAR berbasis Computer Assisted Test (CAT) serta 1 kali sertifikasi SRC/LRC dan pelayanan loket MOTS. Sepanjang Tahun 2025, realisasi kegiatan menunjukkan kinerja sangat baik dengan pelaksanaan UNAR berbasis CAT sebanyak 13 kali yang diikuti 265 peserta (238 lulus dan 27 tidak lulus), serta 2 kali sertifikasi SRC/LRC dengan 100 peserta, disertai monitoring dan evaluasi layanan loket MOTS setiap bulan.

Dengan realisasi tersebut, capaian indikator mencapai 208,33%, jauh melampaui target yang ditetapkan. Indikator ini merealisasikan anggaran sebesar **Rp149.686.000 (97,17%)** dari pagu anggaran non-blokir sebesar **Rp154.042.000**, yang menunjukkan pemanfaatan anggaran secara efisien. Optimalisasi pelaksanaan UNAR reguler yang dilaksanakan setiap bulan memungkinkan peningkatan frekuensi layanan tanpa penambahan anggaran signifikan, sehingga kinerja dapat melampaui dua kali lipat target secara efektif dan terukur.

**Tabel 3.14**  
Rekapitulasi Pelaksanaan CAT UNAR Tahun 2025

| No     | Waktu Pelaksanaan | Jml Keg | Jumlah Peserta |    |    |            | Lulus |    |    |            | Tidak Lulus |    |    |           |
|--------|-------------------|---------|----------------|----|----|------------|-------|----|----|------------|-------------|----|----|-----------|
|        |                   |         | YD             | YC | YB | Jml        | YD    | YC | YB | Jml        | YD          | YC | YB | Jml       |
| 1      | 30 Jan 2025       | 1       | 18             | 1  | 0  | <b>19</b>  | 15    | 0  | 0  | <b>15</b>  | 3           | 1  | 0  | <b>4</b>  |
| 2      | 23 Feb 2025       | 1       | 21             | 1  | 0  | <b>22</b>  | 18    | 1  | 0  | <b>19</b>  | 3           | 0  | 0  | <b>3</b>  |
| 3      | 17 Maret 2025     | 1       | 4              | 0  | 0  | <b>4</b>   | 3     | 0  | 0  | <b>3</b>   | 1           | 0  | 0  | <b>1</b>  |
| 4      | 27 April 2025     | 1       | 14             | 6  | 0  | <b>20</b>  | 14    | 6  | 0  | <b>20</b>  | 0           | 0  | 0  | <b>0</b>  |
| 5      | 08 Mei 2025       | 1       | 1              | 0  | 1  | <b>2</b>   | 1     | 0  | 1  | <b>2</b>   | 0           | 0  | 0  | <b>0</b>  |
| 6      | 30 Jan 2025       | 1       | 9              | 0  | 0  | <b>9</b>   | 8     | 0  | 0  | <b>8</b>   | 1           | 0  | 0  | <b>1</b>  |
| 7      | 23 Feb 2025       | 1       | 46             | 4  | 3  | <b>53</b>  | 39    | 3  | 3  | <b>45</b>  | 7           | 0  | 0  | <b>8</b>  |
| 8      | 17 Maret 2025     | 1       | 9              | 3  | 2  | <b>14</b>  | 8     | 3  | 2  | <b>13</b>  | 1           | 0  | 0  | <b>1</b>  |
| 9      | 27 April 2025     | 1       | 50             | 0  | 0  | <b>50</b>  | 48    | 0  | 0  | <b>48</b>  | 2           | 2  | 0  | <b>2</b>  |
| 10     | 08 Mei 2025       | 1       | 9              | 10 | 1  | <b>20</b>  | 7     | 8  | 1  | <b>16</b>  | 2           | 0  | 0  | <b>4</b>  |
| 11     | 25 Nov 2025       | 1       | 6              | 0  | 0  | <b>6</b>   | 6     | 0  | 0  | <b>6</b>   | 0           | 0  | 0  | <b>0</b>  |
| 12     | 14 Des 2025       | 1       | 30             | 0  | 0  | <b>30</b>  | 30    | 0  | 0  | <b>30</b>  | 0           | 0  | 0  | <b>0</b>  |
| 13     | 28 Des 2025       | 1       | 15             | 1  | 0  | <b>16</b>  | 12    | 1  | 0  | <b>13</b>  | 3           | 0  | 0  | <b>3</b>  |
| Jumlah |                   | 13      | 232            | 26 | 7  | <b>265</b> | 209   | 22 | 7  | <b>238</b> | 23          | 4  | 0  | <b>27</b> |

**Tabel 3.15**  
Rekapitulasi Pelaksanaan LRC/SRC Tahun 2025

| No     | Tanggal      | Tempat Keg.                         | Jml Keg. | Jml Peserta |
|--------|--------------|-------------------------------------|----------|-------------|
| 1      | 10 Sept 2025 | Pelabuhan Labuhan Lombok Kab. Lotim | 1        | 50          |
| 2      | 11 Nov 2025  | Pelabuhan Labuhan Lombok Kab. Lotim | 1        | 50          |
| Jumlah |              |                                     | 2        | 100         |

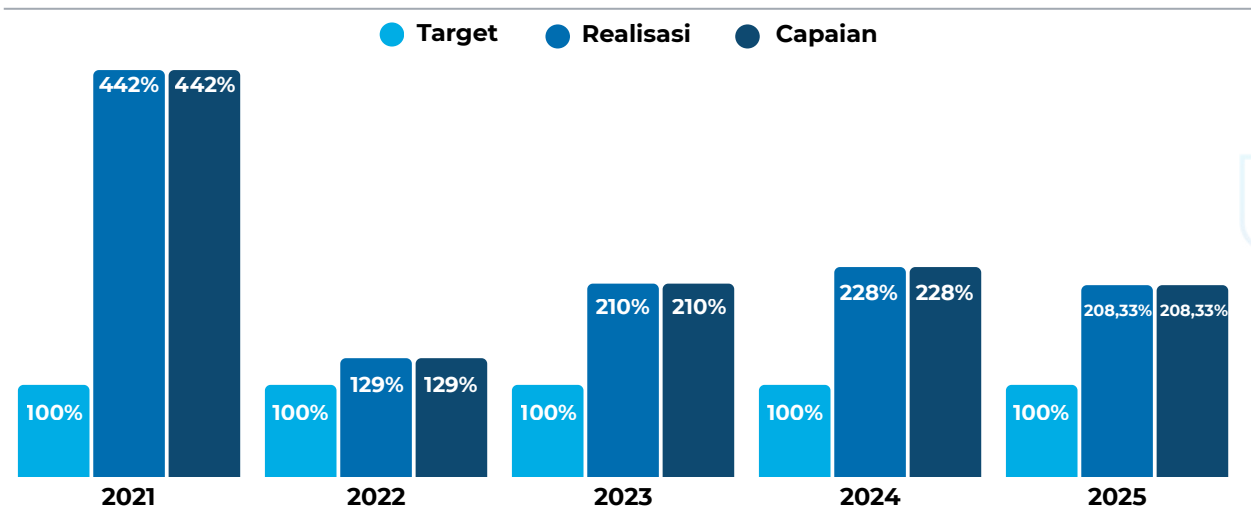
**Grafik 3.16**  
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)

|           |         |
|-----------|---------|
| Target    | 100%    |
| Realisasi | 208,33% |
| Capaian   | 208,33% |

## Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

**Grafik 3.17**

Perbandingan Capaian IK-1.8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN) Tahun 2021-2025



Capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram pada tahun 2021–2024 yang memenuhi dan melampaui target ditindaklanjuti dengan penyempurnaan perencanaan, penyesuaian target yang lebih realistis, serta penguatan kualitas pelaksanaan layanan pada Tahun 2025 guna menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas kinerja.

Capaian kinerja yang konsisten berdampak pada peningkatan kualitas layanan, tertib penggunaan spektrum frekuensi radio, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram.

### Faktor Penunjang Keberhasilan

Peningkatan kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram didukung oleh kompetensi sumber daya manusia, perencanaan kerja yang efektif, pemanfaatan sarana dan prasarana yang optimal, serta sinergi, koordinasi, dan komitmen organisasi yang baik dengan para pemangku kepentingan. Ke depan, penguatan kapasitas SDM, penyempurnaan perencanaan, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi perlu terus dilakukan guna menjaga kinerja yang efektif dan berkelanjutan.

### Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan indikator kinerja dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran secara efektif dan efisien melalui perencanaan yang tepat, penggunaan sistem berbasis teknologi, serta pengaturan jadwal kegiatan yang terukur. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai target, meminimalkan pemborosan sumber daya, serta tetap menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

### Rekomendasi Peningkatan Kinerja Tahun Berikutnya

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan penguatan perencanaan berbasis kebutuhan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan layanan sertifikasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan, sekaligus memastikan kinerja tetap efektif, efisien, dan berkelanjutan.

## Implementasi Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan indikator kinerja Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) mencerminkan implementasi Budaya BerAKHLAK secara nyata. Nilai **Berorientasi Pelayanan** tercermin dari komitmen Balai Monitor SFR Kelas II Mataram dalam menyediakan layanan sertifikasi yang mudah diakses, responsif, dan menjawab kebutuhan masyarakat pengguna radio. Nilai **Akuntabel** diwujudkan melalui pelaksanaan ujian dan sertifikasi yang tertib, terjadwal, serta berbasis sistem CAT sesuai ketentuan. Selanjutnya, nilai **Kompeten** dan **Adaptif** terlihat dari kemampuan SDM dalam mengelola peningkatan frekuensi pelaksanaan kegiatan dan jumlah peserta secara optimal tanpa mengurangi kualitas layanan. Selain itu, nilai Integritas dan **Kolaboratif** tercermin dari pelaksanaan sertifikasi yang transparan, objektif, serta didukung koordinasi dan kerja sama tim yang solid, sehingga layanan dapat berjalan efektif.

### IK-1.9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

#### Latar Belakang

Pengelolaan dan penanganan piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio merupakan bagian penting dalam menjaga optimalisasi PNBP dari sektor sumber daya spektrum frekuensi radio. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio di Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik untuk layanan telekomunikasi, penyiaran, maupun kebutuhan lainnya, potensi timbulnya piutang BHP frekuensi radio juga semakin besar apabila tidak dikelola secara tertib dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan indikator kinerja ini sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan pencegahan, pengurangan, dan penyelesaian piutang dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memberikan manfaat langsung bagi negara melalui pengamanan dan optimalisasi PNBP, capaian indikator ini juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha dengan terciptanya kepastian hukum dan administrasi dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Bagi masyarakat, pengelolaan piutang yang tertib turut mendukung terselenggaranya layanan komunikasi yang stabil, tertib, dan berkelanjutan, sehingga pemanfaatan spektrum frekuensi radio dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio ditetapkan dengan target 100% yang terdiri atas dua komponen, yaitu penanganan pencegahan dan pengurangan piutang dengan target minimal 80% serta koordinasi penanganan piutang dengan KPKNL, termasuk pengumpulan dokumen penghapusan mutlak dan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO), dengan target 100%. Capaian dihitung berdasarkan persentase piutang yang dihubungi terhadap target, serta pelaksanaan koordinasi minimal satu kali dalam tiga bulan.

Sepanjang Tahun 2025, sebanyak 278 target piutang berhasil ditangani, terdiri atas 274 melalui media *online* dan 4 melalui kunjungan langsung, sehingga komponen penanganan piutang terealisasi 100%. Koordinasi dengan KPKNL dilaksanakan 4 kali dalam setahun serta dilakukan pelimpahan satu piutang atas nama PT. Sinar Lombok Televisi yang masih dalam proses. Dengan demikian, indikator ini tercapai optimal 100%. Indikator ini merealisasikan anggaran sebesar **Rp26.940.000 (99,90%)** dari pagu non-blokir **Rp26.968.000**, menunjukkan serapan yang sangat optimal dan perencanaan anggaran yang akurat.

**Tabel 3.16**  
Rekapitulasi Penyampaian Piutang UPT Mataram Tahun 2025

| No     | Bulan     | Target | Jumlah Penyampaian Tagihan BHP |         |          |       | Jumlah Penanganan Piutang yang Dihubungi |                  |       | %   |
|--------|-----------|--------|--------------------------------|---------|----------|-------|------------------------------------------|------------------|-------|-----|
|        |           |        | Annual                         | Renewal | Reminder | Total | Lewat Media                              | Datang Lang-sung | Total |     |
| 1      | Januari   | 27     | 18                             | 4       | 5        | 27    | 27                                       | 0                | 27    | 100 |
| 2      | Februari  | 22     | 14                             | 0       | 8        | 22    | 22                                       | 0                | 22    | 100 |
| 3      | Maret     | 21     | 13                             | 0       | 8        | 21    | 20                                       | 1                | 21    | 100 |
| 4      | April     | 16     | 7                              | 3       | 6        | 16    | 15                                       | 1                | 16    | 100 |
| 5      | Mei       | 15     | 6                              | 2       | 7        | 15    | 15                                       | 0                | 15    | 100 |
| 6      | Juni      | 22     | 13                             | 2       | 7        | 22    | 22                                       | 0                | 22    | 100 |
| 7      | Juli      | 15     | 11                             | 1       | 3        | 15    | 15                                       | 0                | 15    | 100 |
| 8      | Agustus   | 40     | 28                             | 3       | 9        | 40    | 39                                       | 1                | 40    | 100 |
| 9      | September | 33     | 24                             | 0       | 9        | 33    | 33                                       | 0                | 33    | 100 |
| 10     | Oktober   | 30     | 14                             | 1       | 15       | 30    | 30                                       | 0                | 30    | 100 |
| 11     | November  | 37     | 19                             | 1       | 17       | 37    | 36                                       | 1                | 37    | 100 |
| 12     | Desember  |        |                                |         |          | 0     |                                          |                  | 0     |     |
| Jumlah |           | 278    | 167                            | 17      | 94       | 278   | 274                                      | 4                | 278   | 100 |

**Tabel 3.17**  
Pelaksanaan Koordinasi Pelimpahan Piutang

| Periode    | Bulan                 | Target | Jml Pelaksanaan Koordinasi dengan KPKNL | Capaian (%) |
|------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------|-------------|
| Triwulan 1 | Januari s.d. Maret    | 1      | 1                                       | 100         |
| Triwulan 2 | April s.d. Juni       | 1      | 1                                       | 100         |
| Triwulan 3 | Juli s.d. September   | 1      | 1                                       | 100         |
| Triwulan 4 | Oktober s.d. Desember | 1      | 1                                       | 100         |
| Jumlah     |                       | 4      | 4                                       | 100         |

**Grafik 3.18**

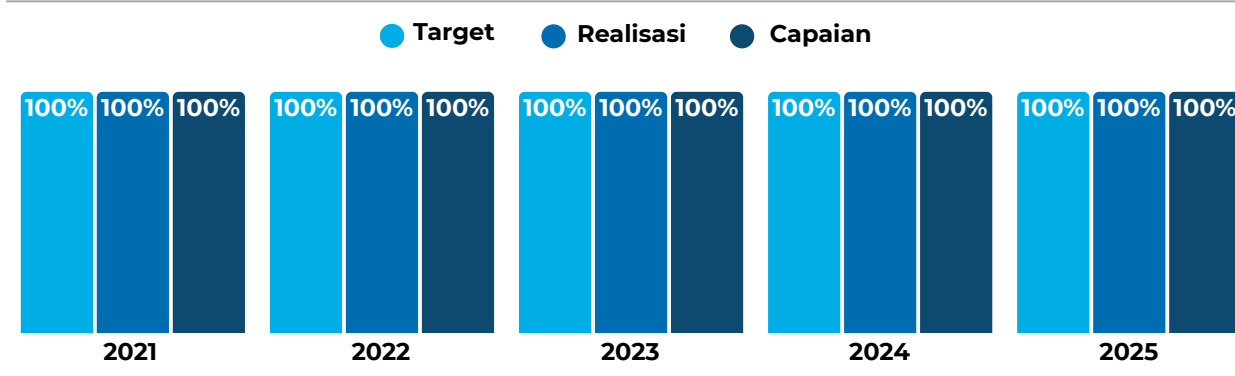
*Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio Tahun 2025*

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Target</b>    | <b>100%</b> |
| <b>Realisasi</b> | <b>100%</b> |
| <b>Capaian</b>   | <b>100%</b> |

## Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

**Grafik 3.19**

*Perbandingan Capaian IK-1.9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio Tahun 2021-2025*



Capaian indikator kinerja Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio yang secara konsisten terealisasi 100% sejak tahun 2021 hingga 2025 menjadi dasar untuk melanjutkan dan memperkuat pola kerja yang telah berjalan efektif. Tindak lanjut atas capaian tersebut dilakukan melalui pemeliharaan intensitas komunikasi dengan wajib bayar, optimalisasi pemanfaatan media daring dan kunjungan langsung dalam penagihan piutang, serta penguatan koordinasi berkala dengan KPKNL terkait penanganan lanjutan, termasuk pelimpahan piutang dan pengurusan penghapusan sesuai ketentuan. Selain itu, dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan mekanisme penanganan piutang tetap adaptif terhadap dinamika pemanfaatan spektrum frekuensi radio.

Dampak dari capaian indikator kinerja yang konsisten tersebut terlihat pada terjaganya tingkat kepatuhan wajib bayar BHP Frekuensi Radio, menurunnya potensi akumulasi piutang, serta terjaminnya keberlanjutan PNBP bidang telekomunikasi dan penyiaran. Capaian ini juga mendukung terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum bagi pengguna spektrum frekuensi radio di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan kinerja organisasi dalam pengelolaan keuangan negara.

## Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio didukung oleh komunikasi yang aktif dan konsisten dengan wajib bayar melalui pemanfaatan media daring maupun kunjungan langsung, didukung koordinasi yang berkelanjutan dengan KPKNL, pemahaman regulasi yang memadai, serta ketersediaan data piutang yang akurat. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan media komunikasi yang efektif, serta dukungan pimpinan dalam pengendalian kinerja turut berperan dalam memastikan proses penanganan piutang berjalan tertib dan efektif. Ke depan, diperlukan penguatan monitoring piutang secara berkala, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi lintas instansi agar penanganan piutang dapat dilaksanakan lebih cepat, tertib, dan berkelanjutan.

## Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan Indikator Kinerja Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio diwujudkan melalui optimalisasi penggunaan teknologi komunikasi daring untuk penagihan dan koordinasi, sehingga mengurangi kebutuhan kunjungan langsung dan biaya operasional. Selain itu, pemanfaatan SDM secara tepat sesuai kompetensi serta koordinasi terjadwal dengan KPKNL memungkinkan pelaksanaan kegiatan yang efektif, tepat waktu, dan berorientasi pada hasil tanpa menambah beban anggaran.

## Rekomendasi Peningkatan Kinerja Tahun Berikutnya

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, disarankan dilakukan penguatan sistem monitoring dan pemutakhiran data piutang secara berkala, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penagihan dan pelaporan, serta peningkatan intensitas koordinasi dengan KPKNL. Selain itu, penguatan kapasitas SDM melalui pembaruan pemahaman regulasi diharapkan dapat menjaga konsistensi capaian kinerja serta mendukung pengelolaan piutang BHP Frekuensi Radio yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## Implementasi Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio mencerminkan penerapan nilai **Akuntabel** melalui pengelolaan dan penagihan piutang yang tertib, terdokumentasi, dan sesuai ketentuan. Nilai **Berorientasi Pelayanan** diwujudkan melalui upaya komunikasi aktif dan persuasif kepada pemegang izin untuk memberikan kepastian proses penyelesaian piutang. Selain itu, nilai Integritas tercermin dari konsistensi dalam menegakkan kewajiban pembayaran BHP tanpa diskriminasi, serta nilai **Kolaboratif** melalui koordinasi yang berkelanjutan dengan unit terkait dan KPKNL dalam rangka pengamanan PNBPN secara optimal.



Gambar 3.15  
Kegiatan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio di Lombok Timur

## IK-1.10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

### Latar Belakang

Indikator Persentase Sosialisasi Pelayanan Publik dilaksanakan untuk memastikan informasi terkait kebijakan, prosedur, dan standar pelayanan publik dapat dipahami dan diakses secara luas oleh masyarakat. Pada Tahun 2025, sosialisasi difokuskan pada tema Tertib Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Era Digital serta Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi di Era Transformasi Digital, sebagai respons atas meningkatnya pemanfaatan teknologi dan kebutuhan akan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, aman, dan sesuai ketentuan.

Kondisi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan perkembangan digital yang semakin pesat serta karakteristik wilayah yang beragam menuntut penguatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi. Melalui sosialisasi ini, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan memperoleh peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi, sementara penyelenggara layanan memperoleh dukungan dalam menciptakan ekosistem telekomunikasi yang tertib, terkendali, dan berkelanjutan.

### Capaian Kinerja

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, indikator Persentase Sosialisasi Pelayanan Publik ditetapkan dengan target sebesar 100%, yang diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pelaksanaan sosialisasi minimal 1 (satu) kali secara tatap muka atau daring, dan (2) jumlah peserta minimal 30 orang. Mekanisme penghitungan capaian dilakukan dengan ketentuan pemenuhan komponen pertama bernilai 50%, sedangkan pemenuhan kedua komponen bernilai 100%.

Sepanjang Tahun 2025, telah dilaksanakan 2 kegiatan sosialisasi secara luring dengan total 94 peserta, sehingga seluruh komponen indikator terpenuhi dan capaian kinerja mencapai 100% sesuai target. Indikator ini merealisasikan anggaran sebesar **Rp147.952.000 (100%)** dari pagu anggaran non-blokir, ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang tepat serta dukungan anggaran yang optimal. Realisasi tersebut sejalan dengan tercapainya target kinerja secara maksimal dan mencerminkan efektivitas pemanfaatan anggaran dalam mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan SFR.

**Tabel 3.18**

*Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi Layanan Publik Tahun 2025*

| No | Lokasi Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Jumlah Peserta | Tema                                                                                                                     |
|----|--------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kab. Lombok Barat  | 29 April 2025     | 44 Orang       | Tertib Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Era Digital                                                                  |
| 2  | Kab. Sumbawa Barat | 25 September 2025 | 50 Orang       | Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi di Era Transformasi Digital |

Selain kegiatan sosialisasi langsung, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram juga melakukan sosialisasi melalui media elektronik, seperti iklan layanan masyarakat di radio siaran dan pemasangan baliho sebagai upaya untuk memperluas jangkauan informasi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan penerapan peraturan yang berlaku.

**Grafik 3.20**

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik Tahun 2025

|           |      |
|-----------|------|
| Target    | 100% |
| Realisasi | 100% |
| Capaian   | 100% |

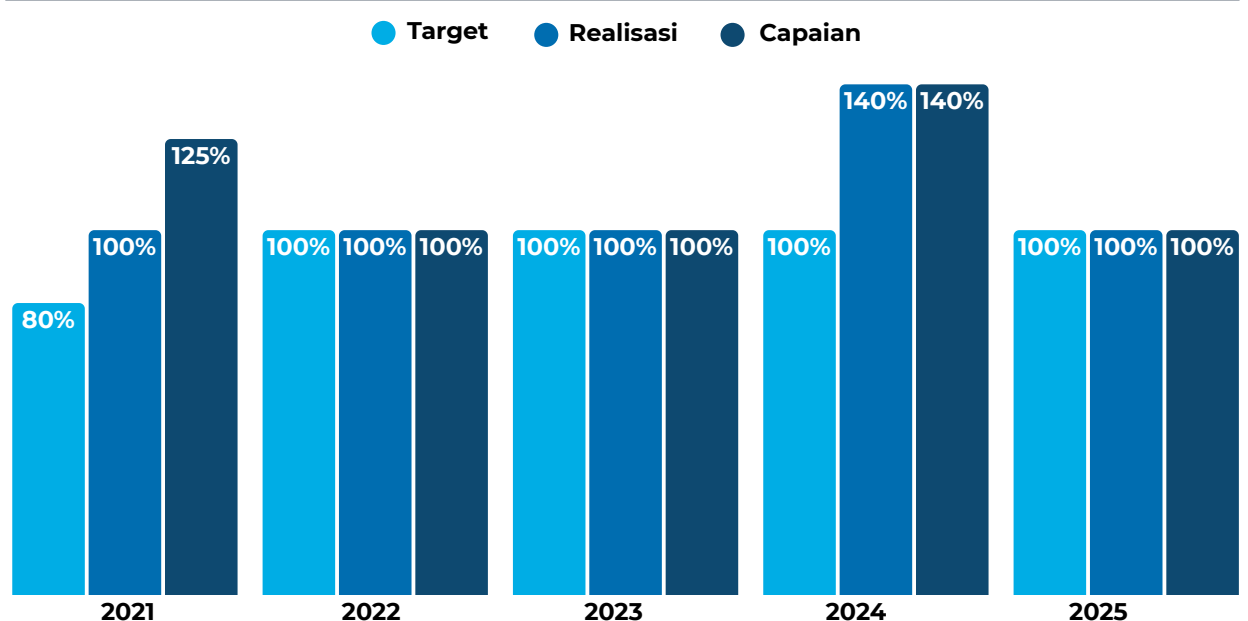


Gambar 3.16  
Kegiatan Sosialisasi di Kab. Sumbawa Barat

## Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

**Grafik 3.21**

Perbandingan Capaian IK-1.10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik Tahun 2021-2025



Capaian kinerja pada Tahun 2021–2025 yang secara konsisten memenuhi target ditindaklanjuti melalui penyempurnaan metode sosialisasi, peningkatan kualitas dan relevansi materi, serta penguatan koordinasi internal dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan. Selain itu, dilakukan pemanfaatan media komunikasi yang lebih variatif dan interaktif agar penyampaian informasi lebih mudah dipahami oleh peserta, termasuk penyediaan sesi tanya jawab dan umpan balik sebagai bahan perbaikan kegiatan berikutnya, sehingga keberlanjutan capaian kinerja dan efektivitas pelayanan publik dapat terus terjaga.

Capaian tersebut berdampak pada meningkatnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha terhadap ketentuan pelayanan publik, khususnya dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi. Dampak lainnya adalah berkurangnya potensi pelanggaran administratif, meningkatnya kualitas interaksi antara regulator dan pengguna layanan, serta tumbuhnya kepercayaan publik terhadap kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram dalam memberikan pelayanan yang transparan dan responsif.

### Faktor Penunjang Keberhasilan

Pencapaian dan peningkatan kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram didukung oleh ketersediaan SDM yang kompeten, perencanaan dan sistem kerja yang terencana, pemanfaatan sarana dan prasarana yang optimal, serta sinergi, koordinasi, dan komitmen organisasi yang baik dengan para pemangku kepentingan. Ke depan, diperlukan penguatan kapasitas SDM, penyempurnaan perencanaan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi guna menjaga kinerja yang tetap efektif dan berkelanjutan.

### Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan indikator kinerja dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran secara efektif dan efisien melalui perencanaan yang tepat, pemanfaatan sistem berbasis teknologi, serta pengaturan jadwal kegiatan yang terukur dan terkoordinasi. Pendekatan tersebut memungkinkan seluruh kegiatan berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tetap menjaga kualitas layanan tanpa menimbulkan pemborosan sumber daya.

### Rekomendasi Peningkatan Kinerja Tahun Berikutnya

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan penguatan perencanaan berbasis kebutuhan dan pemetaan potensi peserta secara lebih komprehensif, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pembaruan pengetahuan teknis dan regulasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendaftaran, pelaksanaan, dan pelaporan layanan sertifikasi. Selain itu, koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait perlu terus diperkuat guna memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas pelaksanaan, serta memastikan keberlanjutan penyelenggaraan layanan sertifikasi yang efektif dan efisien.

### Implementasi Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik mencerminkan penerapan nilai **Berorientasi Pelayanan** melalui penyampaian informasi kebijakan, prosedur, dan standar layanan yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Nilai **Akuntabel** tercermin dari pelaksanaan sosialisasi yang terencana, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, nilai **Kompeten** diwujudkan melalui penyampaian materi yang relevan dan berbasis regulasi oleh petugas yang memahami substansi pengelolaan spektrum frekuensi radio, serta nilai **Kolaboratif** melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun pemahaman bersama guna mewujudkan ekosistem telekomunikasi yang tertib dan berkelanjutan.

## IK-1.11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

### Latar Belakang

Indikator kinerja Survei Kepuasan Pelayanan Publik dibuat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat secara objektif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan serta sebagai dasar evaluasi dan perbaikan layanan berkelanjutan sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Penetapan indikator ini sebagai indikator kinerja mandiri bertujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan publik dan mendukung pemenuhan persyaratan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Kondisi pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terus berkembang menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Capaian kinerja indikator ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan mitra sebagai penerima layanan melalui peningkatan kualitas pelayanan, serta bagi unit kerja sebagai bahan umpan balik terukur dalam pengambilan kebijakan, peningkatan kinerja, dan penguatan kepercayaan publik.

### Capaian Kinerja

Survei Kepuasan Pelayanan Publik dilaksanakan melalui aplikasi yang dikembangkan DJID dan sesuai pedoman Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017, minimal satu kali dalam setahun dengan jumlah responden sekurang-kurangnya 30 orang. Survei dilakukan secara triwulanan kepada penerima layanan dengan mengukur sembilan parameter utama pelayanan, yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana. Hasil survei diolah dan dilaporkan sebagai dasar evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik serta pemenuhan persyaratan Zona Integritas menuju WBK.

Capaian kinerja Survei Kepuasan Pelayanan Publik dihitung menggunakan rumus Persentase Capaian =  $(\text{Hasil Survei IKM/IPKP} \div 3,2) \times 100\%$ , dengan target nilai minimum IKM/IPKP sebesar 3,2 (skala 4). Rumus ini digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pelayanan publik terhadap target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil survei tahun berjalan, diperoleh nilai IKM sebesar 3,94 pada Triwulan I, 3,95 pada Triwulan II, serta 3,90 pada Triwulan III dan IV. Capaian kinerja masing-masing triwulan berada pada rentang 121,88%–123,44%, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah melampaui target dan berada pada kategori sangat baik, sekaligus mendukung pencapaian Zona Integritas menuju WBK.

**Tabel 3.19**  
*Capaian Survey IKM/IPKP Tahun 2025 Berdasarkan Responden*

| Periode      | Jumlah Responden |     |       |       | Hasil Survey IKM (Skala 4) | Target | Capaian (%) |
|--------------|------------------|-----|-------|-------|----------------------------|--------|-------------|
|              | SFR              | SOR | Mitra | Total |                            |        |             |
| Triwulan I   | 32               | 2   | 1     | 35    | 3,94                       | 3,2    | 123,13      |
| Triwulan II  | 33               | 1   | 2     | 36    | 3,95                       | 3,2    | 123,44      |
| Triwulan III | 28               | 3   | 2     | 33    | 3,9                        | 3,2    | 121,88      |
| Triwulan IV  | 28               | 3   | 2     | 33    | 3,9                        | 3,2    | 121,88      |

**Tabel 3.20**

Capaian Survey IKM/IPKP Tahun 2025 Berdasarkan Parameter Utama Pelayanan

| No                  | Indikator                               | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan III |
|---------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 1                   | Persyaratan                             | 3,97       | 3,94        | 3,91         | 3,89         |
| 2                   | Sistem, mekanisme, dan prosedur         | 3,97       | 3,92        | 3,91         | 3,95         |
| 3                   | Waktu penyelesaian                      | 3,94       | 3,89        | 3,94         | 3,94         |
| 4                   | Biaya/tarif                             | 3,89       | 3,92        | 3,82         | 3,89         |
| 5                   | Produk spesifikasi jenis pelayanan      | 3,97       | 3,97        | 3,91         | 3,92         |
| 6                   | Kompetensi pelaksana                    | 3,91       | 3,97        | 3,94         | 3,89         |
| 7                   | Perilaku pelaksana                      | 3,97       | 3,97        | 3,91         | 3,95         |
| 8                   | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | 3,91       | 4,00        | 3,88         | 3,89         |
| 9                   | Sarana dan prasarana                    | 3,94       | 3,97        | 3,88         | 3,89         |
| Nilai Rata-rata IKM |                                         | 3,94       | 3,95        | 3,90         | 3,90         |

**Grafik 3.22**

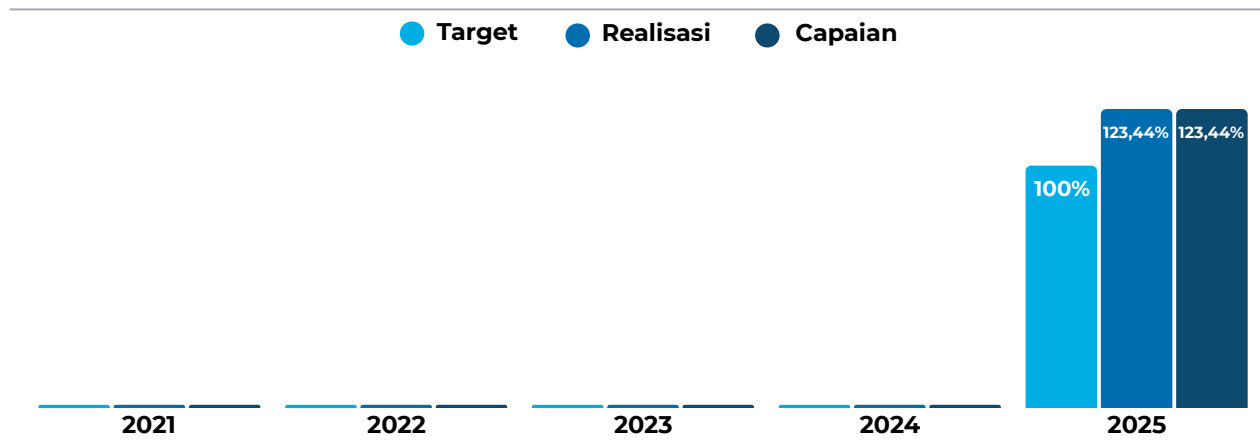
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) Tahun 2025

|           |         |
|-----------|---------|
| Target    | 100%    |
| Realisasi | 123,44% |
| Capaian   | 123,44% |

## Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

**Grafik 3.23**

Perbandingan Capaian IK-1.11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) Tahun 2021-2025



Pada tahun 2021–2024, indikator Survei Kepuasan Pelayanan Publik IKM/IPKP belum berdiri sendiri dan masih tergabung dalam penilaian kinerja sosialisasi dan survei kepuasan masyarakat. Pada tahun 2025, indikator ini ditetapkan sebagai indikator kinerja mandiri dengan target nilai 3,2 dan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, serta pemanfaatan hasil survei sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan.

Penetapan indikator mandiri pada tahun 2025 berdampak pada peningkatan fokus dan kualitas pelayanan publik, yang tercermin dari nilai IKM sebesar 3,95 atau capaian 123,44%. Selain meningkatkan akuntabilitas kinerja, hasil ini juga mendukung pencapaian Zona Integritas menuju WBK.

### Faktor Penunjang Keberhasilan

Peningkatan kinerja Survei Kepuasan Pelayanan Publik didukung oleh penetapan IKM/IPKP sebagai indikator kinerja mandiri pada Tahun 2025, pelaksanaan survei yang terencana dan konsisten sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017, serta komitmen pimpinan dan pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Keberhasilan capaian kinerja ini juga ditunjang oleh meningkatnya kesadaran petugas layanan terhadap pentingnya kepuasan masyarakat serta tersedianya mekanisme pengolahan dan pemanfaatan hasil survei sebagai dasar perbaikan layanan. Ke depan, diperlukan penguatan tindak lanjut hasil survei, peningkatan kompetensi petugas dan sarana prasarana, serta pemantauan berkala guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

### Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan survei dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal melalui penggunaan instrumen survei yang sederhana namun tetap sesuai standar, pemanfaatan media digital untuk mempermudah pengumpulan responden, serta keterlibatan pegawai internal secara terkoordinasi tanpa menambah beban anggaran secara signifikan. Selain itu, pengolahan dan analisis data dilakukan secara mandiri oleh unit kerja sehingga lebih efisien dari sisi waktu, biaya, dan tenaga, sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

### Rekomendasi Peningkatan Kinerja Tahun Berikutnya

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan penguatan tindak lanjut hasil survei, peningkatan kualitas layanan pada unsur yang masih memerlukan perbaikan, serta optimalisasi metode survei agar menjangkau lebih banyak responden. Selain itu, pemantauan berkala terhadap pelaksanaan survei perlu terus dilakukan guna menjaga konsistensi kualitas pelayanan publik.

### Implementasi Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) mencerminkan penerapan nilai-nilai BerAKHLAK, khususnya **Berorientasi Pelayanan** melalui upaya mengukur kepuasan masyarakat secara objektif serta menjadikan masukan pengguna layanan sebagai dasar utama perbaikan kualitas pelayanan publik. Nilai **Akuntabel** diwujudkan melalui pelaksanaan survei dan pelaporan hasil yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi kinerja layanan. Selanjutnya, nilai **Kolaboratif** tercermin dari keterlibatan penerima layanan sebagai responden serta kerja sama berbagai pihak dalam pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan hasil survei. Adapun nilai **Kompeten** dan **Loyal** tercermin dari komitmen petugas dalam melaksanakan survei secara konsisten dan sesuai ketentuan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

## IK-1.12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

### Latar Belakang

Indikator kinerja Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) disusun sebagai instrumen untuk mengukur tingkat integritas penyelenggaraan pelayanan publik secara objektif dan terukur, khususnya dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Indikator ini berperan penting dalam memastikan bahwa pelayanan publik dilaksanakan secara profesional, adil, dan bebas dari praktik diskriminasi, pungutan liar, penerimaan imbalan, serta percaloan. Selain itu, hasil survei menjadi dasar evaluasi kinerja unit pelayanan sekaligus bahan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan.

Seiring dengan perkembangan pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan meningkatnya kebutuhan serta ekspektasi masyarakat, penguatan integritas dan transparansi layanan menjadi tuntutan yang tidak terpisahkan. Penerima manfaat dari capaian indikator ini adalah masyarakat dan pengguna layanan di wilayah Nusa Tenggara Barat yang memperoleh pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, bagi instansi penyelenggara layanan, hasil IIPP/IPAK memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memperkuat tata kelola, mencegah potensi penyimpangan, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

### Capaian Kinerja

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dilaksanakan melalui aplikasi yang dikembangkan DJID dan sesuai ketentuan KemenPAN-RB dan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017, dengan frekuensi minimal satu kali dalam setahun serta jumlah responden pada setiap triwulan telah memenuhi ketentuan  $\geq 30$  responden. Survei mencakup parameter diskriminasi pelayanan, pelayanan di luar prosedur, penerimaan imbalan, pungutan liar, serta percaloan/perantara tidak resmi dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK.

Hasil survei menunjukkan nilai IKM pada seluruh triwulan berada di atas target 3,6 (skala 4), yaitu 3,98 pada Triwulan I (123,13%), 3,95 pada Triwulan II (123,43%), 3,86 pada Triwulan III (107,22%), dan 3,86 pada Triwulan IV (121,88%). Capaian tersebut menunjukkan bahwa integritas pelayanan publik terlaksana dengan sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan.

**Tabel 3.21**  
*Capaian Survey IPP/IPAK Tahun 2025 Berdasarkan Responden*

| Periode      | Jumlah Responden |     |       |       | Hasil Survey IKM (Skala 4) | Target | Capaian % |
|--------------|------------------|-----|-------|-------|----------------------------|--------|-----------|
|              | SFR              | SOR | Mitra | Total |                            |        |           |
| Triwulan I   | 32               | 2   | 1     | 35    | 3,98                       | 3,6    | 110,56    |
| Triwulan II  | 33               | 1   | 2     | 36    | 3,95                       | 3,6    | 109,72    |
| Triwulan III | 28               | 3   | 2     | 33    | 3,86                       | 3,6    | 107,22    |
| Triwulan IV  | 29               | 7   | 2     | 38    | 3,86                       | 3,6    | 107,22    |

**Tabel 3.22**  
Capaian Survey IIP/IPAK Tahun 2025 Berdasarkan Parameter Utama Pelayanan

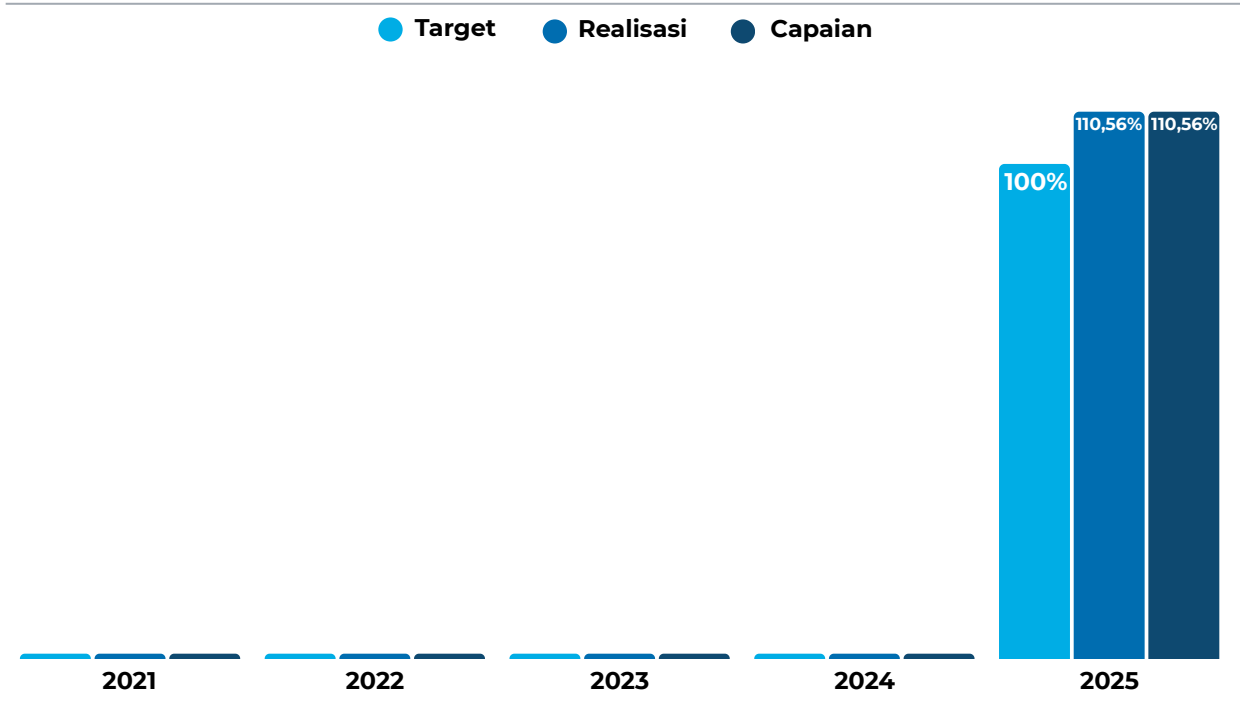
| No                  | Indikator                         | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan III |
|---------------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 1                   | Diskriminasi Pelayanan            | 3,98       | 3,94        | 3,84         | 3,86         |
| 2                   | Pelayanan di luar prosedur        | 3,98       | 3,94        | 3,84         | 3,86         |
| 3                   | Penerimaan imbalan                | 3,98       | 3,96        | 3,88         | 3,88         |
| 4                   | Pungutan liar                     | 3,98       | 3,96        | 3,88         | 3,86         |
| 5                   | Percaloan / perantara tidak resmi | 3,98       | 3,94        | 3,88         | 3,89         |
| Nilai Rata-rata IKM |                                   | 3,98       | 3,95        | 3,86         | 3,87         |

**Grafik 3.24**  
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) Tahun 2025

|           |         |
|-----------|---------|
| Target    | 100%    |
| Realisasi | 110,56% |
| Capaian   | 110,56% |

## Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

**Grafik 3.25**  
Perbandingan Capaian IK-1.12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) Tahun 2021-2025



Sebagai tindak lanjut penetapan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) sebagai indikator kinerja mandiri pada tahun 2025, satuan kerja memperkuat pelaksanaan survei secara terukur dan akuntabel. Pada tahun sebelumnya, indikator ini masih tergabung dalam penilaian kinerja sosialisasi dan Survei Kepuasan Masyarakat, sehingga pada tahun 2025 ditetapkan sebagai indikator mandiri untuk meningkatkan fokus pengukuran. Tindak lanjut dilakukan melalui penyusunan instrumen sesuai ketentuan KemenPAN-RB, peningkatan partisipasi responden, serta pelaporan hasil survei secara periodik dengan target 3,6 (skala 4).

Pelaksanaan indikator kinerja mandiri pada tahun 2025 menghasilkan capaian kinerja sebesar 3,86 atau 107,22% dari target, yang menunjukkan peningkatan integritas pelayanan publik. Penetapan indikator mandiri menjadikan pengukuran lebih fokus dan berkontribusi langsung terhadap penguatan tata kelola pelayanan yang transparan dan akuntabel.

### Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan peningkatan kinerja indikator Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) didukung oleh penetapan indikator kinerja sebagai indikator mandiri yang membuat pengukuran lebih fokus dan terarah, komitmen pimpinan dan pegawai dalam menjaga integritas pelayanan, serta pelaksanaan survei yang konsisten sesuai ketentuan Kementerian PANRB. Selain itu, pemahaman pegawai terhadap nilai integritas pelayanan, partisipasi responden yang memadai, serta pengelolaan hasil survei secara objektif dan akuntabel turut mendorong capaian kinerja yang melampaui target.

### Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan Survei IIPP/IPAK dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui pemanfaatan pegawai internal tanpa penambahan tenaga khusus, penggunaan instrumen survei yang sederhana namun sesuai ketentuan, serta pemanfaatan media daring untuk pengumpulan data sehingga menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pengolahan dan analisis hasil survei dilakukan secara mandiri dengan sistem yang ada, sehingga pelaksanaan survei tetap efektif, efisien, dan tidak memerlukan tambahan anggaran yang signifikan.

### Rekomendasi Peningkatan Kinerja Tahun Berikutnya

Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, direkomendasikan penguatan sosialisasi integritas pelayanan kepada pegawai dan pengguna layanan, peningkatan kualitas instrumen survei, serta pemanfaatan hasil survei sebagai dasar perbaikan layanan secara berkelanjutan guna mempertahankan capaian kinerja dan mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

### Implementasi Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIP/IPAK) mencerminkan implementasi budaya BerAKHLAK ASN, khususnya **Akuntabel** melalui pengukuran tingkat integritas pelayanan secara objektif dan terukur terhadap praktik diskriminasi pelayanan, pelayanan di luar prosedur, penerimaan imbalan, pungutan liar, serta percaloan. Nilai **Berorientasi Pelayanan** diwujudkan dengan memastikan seluruh layanan diberikan secara adil, setara, dan sesuai prosedur tanpa perlakuan khusus kepada pihak tertentu. Selanjutnya, nilai **Loyal** tercermin dari komitmen ASN dalam menjaga marwah institusi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara nilai **Kolaboratif** diwujudkan melalui keterlibatan pengguna layanan sebagai responden untuk memberikan umpan balik sebagai dasar penguatan integritas dan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

### IK-1.13 Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)

#### Latar Belakang

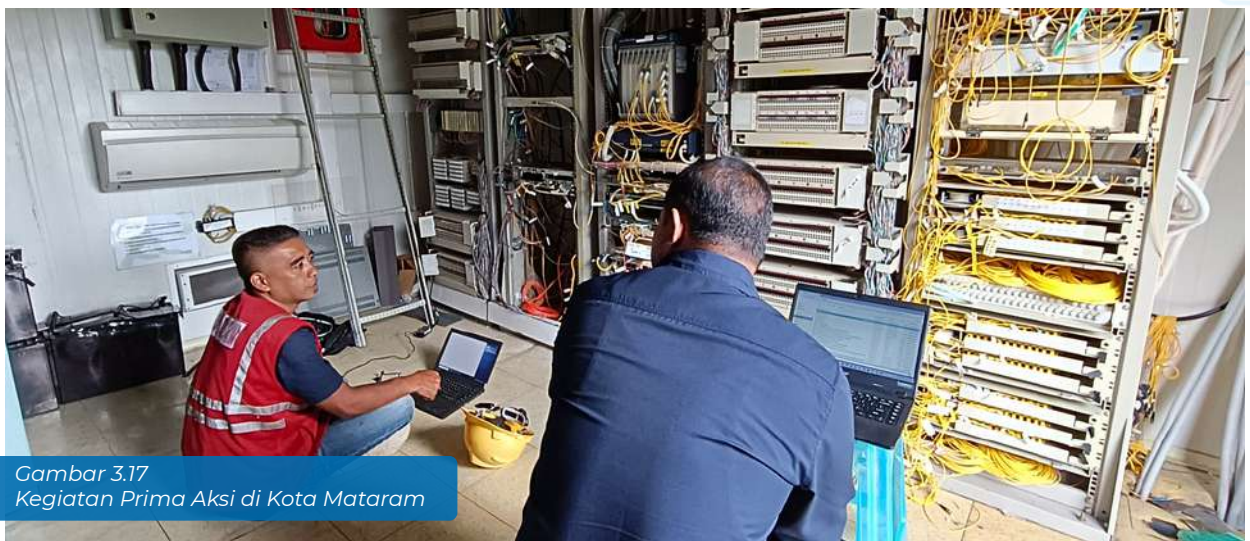
Indikator Kinerja Tindak lanjut verifikasi *site* ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai (PrimaAksi) disusun sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan kesesuaian data koordinat *site* pada izin ISR dengan kondisi faktual di lapangan serta menjamin kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Indikator ini diperlukan untuk mendorong kepastian hukum, tertib administrasi, dan efektivitas pengawasan, sekaligus meminimalkan potensi gangguan frekuensi akibat penggunaan spektrum yang tidak sesuai izin.

Kondisi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terus mengalami peningkatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan jaringan *Microwave Link* menuntut pengawasan yang lebih intensif dan terukur. Capaian indikator ini memberikan manfaat langsung bagi pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penguatan pengawasan, bagi penyelenggara telekomunikasi dalam meningkatkan kepatuhan dan kepastian usaha, serta bagi masyarakat luas melalui terjaminnya kualitas layanan komunikasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

#### Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Tindak lanjut verifikasi *site* ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai (PrimaAksi) ditetapkan untuk memastikan seluruh temuan ketidaksesuaian hasil verifikasi koordinat *site* *Microwave Link* dan penyiaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Pengukuran capaian dilakukan dengan membandingkan jumlah *site* ISR tidak sesuai yang telah ditindaklanjuti terhadap total *site* ISR tidak sesuai. Sepanjang Tahun 2025, dari hasil verifikasi terhadap 1.061 *site*, ditemukan 239 *site* ISR yang tidak sesuai dan telah ditindaklanjuti.

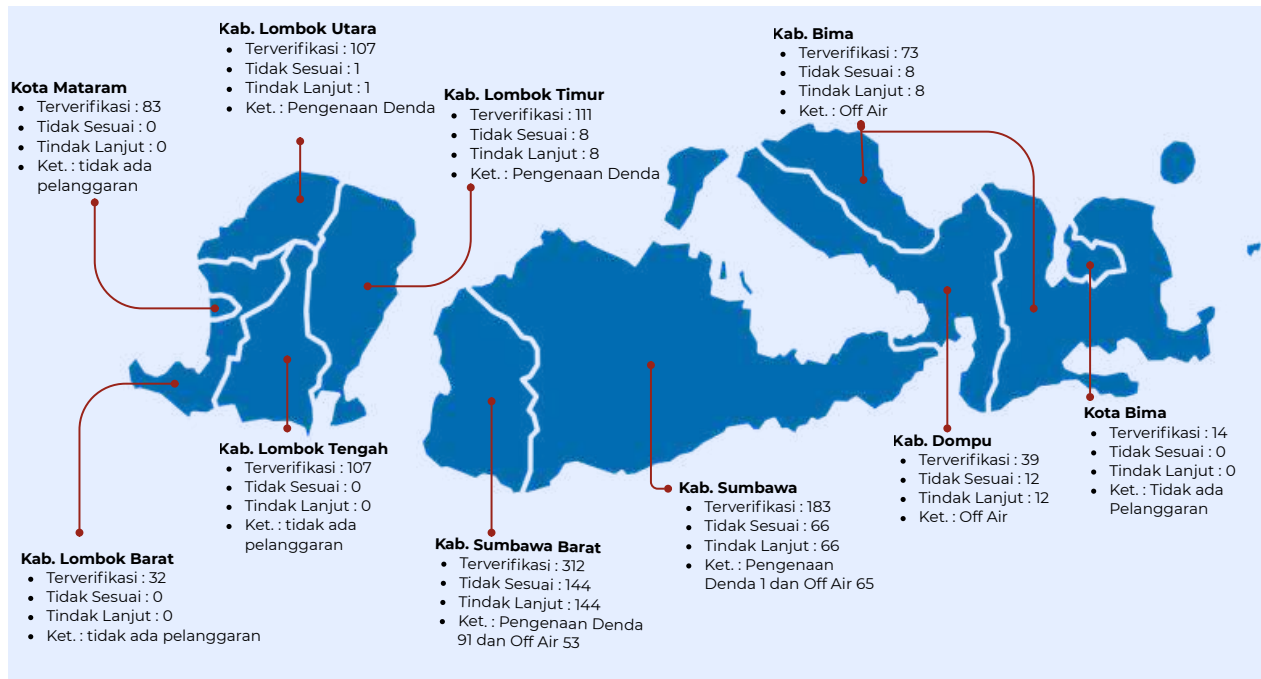
Seluruh 239 *site* tersebut ditindaklanjuti 100% melalui penerbitan surat administrasi pengenaan denda dan tindakan off air sesuai jenis pelanggaran, baik berdasarkan wilayah maupun penyelenggara/operator. Dengan demikian, capaian indikator Tahun 2025 mencapai 100% sesuai target Perjanjian Kinerja. Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh anggaran yang tergabung dalam IK 1.2 Pemeriksaan Stasiun Radio, sehingga optimalisasi kegiatan pemeriksaan dan verifikasi dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan efisien tanpa alokasi anggaran tersendiri.



Gambar 3.17  
Kegiatan Prima Aksi di Kota Mataram

**Grafik 3.26**

Hasil Verifikasi Koordinat Site Microwave Link dan Penyiaran Tahun 2025 Berdasarkan Wilayah

**Tabel 3.23**

Data Hasil Verifikasi Koordinat Site Microwave Link dan Penyiaran Tahun 2025 Berdasarkan Penyelenggara/Operator Seluler

| No     | Penyelenggara/<br>Operator Seluler | Jumlah<br>Terverifikasi | Tidak<br>Sesuai | Tindak<br>Lanjut | Keterangan                        |
|--------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| 1      | SMART TELECOM                      | 34                      | 0               | 0                | Tidak ada pelanggaran             |
| 2      | XLSMART                            | 223                     | 34              | 34               | Pengenaan Denda 2 dan off air 32  |
| 3      | TELKOM                             | 478                     | 130             | 130              | Pengenaan Denda 96 dan off air 34 |
| 4      | INDOSAT                            | 229                     | 37              | 37               | Pengenaan Denda 3 dan off air 34  |
| 5      | TELKOMSEL                          | 97                      | 38              | 38               | Off air                           |
| Jumlah |                                    | 1.061                   | 239             | 239              |                                   |

**Grafik 3.27**

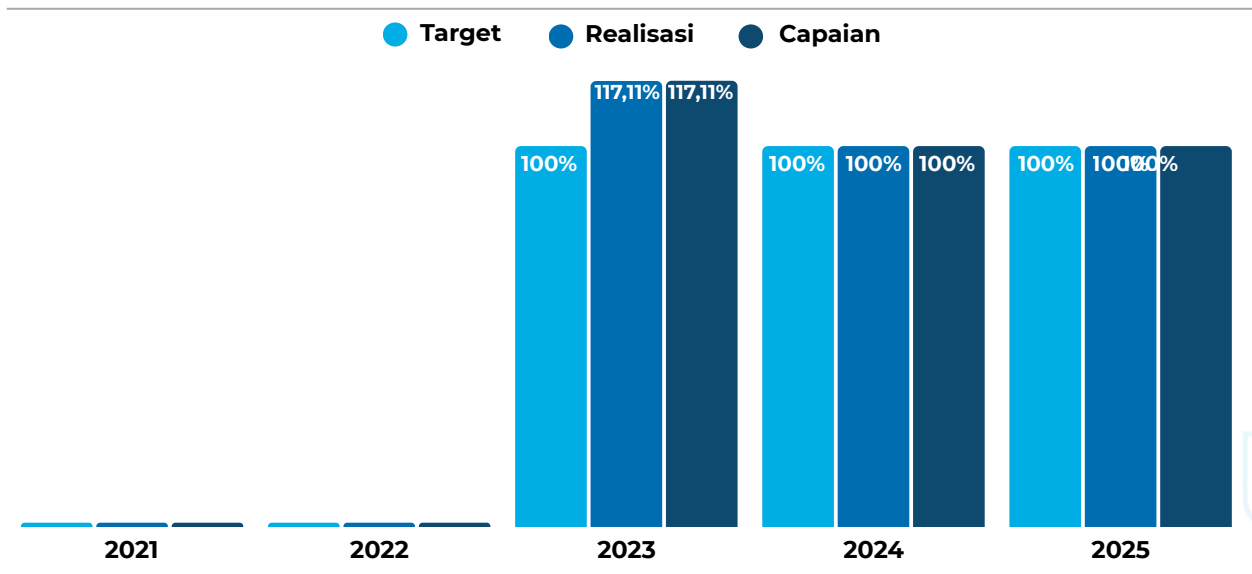
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.13 Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi) Tahun 2025

|           |      |
|-----------|------|
| Target    | 100% |
| Realisasi | 100% |
| Capaian   | 100% |

## Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

**Grafik 3.28**

*Perbandingan Capaian IK-1.13 Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) Tahun 2021-2025*



Pada Tahun 2021–2022 indikator kinerja ini belum ditetapkan sehingga belum terdapat target dan realisasi. Indikator mulai diterapkan pada Tahun 2023 dengan capaian melebihi target (117,17%), yang ditindaklanjuti dengan perbaikan perencanaan, penjadwalan verifikasi, dan standardisasi mekanisme tindak lanjut agar pelaksanaan lebih terukur. Sebagai hasil tindak lanjut tersebut, pada Tahun 2024 dan 2025 capaian kinerja dapat distabilkan sesuai target sebesar 100%. Dampak yang dihasilkan antara lain meningkatnya kepatuhan penyelenggara, berkurangnya temuan ketidaksesuaian berulang, serta tervalidasinya kesesuaian data koordinat *site* pada izin ISR dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga pengawasan dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan akurat di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram.

### Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja tindak lanjut verifikasi *site* ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai (PrimaAksi) didukung oleh perencanaan verifikasi yang sistematis dan terukur, ketersediaan data ISR yang akurat, serta koordinasi yang efektif dengan penyelenggara telekomunikasi. Validasi kesesuaian data koordinat ISR dengan kondisi lapangan, kompetensi sumber daya manusia, serta konsistensi penerapan sanksi sesuai ketentuan turut memastikan seluruh temuan ketidaksesuaian dapat ditindaklanjuti secara tuntas hingga mencapai 100%. Adapun potensi kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya dan tantangan geografis wilayah, yang diantisipasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi monitoring, penguatan koordinasi dan sosialisasi kepatuhan, serta perencanaan pengawasan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

### Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi dicapai melalui perencanaan verifikasi yang terintegrasi dan berbasis risiko, pemanfaatan data ISR yang akurat serta teknologi pemetaan digital untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi lapangan, serta optimalisasi peran sumber daya manusia yang ada. Pendekatan tersebut memungkinkan kegiatan pengawasan dan tindak lanjut dilakukan secara tepat sasaran, efektif, dan terukur tanpa memerlukan penambahan anggaran yang signifikan.

## Rekomendasi Peningkatan Kinerja Tahun berikutnya

Ke depan, diperlukan penguatan pemanfaatan sistem monitoring berbasis digital untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pengawasan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Selain itu, peningkatan koordinasi lintas unit dan sosialisasi kepatuhan kepada penyelenggara perlu terus diintensifkan agar pemenuhan ketentuan teknis dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Di sisi lain, penajaman perencanaan pengawasan yang lebih terarah, terukur, dan berbasis prioritas wilayah maupun tingkat risiko juga menjadi penting. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga capaian kinerja tetap optimal, meningkatkan kualitas pengendalian, sekaligus mendukung keberlanjutan pengawasan spektrum frekuensi radio secara efektif dan efisien.

## Implementasi Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan Indikator Tindak Lanjut Verifikasi *Site* *ISR Microwave Link* yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) mencerminkan penerapan nilai **Akuntabel** melalui proses verifikasi dan penindakan yang dilakukan secara tertib, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan teknis. Nilai **Berorientasi Pelayanan** diwujudkan dengan memberikan kepastian kepada pemegang izin terkait status kepatuhan dan tindak lanjut yang jelas atas ketidaksesuaian *site*, sehingga mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum. Selanjutnya, nilai **Kompeten** tercermin dari kemampuan petugas dalam melakukan analisis teknis dan verifikasi lapangan terhadap jaringan *microwave link*, sementara nilai **Kolaboratif** diwujudkan melalui koordinasi yang efektif dengan pemegang izin dan unit terkait untuk memastikan tindak lanjut dilakukan tepat waktu. Capaian target dan realisasi sebesar 100% menunjukkan komitmen ASN dalam menjaga pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang tertib, aman, dan sesuai regulasi.



Gambar 3.18  
Kegiatan Prima Aksi di Kota Mataram

## IK-2.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Tahun 2025

## Latar Belakang

Pelaksanaan layanan administrasi yang efektif merupakan aspek penting dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Balai Monitor SFR Kelas II Mataram. Untuk memastikan tata kelola yang akuntabel dan transparan, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram mengelola sejumlah layanan administrasi yang meliputi Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Kepegawaian, serta Pengelolaan Persuratan.

Pencapaian indikator kinerja ini memberikan manfaat langsung bagi Balai Monitor SFR Kelas II Mataram, terutama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, efektivitas pelaksanaan program, serta optimalisasi penggunaan sumber daya agar mendukung pencapaian target kinerja secara keseluruhan.

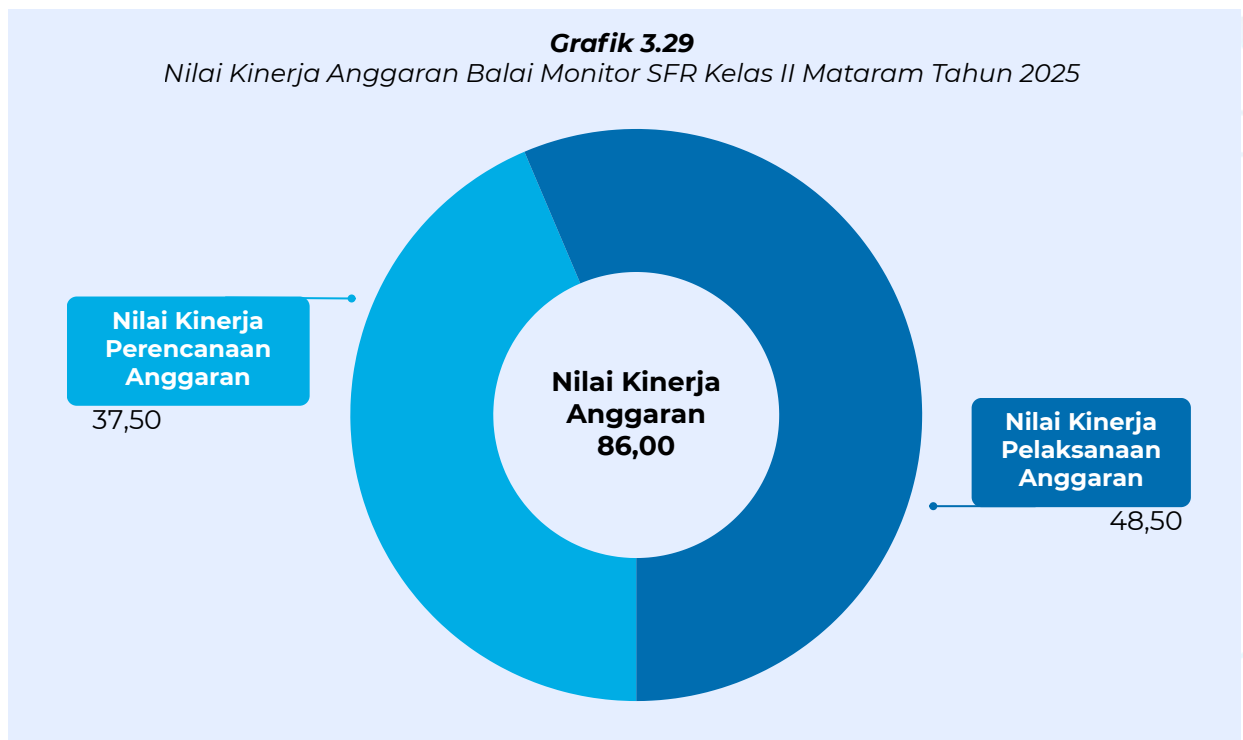
## Capaian Kinerja

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) digunakan untuk mengukur keberhasilan Balai Monitor SFR Kelas II Mataram dalam pengelolaan anggaran yang mencakup aspek perencanaan dan pelaksanaan. NKA dihitung berdasarkan penggabungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (SmartDJA) dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA OMSPAN) dengan bobot masing-masing sebesar 50%, sesuai ketentuan PMK Nomor 62 Tahun 2023.

Pada Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram memperoleh nilai NKA sebesar 86,00 dari target 86,95, dengan tingkat capaian 98,91%. Dari sisi realisasi anggaran, pagu anggaran non-blokir sebesar **Rp4.906.127.000** telah terealisasi sebesar **Rp4.870.012.912** atau **99,26%**. Tingkat penyerapan yang sangat tinggi ini mencerminkan pelaksanaan anggaran yang efektif dan terkendali, serta konsisten dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Grafik 3.29

Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Tahun 2025



**Grafik 3.30**

*Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-2.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Tahun 2025*

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>Target</b>    | <b>86,95</b> |
| <b>Realisasi</b> | <b>86,00</b> |
| <b>Capaian</b>   | <b>98,91</b> |

### Capaian Kinerja Perencanaan Anggaran (Smart DJA)

Nilai kinerja perencanaan anggaran belum mencapai target optimal dengan perolehan nilai 75. Kondisi ini disebabkan oleh adanya blokir efisiensi pagu anggaran yang membatasi fleksibilitas perencanaan serta kodefikasi rincian output Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) dengan unit kerja pada struktur organisasi baru di lingkungan Ditjen Infrastruktur Digital. Ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan rincian output SBKK tidak dapat dinilai dan tidak terpenuhinya ketentuan dispensasi penilaian kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/AG/2025, sehingga berdampak langsung pada capaian nilai kinerja anggaran secara keseluruhan.

**Tabel 3.24**

*Capaian Kinerja Perencanaan Anggaran Berdasarkan Smart DJA Tahun 2025*

| <b>Aspek Penilaian</b>                  | <b>Realisasi</b> | <b>Bobot</b> | <b>Capaian</b> |
|-----------------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| Capaian Rincian Output (CRO)            | 100              | 75%          | 75             |
| Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) | 0                | 10%          | 0              |
| Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK)  | 0                | 15%          | 0              |

### Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OM-SPAN)

Kinerja pelaksanaan anggaran merupakan hasil rata-rata capaian antara satuan kerja SOTK lama (654162) dan satuan kerja SOTK baru (694716) dengan nilai kumulatif sebesar 48,50. Satker SOTK lama mencatatkan nilai IKPA sebesar 97,51, sedangkan satker SOTK baru memperoleh nilai IKPA sebesar 96,50, yang secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada kedua satker berjalan sangat baik. Kondisi tersebut didukung oleh tingkat penyerapan anggaran yang optimal, perencanaan dan realisasi kegiatan yang relatif tepat waktu, serta pengelolaan administrasi dan keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan mampu menghasilkan output yang selaras dengan target yang telah ditetapkan, sehingga mendukung efektivitas penggunaan anggaran. Capaian kinerja pelaksanaan anggaran tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram Tahun 2025 secara keseluruhan.

**Tabel 3.25**

Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kode Satker Lama (654162), Tahun 2025

| Indikator                           | Aspek Penilaian                 | Realisasi | Bobot | Capaian |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------|---------|
| Kualitas Perencanaan Anggaran       | Capaian Rincian Output (CRO)    | 100       | 10%   | 10      |
|                                     | Deviasi Hal. 3 DIPA             | 92,6      | 15%   | 13,89   |
|                                     | Penyerapan Anggaran             | 95,57     | 20%   | 19,11   |
| Kualitas Pelaksanaan Anggaran       | Belanja Kontraktual             | 0         | 10%   | 0       |
|                                     | Penyelesaian Tagihan            | 0         | 10%   | 0       |
|                                     | Pengelolaan UP dan TUP          | 100       | 10%   | 10      |
| Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Dispensasi SPM & Capaian Output | 100       | 25%   | 25      |
| Total Nilai                         |                                 |           |       | 78      |
| Konversi Bobot                      |                                 |           |       | 80%     |
| Nilai Akhir                         |                                 |           |       | 97,51   |

**Tabel 3.26**

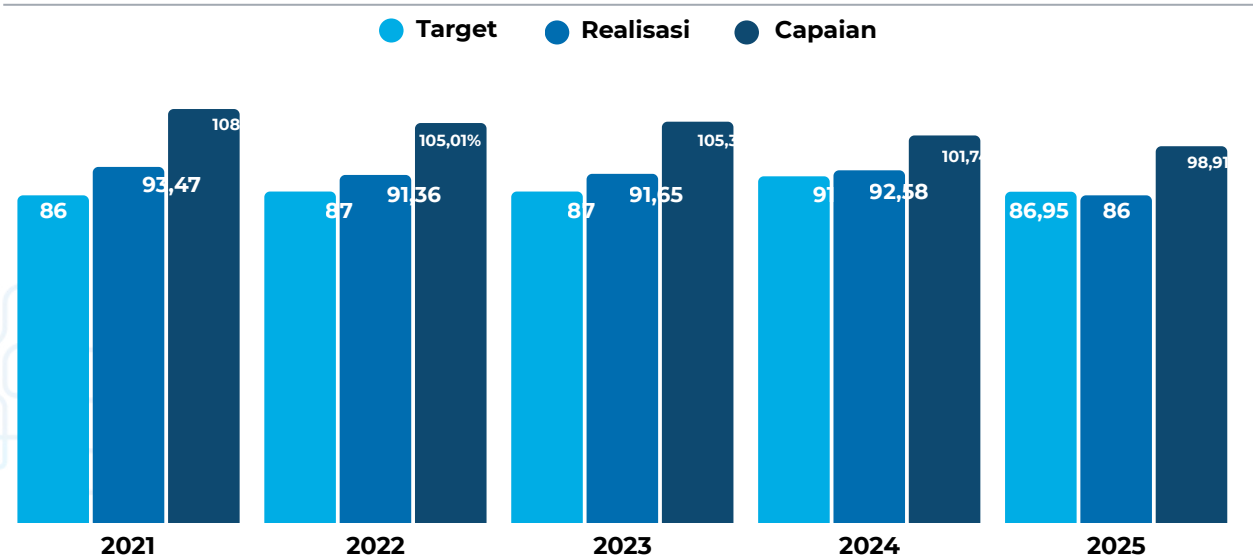
Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kode Satker Baru (694716), Tahun 2025

| Indikator                           | Aspek Penilaian                 | Realisasi | Bobot | Capaian |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------|---------|
| Kualitas Perencanaan Anggaran       | Capaian Rincian Output (CRO)    | 100       | 10%   | 10      |
|                                     | Deviasi Hal. 3 DIPA             | 92,5      | 15%   | 13,88   |
|                                     | Penyerapan Anggaran             | 88,48     | 20%   | 17,7    |
| Kualitas Pelaksanaan Anggaran       | Belanja Kontraktual             | 100       | 10%   | 10      |
|                                     | Penyelesaian Tagihan            | 100       | 10%   | 10      |
|                                     | Pengelolaan UP dan TUP          | 99,2      | 10%   | 9,93    |
| Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Dispensasi SPM & Capaian Output | 100       | 25%   | 25      |
| Total Nilai                         |                                 |           |       | 96,5    |
| Konversi Bobot                      |                                 |           |       | 100%    |
| Nilai Akhir                         |                                 |           |       | 96,5    |

## Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

**Grafik 3.30**

Perbandingan Capaian IK-2.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Tahun 2021-2025



Menindaklanjuti capaian NKA tahun-tahun sebelumnya yang konsisten melampaui target, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram berupaya terus memperkuat kualitas pelaksanaan anggaran, pengendalian penyerapan, serta tertib administrasi keuangan, termasuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi dan perubahan SOTK pada Tahun 2025. Kinerja pelaksanaan anggaran tetap terjaga dengan capaian IKPA yang sangat baik, sehingga NKA Tahun 2025 mencapai 86,00 atau 98,91% dari target. Namun, target belum tercapai sepenuhnya akibat belum optimalnya kinerja perencanaan anggaran yang dipengaruhi blokir efisiensi dan ketidaksesuaian kodefikasi SBKK, yang menjadi fokus perbaikan pada tahun berikutnya.

### Faktor Penyebab Tidak Maksimalnya Keberhasilan

Capaian NKA Tahun 2025 belum maksimal disebabkan oleh belum optimalnya kinerja perencanaan anggaran akibat adanya blokir efisiensi pagu serta ketidaksesuaian kodefikasi rincian output SBKK, sehingga tidak memenuhi persyaratan dispensasi penilaian kinerja perencanaan anggaran. Sebagai alternatif solusi, perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan kodefikasi SBKK sejak tahap perencanaan, meningkatkan koordinasi dengan unit teknis dan DJA, serta memperkuat pengendalian perencanaan anggaran agar memenuhi ketentuan penilaian Smart DJA. Di samping itu, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram tetap mengupayakan untuk tercapainya target NKA dengan didukung oleh kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik, penyerapan anggaran yang optimal, tertib administrasi keuangan, serta komitmen dan koordinasi seluruh pegawai dalam melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

### Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi diwujudkan melalui pengendalian belanja, optimalisasi penyerapan anggaran sesuai kebutuhan riil, serta penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi yang berlaku tanpa mengurangi kualitas capaian output kegiatan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengutamakan prioritas kegiatan yang berdampak langsung terhadap kinerja layanan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan nilai manfaat yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Rekomendasi Peningkatan Kinerja Tahun berikutnya

Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui penyelarasan kodefikasi SBKK sejak awal, memperkuat koordinasi dengan unit terkait, serta melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara berkala untuk mendorong peningkatan nilai kinerja anggaran.

## Implementasi Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Tahun 2025 mencerminkan penerapan nilai **Akuntabel** melalui keterbukaan dalam mengevaluasi penyebab belum tercapainya target kinerja anggaran. Nilai **Kompeten** diwujudkan melalui upaya perbaikan perencanaan, termasuk penyesuaian kodefikasi SBKK dan pemenuhan ketentuan penilaian Smart DJA. Nilai **Kolaboratif** tercermin dari koordinasi dengan unit teknis dan DJA dalam penguatan perencanaan dan pengendalian anggaran, sementara nilai **Loyal** terlihat dari komitmen seluruh pegawai dalam menjaga pelaksanaan dan administrasi anggaran tetap tertib dan optimal sesuai ketentuan.

### IK-2.2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2025

## Latar Belakang

Indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas dan kepatuhan satuan kerja dalam pengelolaan APBN. Penyusunan laporan keuangan pemerintah dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PMK Nomor 233/PMK.05/2011, yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tertib, akurat, dan tepat waktu, termasuk pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Pelaporan keuangan dilaksanakan secara berkala pada Semester I, Semester II, dan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan penerapan prinsip transparansi serta tata kelola pemerintahan yang baik.

## Capaian Kinerja

Penilaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA Tahun 2025 dilakukan dengan mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK TA 2024, Nota Kesepakatan Angka Asersi Final LKKL TA 2024, serta Laporan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2024. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target nilai yang ditetapkan sebesar 97.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Balmon SFR Kelas II Mataram memperoleh nilai 100, yang mencerminkan tidak adanya transaksi koreksi audit yang signifikan, tidak terdapat kesalahan penganggaran material, saldo kas akhir tahun nihil, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan PIPK, serta hasil penilaian pengendalian intern yang efektif. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 103,09%, melampaui target yang telah ditetapkan dan menunjukkan kualitas pelaporan keuangan yang sangat baik. Dari sisi anggaran, pagu anggaran non-blokir sebesar **Rp71.874.000** terealisasi **Rp70.974.000** atau sebesar **98,75%**. Tingkat realisasi ini menunjukkan dukungan anggaran yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelaporan keuangan, termasuk rekonsiliasi, penyusunan laporan, serta penguatan pengendalian intern.

**Tabel 3.27**  
Indikator-indikator Penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Tahun 2025

| No | Indikator                                                         | Metode Penilaian |                  |                 |         |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|-------------------|
|    |                                                                   | Bobot            | Faktor Pengurang | Nilai Pengurang |         | Nilai Kualitas LK |
|    |                                                                   |                  |                  | 4=3x2           | 5=4x100 |                   |
|    | <b>Indeks</b>                                                     |                  |                  |                 |         | <b>100</b>        |
| 1  | Jumlah transaksi koreksi audit                                    | 50%              |                  |                 | -50     |                   |
|    | - Jumlah transaksi koreksi audit 0 s.d 5                          |                  | 0%               | 0%              | 0       |                   |
|    | - Jumlah transaksi koreksi audit 6 s.d 10                         |                  | -5%              | -3%             | -2,5    |                   |
|    | - Jumlah transaksi koreksi audit 11 s.d 15                        |                  | -15%             | -8%             | -7,5    |                   |
|    | - Jumlah transaksi koreksi audit 16 s.d 20                        |                  | -30%             | -15%            | -15     |                   |
|    | - Jumlah transaksi koreksi audit lebih dari 20                    |                  | -50%             | -25%            | -25     |                   |
| 2  | Kesalahan penganggaran berdasarkan LHP BPK                        | 20%              |                  |                 | 20      |                   |
|    | - Kesalahan akun Rp0 - Rp150jt                                    |                  | 0%               | 0%              | 0       |                   |
|    | - Kesalahan akun di atas Rp150jt – Rp300jt                        |                  | -5%              | -3%             | -1      |                   |
|    | - Kesalahan akun di atas Rp300jt – Rp600jt                        |                  | -15%             | -8%             | -3      |                   |
|    | - Kesalahan akun di atas Rp600jt -1,2Miliar                       |                  | -30%             | -15%            | -6      |                   |
|    | - Kesalahan akun di atas 1,2Miliar                                |                  | -50%             | -25%            | 10      |                   |
| 3  | Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan akhir tahun         | 10%              |                  |                 | -10     |                   |
|    | - Tidak terdapat saldo kas                                        |                  | 0%               | 0%              | 0       |                   |
|    | - Terdapat saldo kas                                              |                  | -100%            | -10%            | -10     |                   |
| 4  | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Entitas Pelaporan | 5%               |                  |                 | -5      |                   |
|    | - Sesuai/belum tanggal yang ditetapkan                            |                  | 0%               | 0%              | 0       |                   |
|    | - Melebihi tanggal yang ditetapkan                                |                  | -100%            | -5%             | -5      |                   |

\*lanjutan tabel 3.27

| No        | Indikator                                                                     | Metode Penilaian |                  |                 |         |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|-------------------|
|           |                                                                               | Bobot            | Faktor Pengurang | Nilai Pengurang |         | Nilai Kualitas LK |
|           |                                                                               |                  |                  | 4=3x2           | 5=4x100 |                   |
| 5         | Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan                   | 10%              |                  |                 | -10     |                   |
|           | - Efektif                                                                     |                  | 0%               | 0%              | 0       |                   |
|           | - Efektif dengan pengecualian                                                 |                  | -30%             | -3%             | -3      |                   |
|           | - Mengandung kelemahan material                                               |                  | -70%             | -7%             | -7      |                   |
| 6         | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Penilaian PIPK ke Entitas Pelaporan | 5%               |                  |                 | -5      |                   |
|           | - Sesuai/sebelum tanggal yang ditetapkan                                      |                  | 0%               | 0%              | 0       |                   |
|           | - Melebihi tanggal yang ditetapkan                                            |                  | -100%            | -5%             | -5      |                   |
| <b>II</b> | <b>Nilai akhir</b>                                                            | <b>100</b>       |                  |                 |         | <b>100</b>        |

**Grafik 3.31**

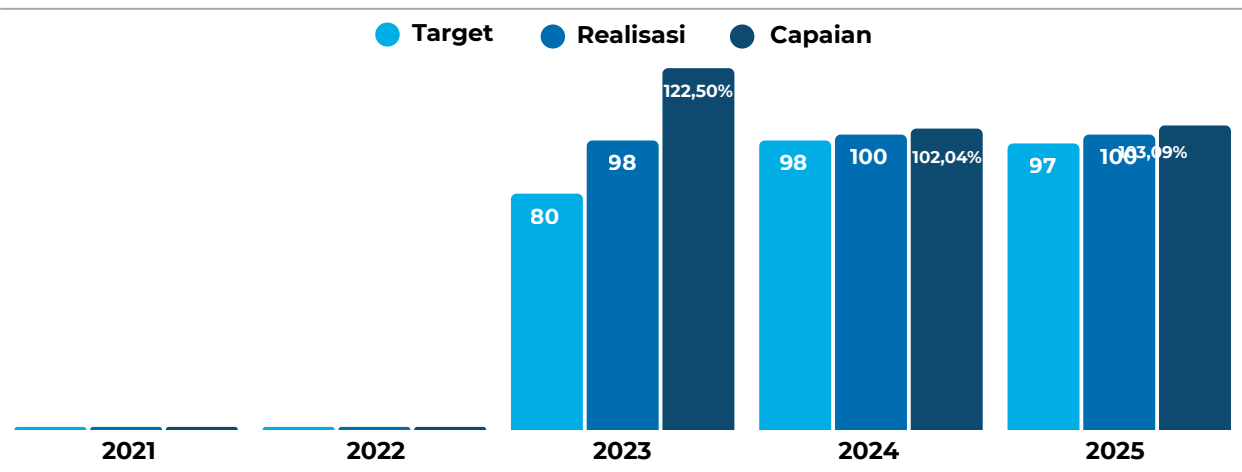
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-2.2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2025

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>Target</b>    | <b>97</b>      |
| <b>Realisasi</b> | <b>100</b>     |
| <b>Capaian</b>   | <b>103,09%</b> |

## Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

**Grafik 3.32**

Perbandingan Capaian IK-2.2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2021-2025



Sebagai tindak lanjut atas capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA pada tahun-tahun sebelumnya, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram secara konsisten melakukan penguatan PIPK, peningkatan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, serta perbaikan berkelanjutan atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rekonsiliasi, penertiban pengelolaan BMN, penguatan kompetensi SDM pengelola keuangan, serta pengawasan internal terhadap ketepatan waktu dan akurasi penyampaian laporan keuangan, proses rekonsiliasi, serta penguatan pengendalian internal pelaporan keuangan. Upaya tersebut berdampak pada peningkatan dan konsistensi kualitas pelaporan keuangan yang tercermin dari capaian kinerja sejak tahun 2023–2025 yang melampaui target, meningkatnya akuntabilitas dan transparansi, serta menurunnya risiko kesalahan dan koreksi audit.

### Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA didukung oleh kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas pengendalian intern pelaporan keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan, serta komitmen pimpinan dan seluruh pengelola keuangan dalam menjaga kualitas pelaporan. Capaian tersebut juga ditunjang oleh koordinasi yang efektif antara pengelola keuangan dan BMN, penerapan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi, serta pelaksanaan pengawasan internal secara konsisten. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja, dilakukan penguatan reviu internal secara berkala, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan guna meminimalkan kesalahan pencatatan dan potensi koreksi audit.

### Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya dalam indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA Balai Monitor SFR Kelas II Mataram melalui optimalisasi peran SDM yang ada, pembagian tugas yang jelas, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan secara maksimal tanpa penambahan anggaran. Pengelolaan pelaporan keuangan dilakukan secara terintegrasi dan tepat waktu, didukung oleh proses rekonsiliasi yang efektif, penertiban pengelolaan BMN, serta penguatan PIPK.

### Rekomendasi Peningkatan Kinerja Tahun Berikutnya

Pada tahun berikutnya, diperlukan penguatan PIPK serta penguatan mekanisme pengendalian atas proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan perlu terus dilakukan melalui bimbingan teknis dan pembaruan pemahaman regulasi agar mampu merespons dinamika kebijakan dan sistem pelaporan keuangan. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan integrasi data, ketepatan waktu, dan akurasi laporan.

### Implementasi Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan Indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA mencerminkan penerapan nilai **Akuntabel** melalui kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan, serta efektivitas pengendalian intern pelaporan keuangan. Nilai **Kompeten** tercermin dari kemampuan pengelola keuangan dan BMN dalam mengelola serta menyajikan laporan keuangan secara andal, didukung oleh pemanfaatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Selain itu, nilai **Kolaboratif** terlihat dari koordinasi yang efektif antar pengelola keuangan, pengelola BMN, dan pimpinan unit kerja dalam menjaga kualitas pelaporan, serta nilai **Loyal** melalui komitmen bersama untuk mempertahankan kualitas laporan keuangan dan mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram menetapkan pagu awal sebesar Rp13.393.787.000 dengan DIPA No. SP DIPA- 059.03.2.654162/2025, tanggal 2 Desember 2024 yang terdiri dari sumber dana rupiah murni sebesar Rp4.274.160.000,- dan PNPB sebesar Rp9.119.627.000. Dengan berlakunya SOTK baru, DIPA terbagi menjadi dua, yaitu Rp3.784.272.000 untuk DIPA lama (kode satker 654162) dan Rp9.609.515.000 untuk DIPA baru (kode satker 694716) dengan DIPA No. SP DIPA- 059.09.2.694716/2025, tanggal 8 Juli 2025, yang terdiri dari sumber dana rupiah murni sebesar Rp1.946.530.000,- dan PNPB sebesar Rp7.662.985.000,-. Selanjutnya, adanya blokir efisiensi dan realokasi anggaran menjadikan total pagu DIPA Tahun 2025 sebesar Rp8.783.430.000, termasuk blokir efisiensi sebesar Rp2.177.912.000.

**Dari total pagu anggaran sebesar Rp9.609.515.000, dilakukan optimalisasi dan realokasi anggaran sebesar Rp3.003.997.000 atau setara dengan 31,26%.** Optimalisasi dan realokasi tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target Perjanjian Kinerja serta sasaran kinerja lainnya. Dalam pelaksanaannya, Balmon Mataram menerapkan strategi efisiensi sumber daya manusia dan efisiensi waktu kerja tanpa mengurangi kualitas dan capaian output kegiatan dengan optimal meski dalam kondisi yang kurang ideal. Selain itu, untuk kegiatan pendukung lainnya, dilakukan efisiensi melalui pengalihan metode pelaksanaan kegiatan dari tatap muka menjadi daring (*online*), sehingga tetap menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan penggunaan anggaran yang lebih optimal.

Pada Tahun 2025, dilakukan 8 kali revisi anggaran yang mencakup berbagai perubahan untuk penyesuaian anggaran dan perubahan volume kegiatan yang mempengaruhi jumlah pagu anggaran antara lain:

**Tabel 3.28**  
*Daftar Riwayat Revisi Anggaran Tahun 2025*

| No | Waktu Revisi     | Keterangan Revisi                                                                                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 22 Februari 2025 | Revisi 01<br>Revisi Blokir Efisiensi anggaran                                                      |
| 2  | 14 April 2025    | Revisi 02<br>Revisi Perubahan RPD Hal III DIPA dan Pemuktahiran Data Hasil<br>Revisi POK           |
| 3  | 08 Juli 2025     | Revisi 03<br>Revisi Perubahan SOTK                                                                 |
| 4  | 14 Juli 2025     | Revisi 01 DIPA Baru<br>Revisi Perubahan RPD Hal III DIPA dan Pemuktahiran Data Hasil<br>Revisi POK |
| 5  | 01 Oktober 2025  | Revisi 02 DIPA Baru<br>Revisi Perubahan RPD Hal III DIPA dan Pemuktahiran Data Hasil<br>Revisi POK |
| 6  | 28 Oktober 2025  | Revisi 03 DIPA Baru<br>Revisi Penambahan Pagu Belanja Pegawai (51)                                 |
| 7  | 20 November 2025 | Revisi 4 DIPA Baru<br>Revisi Realokasi Anggaran                                                    |
| 8  | 08 Desember 2025 | Revisi 05 DIPA Baru<br>Revisi Pemuktahiran Data Hasil Revisi POK                                   |

Berikut disajikan rincian lebih lanjut terkait realisasi anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Mataram:

**Tabel 3.29**  
*Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja dan Sumber Dana Tahun 2025*

| Jenis Belanja | Pagu      |           |           | Realisasi |           |           | %     | Sisa      | Blokir    |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
|               | RM        | PNBP      | Total     | RM        | PNBP      | Total     |       |           |           |
| 51            | 1.923.586 | 0         | 1.923.586 | 1.894.069 | 0         | 1.894.069 | 98,47 | 29.517    | 0         |
| 52            | 526.766   | 6.121.828 | 6.648.594 | 513.788   | 4.149.544 | 4.663.332 | 70,14 | 1.985.262 | 1.978.933 |
| 53            | 0         | 211.250   | 211.250   | 0         | 0         | 0         | 0     | 211.250   | 211.250   |
| Total         | 2.450.352 | 6.333.078 | 8.783.430 | 2.407.857 | 4.149.544 | 6.557.401 | 74,66 | 2.226.029 | 2.190.183 |

\*angka dalam ribuan

**Tabel 3.30**  
*Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2025*

| Program                                                             | Pagu          | Realisasi     | %     | Blokir        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 059.09.GL. Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital | 4,785,121,000 | 2,943,685,858 | 61,52 | 1.829.489.000 |
| 059.09.WA. Program Dukungan Manajemen                               | 3,998,309,000 | 3,613,716,659 | 90,38 | 348.423.000   |
| Total                                                               | 8,783,430,000 | 6,557,402,517 | 74,66 | 2.177.912.000 |

**Tabel 3.31**  
*Akumulasi Capaian Output Tahun 2025*

| No | Rincian Output                                                                                                                    | TVRO | RVRO | Capaian |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| 1  | 078 Layanan Dukungan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio UPT (Layanan)                                                            | 1    | 1    | 100     |
| 2  | U35 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Kepulauan (Layanan)                         | 4    | 4    | 100     |
| 3  | U36 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan (Layanan)       | 16   | 16   | 100     |
| 4  | U37 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan (Layanan)       | 7    | 7    | 100     |
| 5  | U38 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kepulauan (Layanan) | 5    | 5    | 100     |
| 6  | U40 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat/Laut Wilayah Kepulauan (Layanan)  | 1    | 1    | 100     |
| 7  | U41 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Kepulauan (Layanan)                   | 1    | 1    | 100     |

\*lanjutan tabel 3.31

| No | Rincian Output                                                                                                                    | TVRO | RVRO | Capaian |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| 8  | U42 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan (Layanan) | 2    | 2    | 100     |
| 9  | U43 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan (Layanan) | 1    | 1    | 100     |
| 10 | CAN.101 Perangkat Monitoring UPT                                                                                                  | 8    | 0    | 0       |
| 11 | CCL.101 Pemeliharaan Alat Monitoring UPT                                                                                          | 1    | 1    | 100     |
| 12 | EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                                                               | 1    | 1    | 100     |
| 13 | EBA.994 Layanan Perkantoran                                                                                                       | 2    | 2    | 100     |
| 14 | EBB.951 Layanan Sarana Internal                                                                                                   | 3    | 0    | 0       |

## Pengelolaan Barang Milik Negara

Barang Milik Negara (BMN) harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Pengelolaan BMN Balai Monitor SFR Kelas II Mataram di Tahun 2025 telah dilakukan melalui aplikasi SIMAN dan SAKTI, yang memungkinkan penatausahaan yang terintegrasi antara arus barang dan uang. Berikut adalah posisi BMN pada neraca per 31 Desember 2025:

**Tabel 3.32**  
*Posisi Barang di Neraca Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Tahun 2025*

| AKUN NERACA |                                          | Jumlah           |
|-------------|------------------------------------------|------------------|
| Kode        | Uraian                                   |                  |
| 117111      | Barang Konsumsi                          | 31.610.050       |
| 131111      | Tanah                                    | 3.773.996.000    |
| 132111      | Peralatan dan Mesin                      | 43.905.667.770   |
| 133111      | Gedung dan Bangunan                      | 7.410.314.805    |
| 134111      | Jalan dan Jembatan                       | 33.970.000       |
| 134112      | Irigasi                                  | 228.325.000      |
| 134113      | Jaringan                                 | 139.064.000      |
| 137111      | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (31.896.235.774) |
| 137211      | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (963.391.631)    |
| 137311      | Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan  | (33,970,000)     |

\*lanjutan tabel 3.32

| AKUN NERACA |                               | Jumlah          |
|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Kode        | Uraian                        |                 |
| 162191      | Aset Tak Berwujud Lainnya     | 22.200.000      |
| 137312      | Akumulasi Penyusutan Irigasi  | (102,746,250)   |
| 137313      | Akumulasi Penyusutan Jaringan | (109,241,750)   |
| 162151      | Software                      | 3,452,986,709   |
| 162161      | Lisensi                       | 50,128,570      |
| 169315      | Akumulasi Amortisasi Software | (2.872.277.659) |
| 169316      | Akumulasi Amortisasi Lisensi  | (50.128.570)    |
| J U M L A H |                               | 23.020.271.270  |

### Penghapusan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2025, telah dilakukan proses penghapusan berdasarkan risalah lelang dari KPKNL Mataram Nomor 199/14.03/2025-01, tanggal 20 November 2025, berupa peralatan dan mesin sebagai mana tabel berikut ini:

**Tabel 3.33**  
Aset Balai Monitor SFR Kelas II Mataram yang Dihapuskan Tahun 2025

| No | Nama Aset BMN                          | Jumlah Aset |
|----|----------------------------------------|-------------|
| 1  | Laptop                                 | 5 unit      |
| 2  | Scaner                                 | 3 unit      |
| 3  | Printer                                | 3 Unit      |
| 4  | CCTV                                   | 1 Unit      |
| 5  | Telephone (PABX)                       | 1 Unit      |
| 6  | Sweep Oscillator (Alat Ukur Universal) | 1 Unit      |
| 7  | Frequency Counter (Universal Tester)   | 1 Unit      |
| 8  | Cable                                  | 1 Unit      |
| 9  | Unit Tranceiver VHF Portable           | 3 Unit      |
| 10 | Antene UHF                             | 3 Unit      |
| 11 | Sound System                           | 1 Unit      |

\*lanjutan tabel 3.33

| No | Nama Aset BMN         | Jumlah Aset |
|----|-----------------------|-------------|
| 12 | Sice                  | 1 Unit      |
| 13 | Lemari Besi           | 8 Unit      |
| 14 | Lemari Kayu           | 1 Unit      |
| 15 | Vacuum Cleaner        | 2 Unit      |
| 16 | Rak Kayu              | 1 Unit      |
| 17 | Rak Besi              | 1 Unit      |
| 18 | Filling Cabinet Besi  | 2 Unit      |
| 19 | Brandkas              | 2 Unit      |
| 20 | Alat Penghancur Kerta | 1 Unit      |
| 21 | Mesin Absensi         | 1 Unit      |
| 22 | Dispenser             | 2 Unit      |
| 23 | Meja Kerja            | 15 Unit     |
| 24 | Kursi Besi            | 35 Unit     |
| 25 | Meja Rapat            | 2 Unit      |
| 26 | Meja Resepsionis      | 1 Unit      |
| 27 | Partisi               | 4 Set       |
| 28 | Gordyin/Kray          | 28 buah     |

#### Penetapan Status Penggunaan (PSP)

Pada Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram telah melaksanakan penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP) sebagai bagian dari upaya tertib administrasi dan penguatan tata kelola aset negara. Dalam periode tersebut, telah diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (SK PSP) untuk sebanyak 28 item BMN, yang terdiri atas 24 item barang dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100 juta dan 4 item barang dengan nilai perolehan di atas Rp100 juta. Penetapan status penggunaan ini dilakukan untuk memastikan kejelasan legalitas pemanfaatan BMN, mendukung optimalisasi penggunaan aset sesuai tugas dan fungsi satuan kerja, serta sebagai dasar pengamanan dan pengawasan BMN secara akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

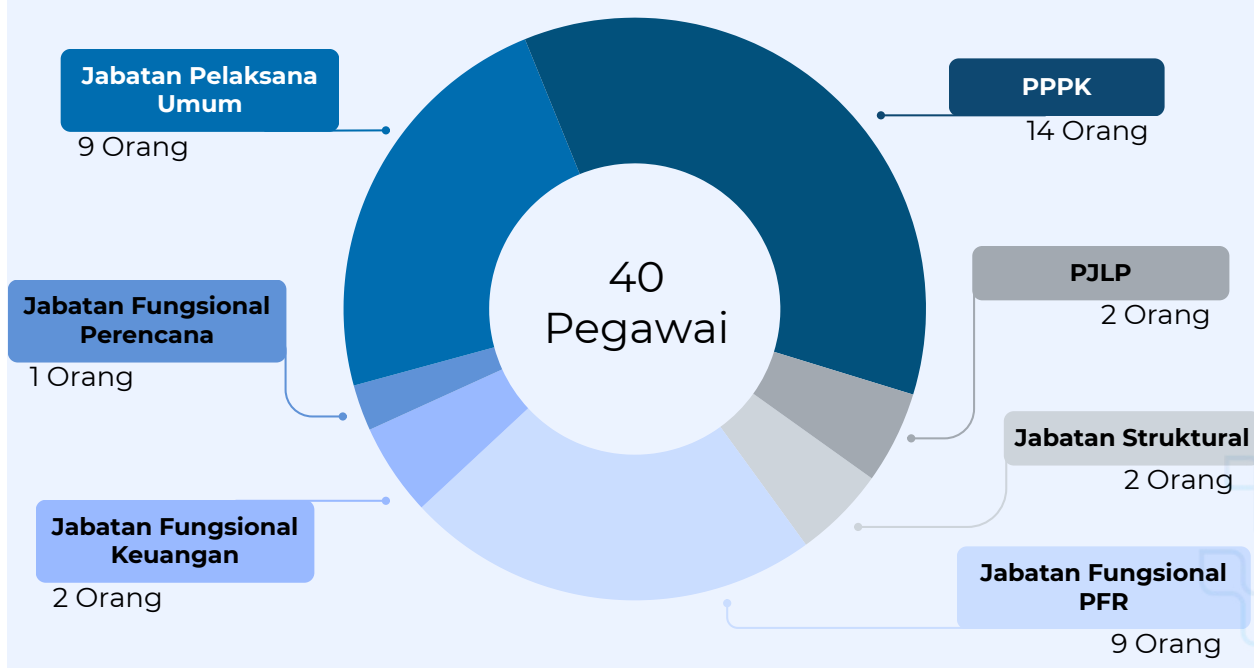
## Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Pengelolaan administrasi kepegawaian di Balai Monitor Mataram bertujuan untuk menata dan mengelola sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai, serta untuk memaksimalkan potensi dan kesejahteraan pegawai. Pada Tahun 2025, jumlah pegawai yang bekerja di Balai Monitor SFR Kelas II Mataram tercatat sebanyak 40 orang, yang terdiri dari:

- 24 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil)
- 14 orang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
- 2 orang pegawai PJLP (Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan)

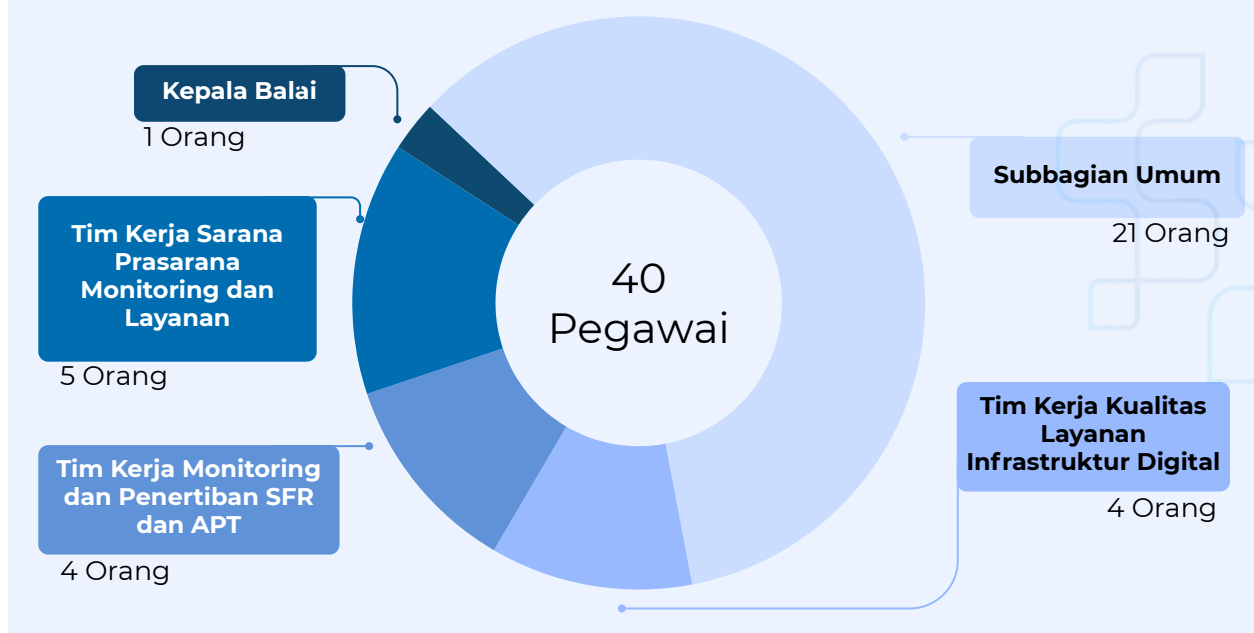
**Grafik 3.33**

*Komposisi Pegawai Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Berdasarkan Jabatan*



**Grafik 3.34**

*Komposisi Pegawai Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Berdasarkan Penempatan*



**Tabel 3.34***Daftar Kenaikan Pangkat/Golongan Pegawai Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Tahun 2025*

| Bulan    | Nama Pegawai            | Pangkat/Gol. Lama | Pangkat/Gol. Baru |
|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Februari | Abdurrahim              | III/c             | III/d             |
|          | Rina Arlina             | III/c             | III/d             |
| April    | Mastunah Riani          | III/c             | III/d             |
|          | Anna Nuraeni            | III/c             | III/d             |
| Oktober  | Luqman Hakim            | II/d              | III/a             |
| November | Herlin Kurnia Wulandari | III/b             | III/c             |
| Desember | I Made Adi Sanjaya      | III/a             | III/b             |

**Tabel 3.35***Daftar Kenaikan Jabatan Pegawai Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Tahun 2025*

| TMT             | Nama Pegawai            | Jabatan Lama    | Jabatan Baru    |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 01 April 2025   | Luqman Hakim            | JF PFR Terampil | JF PFR Mahir    |
| 01 Oktober 2025 | Herlin Kurnia Wulandari | JF PFR Mahir    | JF PFR Penyelia |

**Tabel 3.36***Daftar Pengangkatan PPPK Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Tahun 2025*

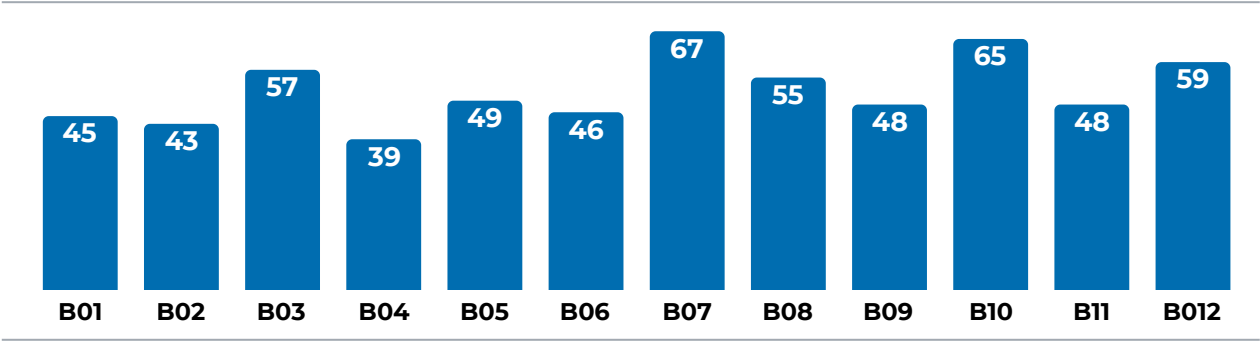
| Tahap         | Jumlah Pegawai  | Jabatan Lama                 |
|---------------|-----------------|------------------------------|
| Tahap I       | 3 Orang         | Pengangkatan PPPK Tahun 2025 |
| Tahap II      | 11 Orang        | Pengangkatan PPPK Tahun 2025 |
| <b>Jumlah</b> | <b>14 Orang</b> |                              |

## Pengelolaan Persuratan

Pengelolaan administrasi persuratan di Balai Monitor SFR Kelas II Mataram merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran komunikasi dan koordinasi antar unit kerja maupun dengan pihak eksternal. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan seluruh surat masuk dan surat keluar, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dapat dikelola secara efektif, efisien, tertib, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan kearsipan dan tata naskah dinas. Pada Tahun 2025, pengelolaan persuratan di Balai Monitor SFR Kelas II Mataram dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu secara konvensional dan dengan memanfaatkan aplikasi SiMaya (Sistem Manajemen Administrasi dan Persuratan). Selain itu terdapat 30.104 usul surat yang dimusnahkan dari periode 1997 sampai tahun 2018.

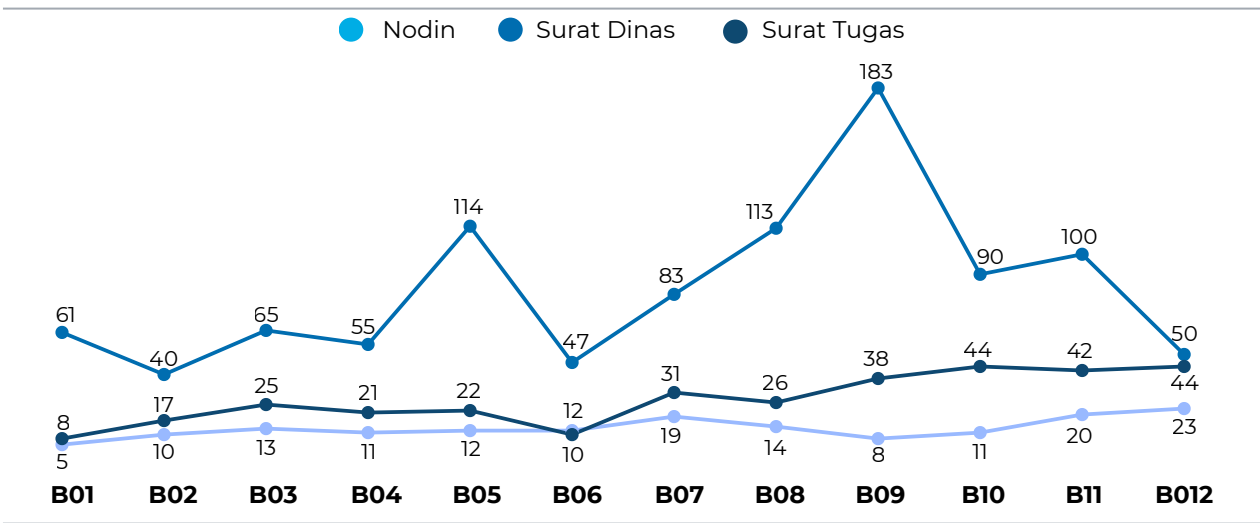
Pada tahun 2025, surat masuk yang diterima oleh Balai Monitor SFR Kelas II Mataram sebanyak 621 surat, dengan tren sebagai berikut:

**Grafik 3.35**  
Tren Surat Masuk Tahun 2025



Selain surat masuk, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram telah mengeluarkan surat dengan total 1.484 surat, yang terdiri dari nota dinas sebanyak 158 surat, surat dinas sebanyak 998 surat, dan surat tugas sebanyak 328 surat. Tren surat keluar disajikan sebagai berikut:

**Grafik 3.10**  
Tren Surat Keluar Tahun 2025



### Pengelolaan Barang dan Jasa

Pada Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram melaksanakan pengadaan barang dan jasa sebanyak 47 paket pekerjaan. Pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui metode *e-purchasing* sebanyak 7 paket, pengadaan langsung 35 paket, dan pengadaan dikecualikan sebanyak 5 paket, serta tanpa pelaksanaan lelang. Berdasarkan jenis pengadaan, terdiri atas 8 paket pekerjaan konstruksi, 6 paket pengadaan barang, dan 33 paket jasa lainnya. Seluruh paket pengadaan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 3.37**  
Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Metode dan Jenis Tahun 2025

| Jumlah Paket | Metode Pemilihan |                    |                        |        | Jenis Pengadaan      |        |              |
|--------------|------------------|--------------------|------------------------|--------|----------------------|--------|--------------|
|              | E-Purchasing     | Pengadaan Langsung | Pengadaan Dikecualikan | Lelang | Pekerjaan Konstruksi | Barang | Jasa Lainnya |
| 40           | 7                | 28                 | 5                      | 0      | 8                    | 0      | 32           |

### 3.4 BENCHMARK KINERJA

**Tabel 3.37**

Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Balmon Mataram dengan Balmon Surabaya Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja Sasaran Strategis                                                                     | Balmon SFR Kelas II Mataram |           |         | Balmon SFR Kelas I Surabaya |           |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
|    |                                                                                                         | Target                      | Realisasi | Capaian | Target                      | Realisasi | Capaian |
| I  | Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio                               |                             |           |         |                             |           |         |
| 1  | Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio                                           | 80%                         | 100%      | 125%    | 80%                         | 126,70%   | 158,38% |
| 2  | Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio                                                                | 100%                        | 100%      | 100%    | 100%                        | 100%      | 100%    |
| 3  | Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio                                             | 95%                         | 100%      | 105,26% | 95%                         | 100%      | 105,26% |
| 4  | Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital      | 75%                         | 100%      | 133,33% | 75%                         | 100%      | 133,33% |
| 5  | Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT | 85%                         | 98,96%    | 116,42% | 85%                         | 100%      | 117,65% |
| 6  | Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif                                                    | 80%                         | 100%      | 125%    | 80%                         | 100%      | 125%    |
| 7  | Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan                                       | 100%                        | 125%      | 125%    | 100%                        | 122,58%   | 122,58% |
| 8  | Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)                   | 100%                        | 208,33%   | 100%    | 100%                        | 133,33%   | 133,33% |
| 9  | Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio                                       | 100%                        | 100%      | 100%    | 100%                        | 100%      | 100%    |
| 10 | Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik                                                             | 100%                        | 100%      | 100%    | 100%                        | 100%      | 100%    |
| 11 | Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)                                  | 100%                        | 123,44%   | 123,44% | 100%                        | 113,75%   | 113,75% |
| 12 | Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/iPAK))                              | 100%                        | 110,56%   | 110,56% | 100%                        | 100%      | 100%    |
| 13 | Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)           | 100%                        | 100%      | 100%    | 100%                        | 100%      | 100%    |
| II | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien                 |                             |           |         |                             |           |         |
| 14 | Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025                                                            | 86,95                       | 86,00     | 98,91   | 86,95                       | 84,47     | 97,15   |
| 15 | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)                        | 97,00                       | 100       | 103,09  | 97,00                       | 100       | 103,09  |

Berdasarkan hasil *benchmark* terhadap capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025, secara umum Balmon SFR Kelas II Mataram dan Balmon SFR Kelas I Surabaya menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan mayoritas indikator mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio

Pada sasaran strategis ini, kedua unit kerja sama-sama berhasil memenuhi target pada seluruh indikator. Hasil *benchmark* menunjukkan pada sasaran strategis ini, kedua unit kerja berada pada kategori kinerja sangat baik, ditandai dengan seluruh indikator telah mencapai target dan sebagian besar melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan perbedaan tingkat capaian sebagai berikut:

- Indikator Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Balmon SFR Kelas I Surabaya menunjukkan capaian lebih tinggi (158,38%) dibandingkan Balmon SFR Kelas II Mataram (125%). Perbedaan capaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh perbedaan cakupan wilayah kerja, di mana Balmon SFR Kelas I Surabaya melayani wilayah yang lebih luas dibandingkan Balmon SFR Kelas II Mataram.
- Indikator Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan. Balmon SFR Kelas II Mataram menunjukkan capaian lebih tinggi (125%) dibandingkan Balmon SFR Kelas I Surabaya (122,58%), yang mengindikasikan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data kualitas layanan di Balmon SFR Kelas II Mataram.
- Indikator Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR/MOTS-IKRAN), Balmon SFR Kelas II Mataram mencatat capaian yang jauh melampaui target (208,33%), lebih tinggi dibandingkan Balmon SFR Kelas I Surabaya (108,33%). Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan layanan sertifikasi operator radio di wilayah kerja Balmon SFR Kelas II Mataram serta optimalnya penyelenggaraan layanan sertifikasi.
- Indikator Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR/MOTS-IKRAN), Balmon SFR Kelas II Mataram mencatat capaian yang jauh melampaui target (208,33%), lebih tinggi dibandingkan Balmon SFR Kelas I Surabaya (108,33%). Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan layanan sertifikasi operator radio di wilayah kerja Balmon SFR Kelas II Mataram serta optimalnya penyelenggaraan layanan sertifikasi.

Adapun indikator lainnya, meliputi pemeriksaan stasiun radio, penanganan gangguan spektrum frekuensi radio, kepatuhan standar teknis perangkat telekomunikasi dan digital, terjaganya operasional stasiun monitor, penanganan sanksi denda administratif, penanganan piutang BHP frekuensi radio, sosialisasi pelayanan publik, serta tindak lanjut verifikasi *site* ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai (PrimaAksi), seluruhnya telah mencapai target pada kedua unit kerja, yang menunjukkan konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan.

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien

Pada sasaran strategis ini, hasil *benchmark* menunjukkan bahwa kinerja tata kelola kedua Balmon berada pada kategori sangat baik.

- Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025 menunjukkan capaian Balmon SFR Kelas II Mataram sebesar 98,91%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Balmon SFR Kelas I Surabaya sebesar 97,15%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian anggaran yang relatif lebih optimal.

- Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025 menunjukkan capaian Balmon SFR Kelas II Mataram sebesar 98,91%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Balmon SFR Kelas I Surabaya sebesar 97,15%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian anggaran yang relatif lebih optimal.

Secara umum, kinerja Balmon SFR Kelas II Mataram dan Balmon SFR Kelas I Surabaya telah berjalan efektif dan akuntabel. Balmon SFR Kelas II Mataram menunjukkan keunggulan pada indikator layanan sertifikasi operator radio, kualitas layanan publik, integritas pelayanan, pengelolaan data kualitas layanan, serta kinerja anggaran, sementara Balmon SFR Kelas I Surabaya unggul pada indikator monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio. Hasil *benchmark* ini menjadi dasar penguatan praktik baik dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

### 3.5 KINERJA LAINNYA

Selain kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram juga telah melaksanakan sebagai kegiatan lainnya selama tahun 2025, yang mencerminkan dedikasi dan pencapaian signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsi, di antaranya:

#### Penghargaan DigiWave Tahun 2025

Pada penghargaan DigiWave tahun 2025, dimana Balai Monitor SFR Kelas II Mataram berhasil meraih berbagai penghargaan dalam acara tahunan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (sebelumnya Direktorat Jenderal SDPPI), antara lain:

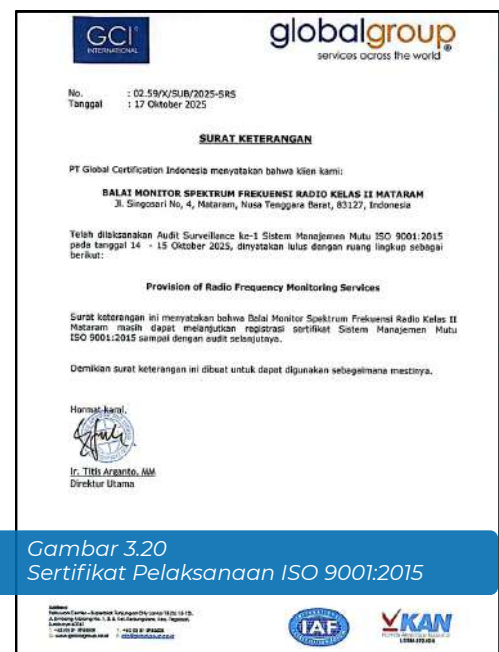
- Penghargaan kategori Administrasi Terbaik, dengan akumulasi nilai dari pengelolaan BMN, pengelolaan arsip, penilaian IKPA, penilaian NKA, capaian janji kinerja, dan penilaian kualitas dokumen penganggaran.
- Penghargaan kategori Video Competition
- Penghargaan kategori Pengelolaan Denda Administrasi SFR dan APT Terbaik



Gambar 3.19  
Acara Puncak Penghargaan DigiWave Tahun 2025

#### Pelaksanaan ISO 9001:2015

Balai Monitor SFR Kelas II Mataram menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup audit "Kegiatan Pelayanan Penunjang Pemerintah untuk Pemantauan Frekuensi Radio". Semua klausul dalam persyaratan ISO 9001:2015 telah diterapkan, kecuali pada aspek rancangan dan pengembangan produk dan jasa, karena layanan yang diberikan merupakan kegiatan penunjang pemantauan frekuensi radio pemerintah. Pelaksanaan audit internal dan tinjauan manajemen telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, dan bukti terkait kemampuan sistem manajemen untuk memenuhi persyaratan serta hasil yang diharapkan tercatat dengan baik.



Gambar 3.20  
Sertifikat Pelaksanaan ISO 9001:2015

## Pelaksanaan Event-Event Penting Tahun 2025

Sepanjang Tahun 2025, partisipasi aktif Balai Monitor SFR Kelas II Mataram dalam pengamanan dan pengawasan penyelenggaraan *event* penting merupakan wujud komitmen dalam menjaga tertib penggunaan SFR dan keandalan alat/perangkat telekomunikasi, khususnya pada kegiatan yang melibatkan mobilitas tinggi, penggunaan perangkat radio secara masif, serta kebutuhan komunikasi yang andal. Pada *event* berskala internasional maupun nasional, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram berperan dalam pengamanan frekuensi, pengawasan kepatuhan penggunaan SFR dan alat telekomunikasi, koordinasi lintas instansi, serta pengukuran kualitas layanan jaringan seluler guna mendukung kelancaran komunikasi penyelenggara, aparat pengamanan, dan masyarakat. Berikut rincian pelaksanaan pengawasan SFR pada berbagai *event*:

### Event Internasional

Balai Monitor SFR Kelas II Mataram berperan aktif dalam pengawasan *event* internasional yang diselenggarakan di wilayah Nusa Tenggara Barat, seperti ajang balap motor dan mobil berskala internasional. Pada *event* ini, pengawasan dilakukan dengan koordinasi intens bersama tim penyelenggara serta instansi terkait guna memastikan frekuensi radio yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengganggu kelancaran *event*, mengingat pentingnya komunikasi yang lancar dan aman untuk keberhasilan acara.

1. GT World Challenge Asia yang dilaksanakan pada tanggal 07 - 11 Mei 2025

Balai Monitor SFR Kelas II Mataram berperan aktif dalam pengamanan dan pengawasan spektrum frekuensi radio guna menjamin kelancaran komunikasi seluruh unsur penyelenggara *event* melalui koordinasi dengan panitia, aparat keamanan, dan instansi terkait. Pengawasan dilakukan terhadap dinas tetap dan dinas bergerak darat pada pita frekuensi 145 MHz hingga 2400 MHz dengan hasil monitoring sebanyak 399 pancaran stasiun radio, terdiri atas 262 pancaran legal dan 137 pancaran *off air*, serta seluruh frekuensi terdaftar dapat digunakan dengan baik tanpa gangguan signifikan. Selain itu, dilaksanakan juga pengukuran kualitas layanan jaringan bergerak seluler (QoS) di Area Sirkuit Mandalika yang menunjukkan kualitas layanan berada dalam kategori baik.



Gambar 3.21  
Monitoring SFR Event GT World

2. Porsche Carrera Asia Cup yang dilaksanakan pada tanggal 21 - 24 Agustus 2025

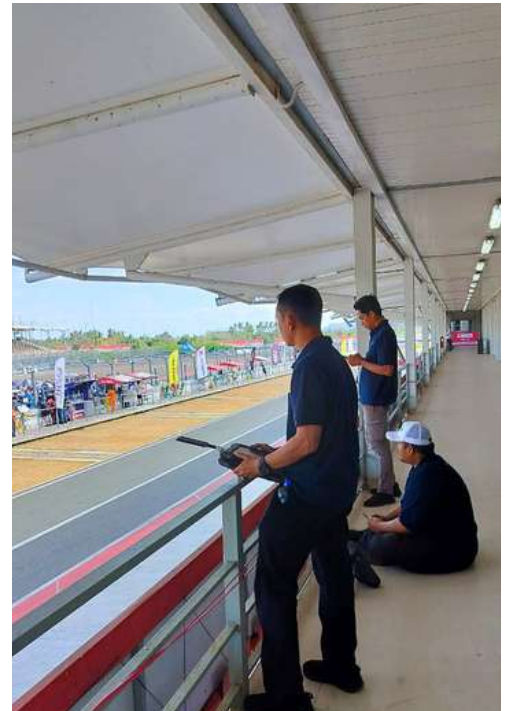
Balai Monitor SFR Kelas II Mataram berperan aktif dalam pengamanan dan pengawasan spektrum frekuensi radio guna memastikan kelancaran komunikasi selama *event* berlangsung melalui koordinasi dengan panitia penyelenggara, aparat keamanan, dan instansi terkait. Pengawasan dilakukan terhadap Dinas Bergerak, Dinas Bergerak Darat, Dinas Siaran, dan Dinas Tetap pada pita frekuensi 150 MHz hingga 2400 MHz. Hasil monitoring menunjukkan terdapat 224 stasiun radio yang terpantau, terdiri atas 132 pancaran legal dan 92 pancaran dalam kondisi *off air*, dengan penggunaan frekuensi VHF dan UHF berada dalam kondisi clear sehingga tidak menimbulkan gangguan komunikasi selama *event*.



Gambar 3.22  
Monitoring SFR Event PCAC 2025

3. FIM Asia Road Race Championship yang dilaksanakan pada tanggal 28 - 31 Agustus 2025

Pada pelaksanaan *Event* FIM Asia Road Race Championship, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram turut berperan aktif dalam pengamanan dan pengawasan spektrum frekuensi radio guna menjamin kelancaran komunikasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan *event*. Kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui koordinasi dengan panitia penyelenggara, aparat keamanan, serta instansi terkait, dengan cakupan pengamatan terhadap Dinas Bergerak Darat, Dinas Siaran, dan Dinas Tetap pada pita frekuensi 400 MHz hingga 5850 MHz. Berdasarkan hasil observasi dan monitoring, teridentifikasi sebanyak 131 pancaran stasiun radio, terdiri atas 107 pancaran stasiun radio legal dan 24 pancaran stasiun radio dalam kondisi *off air*. Hasil analisis menunjukkan bahwa frekuensi untuk dinas bergerak darat dan *broadcast* pada pita UHF serta layanan WiFi pada pita SHF berada dalam kondisi *clear*, serta terdapat beberapa ISR yang tidak memancar.



Gambar 3.23  
Monitoring SFR Event AARC 2025

4. MotoGP yang dilaksanakan pada tanggal 01 - 05 Oktober 2025

Pada penyelenggaraan *Event* MotoGP Mandalika, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram berperan aktif dalam pengamanan dan pengawasan spektrum frekuensi radio serta kualitas jaringan telekomunikasi melalui koordinasi intensif dengan MGPA, aparat keamanan, dan instansi terkait, mengingat tingginya kebutuhan komunikasi pada *event* ini. Monitoring dilakukan terhadap Dinas Bergerak, Dinas Bergerak Darat, dan Dinas Siaran pada pita frekuensi 400 MHz hingga 7400 MHz, dengan hasil 219 stasiun radio termonitor, ditemukan 1 stasiun radio ilegal serta indikasi *double monitoring*, sehingga direkomendasikan penyediaan pos monitoring Drone Gun dan frekuensi cadangan untuk mitigasi interferensi. Selain itu, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram melaksanakan pengukuran QoS dan QoE jaringan seluler pada PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk., dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. yang menunjukkan kecepatan jaringan relatif tinggi namun masih memerlukan optimasi kualitas sinyal (SINR) untuk meningkatkan stabilitas layanan internet, khususnya *browsing* dan video. Dalam pengawasan frekuensi SNG, ditemukan penggunaan frekuensi 6057 MHz oleh PT MGPA Nusantara Jaya tanpa izin sehingga dikenakan sanksi administratif.



Gambar 3.24  
Monitoring SFR dan Pengukuran Kualitas Jaringan Seluler Event MotoGP Seri 18

## Event Nasional

Selain pengamanan pada event internasional, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram juga berperan aktif dalam pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio pada berbagai event nasional. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan, keteraturan, dan kualitas penggunaan frekuensi radio bagi penyelenggara, aparat keamanan, media, serta masyarakat, melalui kegiatan observasi, monitoring, pengukuran kualitas jaringan, dan koordinasi lintas instansi. Pelaksanaan pengawasan pada event nasional ini penting dalam menjaga kelancaran komunikasi, mencegah potensi gangguan frekuensi, serta mendukung terselenggaranya layanan komunikasi yang andal dan aman.

1. Posko Idul Fitri 1446 H yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret - 07 April 2025

Pada kegiatan observasi dan monitoring tanggal 26–30 Maret 2025, terpantau sebanyak 241 stasiun radio yang mencakup Dinas Bergerak Darat, Dinas Bergerak Maritim, dan Dinas Bergerak Penerbangan pada pita frekuensi 0,190 MHz s.d. 15.700 MHz, dengan rincian 216 stasiun radio legal, 1 stasiun radio belum teridentifikasi, 1 stasiun radio *off air*, 15 stasiun radio *clear*, dan 8 *noise*, serta ditemukan indikasi *double monitoring*. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret serta 6–7 April 2025, dilakukan monitoring okupansi spektrum pada 7 pita frekuensi radio dan *static test* jaringan operator seluler, dengan hasil seluruh frekuensi terpantau *clear* dan kondisi jaringan seluler dalam keadaan baik.

2. Fornas Ke-VIII yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli - 01 Agustus 2025

Pada pelaksanaan FORNAS ke-VIII, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram melaksanakan observasi dan monitoring spektrum frekuensi radio untuk mendukung kelancaran komunikasi penyelenggaraan event. Pengawasan mencakup Dinas Bergerak Darat dan Dinas Tetap, dengan total 106 stasiun radio termonitor, terdiri dari 88 stasiun radio legal dan 18 stasiun radio *off air*. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh frekuensi radio yang didaftarkan dapat digunakan dengan baik tanpa gangguan, serta layanan jaringan seluler berfungsi optimal selama kegiatan berlangsung. Selain itu, hasil pemantauan izin dan okupansi spektrum frekuensi radio pada pita 400 MHz dan 1900 MHz untuk komunikasi penyelenggara event serta pita 5 GHz untuk kebutuhan video *live broadcast* terpantau dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara andal.

3. Posko Nataru 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2025 - 04 Januari 2026

Pada Posko Nataru, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram melakukan pengawasan dan pemantauan frekuensi radio yang digunakan untuk berbagai keperluan komunikasi selama periode liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pengawasan dilakukan terhadap frekuensi-frekuensi yang digunakan untuk layanan darurat, keamanan, serta sistem komunikasi publik. Hasil monitoring pada frekuensi krusial seperti dinas penerbangan, dinas maritim, radar cuaca BMKG, marabahaya, dinas khusus pertahanan dan keamanan termonitor tidak ada gangguan. Selain itu, dilaksanakan pengukuran kualitas layanan jaringan seluler di beberapa titik krusial seperti bandara, pelabuhan, dan lokasi-lokasi wisata, dengan hasil kualitas jaringan secara umum berada pada kategori cukup hingga baik. Kolaborasi dengan instansi terkait seperti TNI/POLRI, Airnav, dan penyelenggara komunikasi seluler sangat penting untuk memastikan tidak ada gangguan yang dapat menghambat kelancaran libur Nataru.



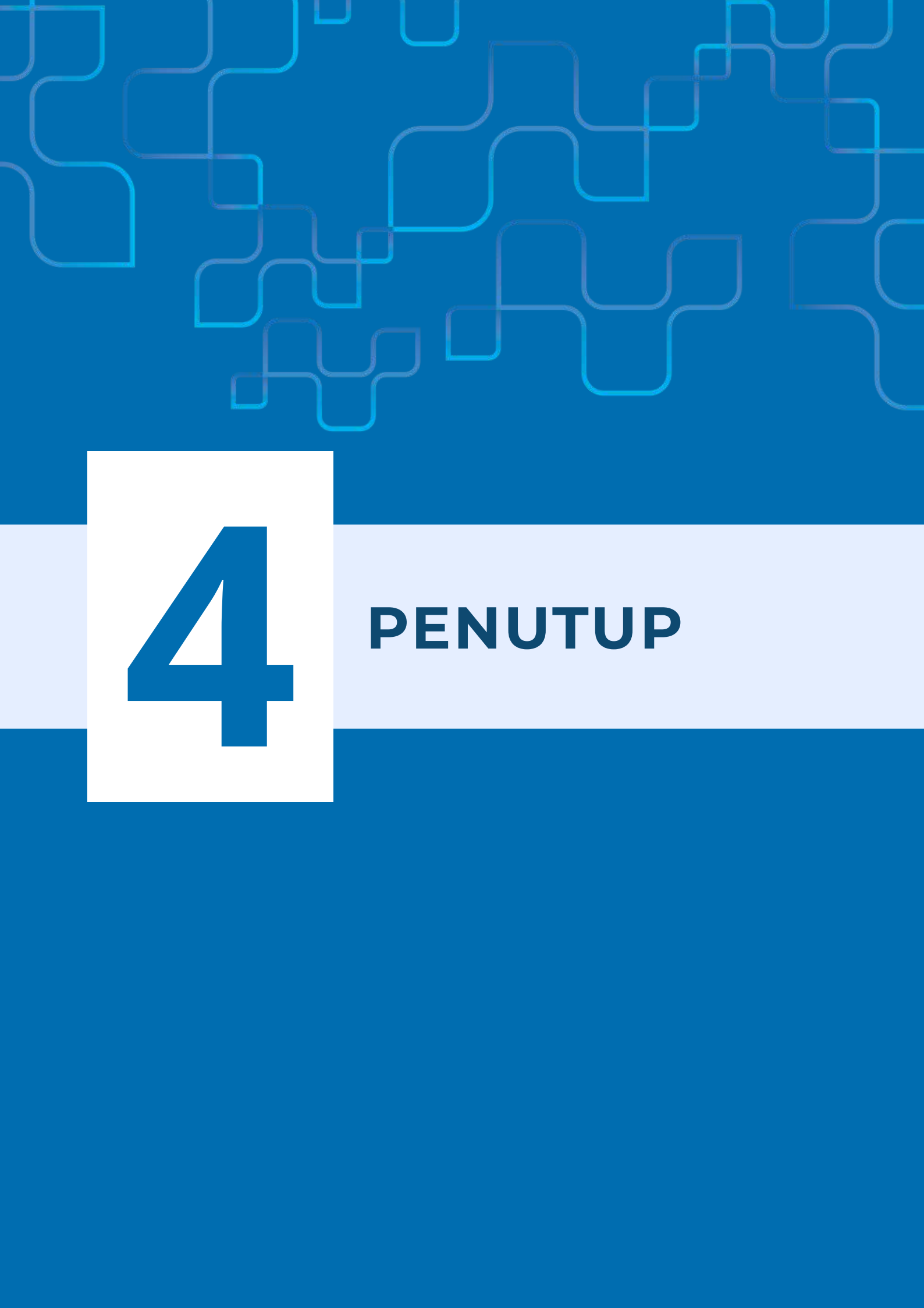
Gambar 3.25  
Pengukuran QoS di Bandara Lombok



**“Apa pun yang kita lakukan sebaiknya membawa manfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk bangsa dan umat manusia”**

**- Ki Hajar Dewantara -**





# 4

## PENUTUP

# Kesimpulan

Dalam rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Mataram selama tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

## **1. Pelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2025**

Secara umum, program kerja tahun anggaran 2025 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan, mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Balai Monitor SFR Kelas II Mataram. Pelaksanaan program kerja ini mencakup berbagai kegiatan pengawasan spektrum frekuensi radio, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta respons terhadap kebutuhan pengelolaan frekuensi untuk berbagai event nasional dan internasional.

## **2. Pencapaian Target Perjanjian Kinerja**

Target yang tercantum dalam perjanjian kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram untuk Tahun 2025 umumnya telah tercapai dengan baik. Bahkan, beberapa indikator kinerja berhasil melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan komitmen dan dedikasi tinggi dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan frekuensi radio, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait.

## **3. Tindakan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio**

Tindak lanjut terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio telah dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pemberian sanksi berdasarkan Undang-Undang yang ada. Langkah ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam penggunaan spektrum frekuensi radio serta mendorong kesadaran para pemangku kepentingan agar lebih taat terhadap peraturan yang ditetapkan. Selain itu, tindakan ini juga mendukung terciptanya pengelolaan spektrum frekuensi yang lebih efisien, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Balai Monitor SFR Kelas II Mataram terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka menjaga integritas pengelolaan spektrum frekuensi radio di Indonesia.

## **4. Kebutuhan Penambahan SDM Fungsional Pengendali Frekuensi**

Mengingat luasnya wilayah dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, terdapat kebutuhan mendesak untuk penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) fungsional pengendali frekuensi radio. Penambahan SDM ini sangat penting untuk memaksimalkan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dengan lebih efektif dan efisien, serta menjamin kelancaran pengelolaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Mataram.



# **GALERI**



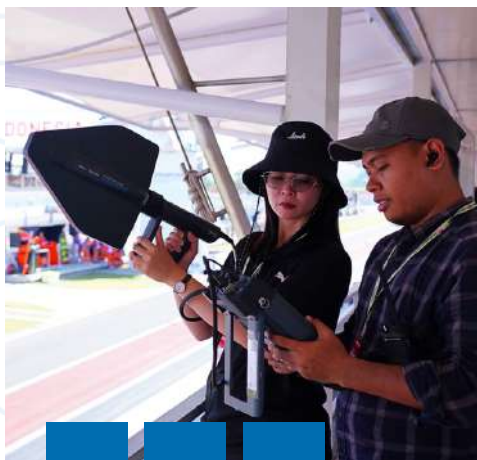
## SOSIALISASI LAYANAN PUBLIK



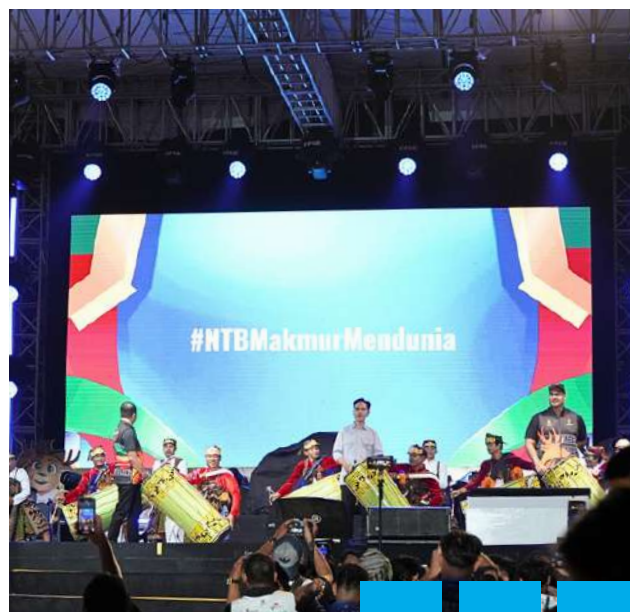
## PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS



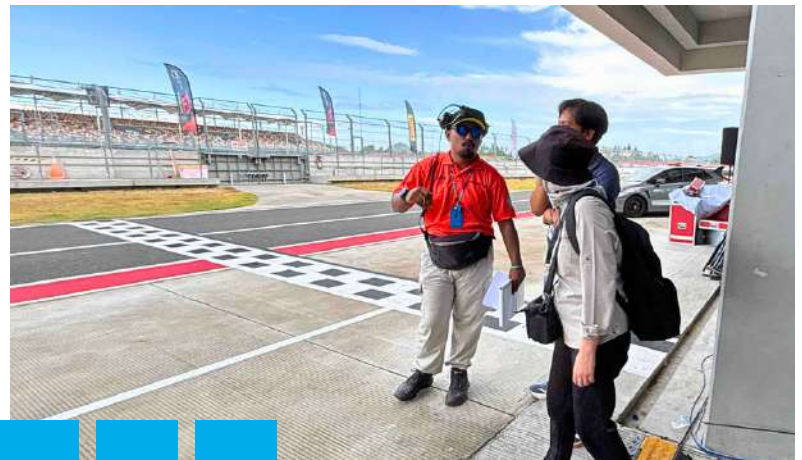
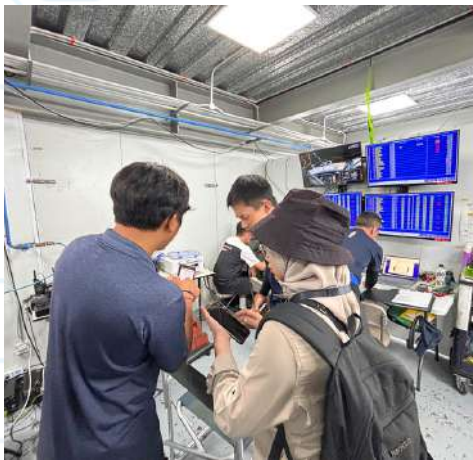
## MONITORING SFR EVENT MOTOGP SERI 18



## MONITORING SFR EVENT FORNAS NTB KE-8



## MONITORING SFR EVENT GT WORLD CHALLENGE ASIA 2025



## MONITORING SFR EVENT PORCHE CARRERA CUP ASIA DAN EVENT ASIA ROAD RACING CHAMPIONSHIP 2025



## PENERTIBAN SFR DAN APT



## INSPEKSI DAN VALIDASI DATA ISR SERTA INSPEKSI KONDISI PERANGKAT SMFR





Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram  
Jl. Singosari No. 4, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telp. (0370) 646411 | Email: [upt\\_mataram@postel.go.id](mailto:upt_mataram@postel.go.id)

   [balmon.mataram](https://www.facebook.com/balmon.mataram)

SCAN ME

